

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, namun dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggungjawab berbagai pihak, baik instansi sektor, lembaga swadaya masyarakat, dunia pendidikan, para-pelaku usaha dan masyarakat. Kondisi lingkungan hidup yang sekarang terjadi merupakan perpaduan antara berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan tersebut dalam merespon dampak negatif dari berbagai aktifitas pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Salah satu hal penting dalam menentukan prioritas program/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketepatan dan kecepatan merespon isu-isu strategis yang terjadi yang kemudian dijabarkan dalam pembagian peran (*role sharing*) bagi para pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala, berkesinambungan dan berkelanjutan. Dokumen tertulis tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan perlu dibuat tidak hanya untuk kepentingan administrasi dan pertanggungjawaban publik, namun juga digunakan sebagai bahan evaluasi. Hasil evaluasi selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan semua program/kegiatan dengan pembiayaan berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.08. 01.00.00.5.1 Tanggal: 29 Desember 2014, maka sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban publik tentang efektifitas dan akuntabilitas Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua dalam

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut perlu menyusun Laporan Tahunan.

Laporan Tahunan ini dimaksudkan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus untuk memenuhi Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua .

Disamping itu untuk memberikan dokumen tertulis tentang hasil-hasil kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh BPLH Provinsi Papua pada tahun 2015.

Tentunya laporan tahunan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari siklus pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam laporan tahunan ini, hal-hal yang dituangkan meliputi; kondisi organisasi SKPD BPLH Provinsi Papua, Sarana penunjang, hasil pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, program kerja tahun 2015. Laporan tahunan ini dibuat berdasarkan pada laporan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dibuat oleh masing-masing Sub Bidang dan Sub Bagian di lingkungan BPLH Provinsi Papua yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Tahunan BPLH Provinsi Papua Tahun 2015 bertujuan:

- Melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Papua Tahun 2015;
- Memberikan gambaran proses pelaksanaan program/kegiatan
- Menyediakan informasi penting terkait pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015;

C. MANFAAT PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Tahunan BPLH Provinsi Papua tahun 2015 ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
- Sebagai dokumen tertulis kepada berbagai pihak yang membutuhkan
- Sebagai referensi pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup di waktu mendatang

D. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum atau landasan hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Tahunan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar
- b. Daftar Isi
- c. Bab I. Pendahuluan
- d. Bab II. Kondisi Umum BPLH Provinsi Papua
- e. Bab III. Program Kerja
- f. Bab IV. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- g. Bab V Keuangan
- h. Bab VI Masalah Dan Solusi
- i. Bab VII Program Kerja Tahun 2015

F. VISI

Sejalan dengan perkembangan pembangunan di Papua saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur Papua selama 5 (lima) tahun kedepan (2014-2018), maka Visi Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua Tahun 2014-2018 adalah :

“BPLH Provinsi Papua proaktif dan berperan mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Adat menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera”.

G. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Menerapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan;
2. Membangun perencanaan dan koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup antar pemangku kepentingan dengan menerapkan kaidah good governance;
3. Mewujudkan manfaat ekonomi lingkungan hidup bagi kehidupan masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam mengelola lingkungan hidup;
5. Mendorong peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan Hidup;
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup (daya tampung dan daya dukung);
7. Mengembangkan system manajemen dan informasi lingkungan hidup;
8. Mewujudkan Papua sebagai paru-paru dunia dalam penurunan emisi gas rumah kaca;

H. TUJUAN DAN SASARAN

1	Misi kesatu Tujuan Misi Sasaran Strategis	: Mewujudkan kebijakan pengelolaan SDALH guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan : Merumuskan berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup : Tersedianya kebijakan pengelolaan SDA dan LH di Papua
2	Misi kedua Tujuan isi Sasaran Strategis	: Membangun perencanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup antar pemangku kepentingan : Mengkordinasikan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan para pihak : Terlaksananya pengelolaan Sumber daya Alam dan LH yang didukung oleh para pihak.
3	Misi ketiga Tujuan Misi Sasaran Strategis	: Menjamin kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik dan proporsional : Melaksanakan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap kuantitas dan kualitas potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup : Terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.
4	Misi keempat Tujuan Misi Sasaran Strategis	: Mewujudkan manfaat ekonomi sumber daya alam dan lingkungan Hidup bagi kehidupan masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan : Memanfaatkan SDA dan lingkungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kapasitas fiskal papua secara berkelanjutan : Tercapainya taraf hidup masyarakat yang sejahtera dan

		meningkatnya kapasitas fiskal
5	Misi kelima Tujuan Misi Sasaran Strategis	: Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup : Melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan pengelolaan SDA dan LH : Tersedianya lembaga yang profesional dalam pengelolaan sumber daya alam dan LH
6	Misi keenam Tujuan Misi SasaranStrategi	: Mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup : Memberdayakan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan SDA dan LH : Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH berbasis masyarakat adat Papua.
7	Misi ketujuh Tujuan Misi Sasaran Strategis	: Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kapasitas (daya tampung dan daya dukung) dan kualitas lingkungan hidup. : Melaksanakan upaya pengendalian dan pengawasan lingkungan Hidup : Terwujudnya kapasitas dan kualitas LH yang berkelanjutan
8	Misi kedelapan Tujuan Misi Sasaran Strategis	: Melaksanakan penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup : Meningkatkan kesadaran para pihak terhadap penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup : Terciptanya dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

9	Misi Kesembilan	: Mengembangkan sistem manajemen dan informasi aset sumber daya alam dan lingkungan
	Tujuan Misi	: Melaksanakan kerjasama dengan para pihak dalam menghimpun data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan
	Sasaran Strategis	: Tersedianya data base SDA dan LH yang didukung dengan Teknologi dan SDM yang profesional.

I. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang.

KEBIJAKAN

Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Papua sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan jasa-jasa lingkungannya, secara efisien, efektif, optimal dan akuntabel dalam mendukung perekonomian dan kehidupan rakyat Papua yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip sustainable management
2. Melindungi fungsi lingkungan hidup agar kualitas dan daya dukungnya tetap terjaga, sekaligus menjamin tersedianya ruang yang memadai bagi kehidupan masyarakat Papua
3. Mengembangkan sistem pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang mantap yang disertai dengan penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan pengembangan instrumen pendukung lainnya dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan perlindungan lingkungan hidup, yang berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam penegakan hukum, pengakuan hak azasi masyarakat adat dan lokal, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

4. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mencegah perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat
5. Meningkatkan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan peran aktif Papua dalam perlindungan lingkungan global.
7. Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim.

Tujuh kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Papua dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut selanjutnya merupakan prioritas pula dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahun Anggaran 2015 Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua memperoleh alokasi dana dari APBD Provinsi Papua sebesar Rp. 25.690.027.000,- yang bersumber dari Dana Bagi Hasil yang terdiri atas:

- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 9.862.884.000,-
- b. Belanja Langsung Rp. 15.827.143.000,-

Belanja tidak langsung digunakan untuk membiayai kebutuhan pegawai seperti gaji dan tunjangan pegawai sedangkan **belanja langsung** digunakan untuk membiayai 11 Program terdiri dari 45 (Empat puluh lima) kegiatan pembangunan yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.

Sampai bulan Desember 2015, dana belanja tidak langsung terrealisasi sebesar Rp. 9.233.714.912 (*Sembilan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah*) atau 93,62% dan belanja langsung realisasi keuangannya sebesar Rp.14.664.541.467,- (*Empat belas milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*) atau 92,65% untuk membiayai 45 Kegiatan.

Untuk kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada matrik/tabel berikut:

BAB III

HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan. Pada tahun anggaran 2015 Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua telah menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan, dengan hasil-hasil sebagai berikut :

I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan perlengkapan kantor merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Output Kegiatan

adalah tersedianya:

- 1) Kendaraan roda 4 3500 cc : 1 (satu) unit
- 2) Kendaraan roda 4 1500 cc : 1 (unit) unit

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 775.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 98,68% dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 764.759.500,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah). Dengan bobot 17,92%.

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan perlengkapan kantor merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Output Kegiatan

adalah tersedianya :

1) Alat Pendingin Ruangan (AC Sharp 1 PK)	: 3	Unit
2) Alat Pendingin Ruangan (AC Sharp 2 PK)	: 3	Unit
3) Meja Kerja ½ Biro	: 5	Unit
4) Meja Kerja 1 biro	: 2	Unit
5) Kursi Hidrolik	: 7	Buah
6) Kursi Kerja	: 50	Buah
7) Tralis	: 1	Paket
8) Kain Horden	: 1	Paket
9) Lemari Peralatan Laboratorium	: 2	Set

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 512.401.000,- (Lima Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,92% sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 512.000.000,- (Lima Ratus Dua Belas Juta Rupiah). Dengan bobot 11,85%.

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan peralatan kantor merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Output Kegiatan

adalah tersedianya :

1) Printer Laserjet	: 2	Buah
2) Komputer Lenovo	: 2	Buah
3) Notebook Apple	: 1	Buah

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 90.045.000,- (Sembilan Puluh Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,78% sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 89.850.000,-(Empat ratus Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Dengan bobot 2.08%.

4. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pengadaan peralatan kantor merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Output Kegiatan

adalah tersedianya :

- 1) Pengadaan Altusen Wireless : 1(satu) Unit

Outcome Kegiatan.

Lancarnya operasional kantor.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 140.000.000,-(*Seratus Empat Puluh Juta Rupiah*), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,93% sebesar sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 139.900.000,- (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional merupakan salah satu cara untuk menjaga keawetan kendaraan agar proses operasional kantor tetap lancar.

Output Kegiatan.

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, yang terdiri dari :

- Mobil : 10 (sepuluh) Unit
- Motor : 15 (Lima belas) Unit

Outcome Kegiatan.

Lancarnya operasional kantor.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 481.000.0000,-(*Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah*), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% sedangkan dana yang telah digunakan dalam

kegiatan adalah sebesar Rp. 480.996.989,-(Empat Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Dengan bobot 11.12%.

6. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor merupakan salah satu cara untuk menjaga keawetan perlengkapan gedung kantor agar proses operasional kantor tetap lancar.

Output Kegiatan.

- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, terdiri dari:
 - 1) Pengisian Freon AC 45 unit
 - 2) Pemeliharaan Mesin Ketik 5 unit
 - 3) Pemeliharaan Komputer 40 unit
 - 4) Pemeliharaan Jaringan WiFi 1 paket

Outcome Kegiatan.

- Lancarnya pelayanan administrasi kantor.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 248.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100 % dan realisasi keuangan 99,77 % sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 247.435.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dengan bobot 5,73%.

7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor merupakan salah satu cara untuk menjaga keawetan gedung kantor agar proses operasional kantor tetap lancar.

Output Kegiatan.

Terpeliharanya Ruang BPLH Provinsi Papua

Outcome Kegiatan.

- Lancarnya pelayanan administrasi kantor.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100 % dan realisasi keuangan 90.08 % sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 229.700.000,- (Dua ratus dua Puluh Sembilan Juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan bobot 5,90%.

8. Pembangunan Pagar Laboratorium

Pembangunan Pagar Laboratorium merupakan salah satu cara untuk menjaga keamanan gedung laboratorium BPLH Provinsi Papua.

Output Kegiatan.

Terbangunnya pagar laboratorium BPLH Provinsi Papua

Outcome Kegiatan.

Amannya laboratorium BPLH Provinsi Papua

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.559.250.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100 % dan realisasi keuangan 70,87 % sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 1.105.016.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Juta Enam Belas Ribu rupiah). Dengan bobot 36.05%.

9. Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan

Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan bertujuan untuk melengkapi peralatan laboratorium yang telah ada

Output Kegiatan.

Bertambahnya jumlah peralatan laboratorium yang terdiri dari :

1) Pengadaan Alat Pengukur Emisi Gas Buang	
Kendaraan Bermotor Solar	1 Unit
2) Pengadaan Aqua Bidestilator	1 Unit
3) pH Meter (portable)	1 Unit

Outcome Kegiatan.

Dapat dilakukan pengujian emis gas buang kendaraan bermotor dan kualitas air.

Anggaran kegiatan sebesar Rp 405.000.000,- (Empat Ratus Lima Juta Rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100 % dan realisasi keuangan 99,63% sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 403.500.000,- (Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah). Dengan bobot 9,36%.

II. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.

Satu item dalam penilaian kinerja adalah kedisiplinan dalam berpakaian dinas.

Output Kegiatan.

Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi PNS Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua sebanyak 162 (Seratus Enam Puluh Dua) stel yang terdiri dari :

- Pakaian Dinas (Khaky) : 81 Stel
- Pakaian Batik : 81 Stel

Outcome Kegiatan

Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian dinas.

Anggaran kegiatan sebesar Rp.89.100.000,-(Delapan Puluh Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah), Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai

100% dan realisasi keuangan 100% sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 89.100.000,-(Delapan Puluh Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah. Dengan bobot 0.56%.

III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penting sehingga diperlukan pemahaman yang cukup memadai tentang kepegawaian, keuangan dan pengadaan barang/jasa, Kursus AMDAL dan Analisis Laboratorium

Output Kegiatan.

Terlaksananya kursus/bimtek sebanyak 26(dua puluh enam) orang;

Outcome Kegiatan

Meningkatnya pengetahuan aparatur sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.

Anggaran kegiatan sebesar Rp.420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta rupiah) Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 98,69% sedangkan dana yang telah digunakan dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 414.497.300 (Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) Dengan bobot 2,65%.

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

1. Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua

Dewasa ini di wilayah Provinsi Papua telah ditetapkan mekanisme pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi segala kebutuhan makhluk hidup, khususnya manusia. Pemanfaatan yang dilakukan melalui mekanisme yang beragam, dari cara pengolahan

sederhana sampai dengan pengolahan secara modern dan profesional, seperti yang dilakukan oleh PDAM. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan yang saat ini dilakukan di wilayah Provinsi Papua, harus dilaksanakan dengan penuh bijaksana, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah menjaga keberlangsungan keberadaan air bagi kebutuhan di masa depan. Hal yang perlu diingat bahwa terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara lapisan air (*hydrosphere*) dimana air berada dengan lapisan tanah (*geosphere*) yang mana keduanya sama – sama dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Misalnya, gangguan terhadap hutan menjadi lahan pertanian, seperti di Pegunungan Cycloop, akan dapat menyebabkan reduksi yang bersifat negative yang ada di atasnya dan akan mengurangi proses transpirasi.

Hingga saat ini, pemanfaatan air permukaan belum maksimal sebagai air baku air minum, air permukaan berupa sungai masih digunakan sebagai sarana pembuangan sampah domestik bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan/bantaran sungai. Disamping itu beberapa sungai yang terdapat di Provinsi Papua secara alami memiliki kondisi fisik yang keruh akaibat banyaknya partikel tersuspensi yang terdapat dalam badan air tersebut. Mengingat pentingnya ketersediaan air baku air minum untuk masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua melaksanakan kegiatan Pemantauan Kualitas Air yang meliputi beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Paniai.

Pemantauan kualitas air yang dilakukan diharapkan dapat menyediakan informasi berupa data kualitas air pada lima sungai yang menjadi objek pengambilan contoh air dan data tersebut dapat digunakan untuk penentuan kebijakan dalam penetapan pemanfaatan air baku air minum.

Output Kegiatan

Hasil pemantauan ini adalah sebagai berikut:

- Tersedianya data dan informasi kualitatif tentang kondisi kualitas Air Sungai.
- Sebagai sumber data penentuan sumber air baku air minum.
- Sebagai bahan informasi tentang kondisi kualitas air bagi masyarakat pengguna air sebagai sumber air baku air minum.

Outcome Kegiatan

Kegiatan ini adalah melakukan pemantauan kualitas air sungai untuk mendapatkan data base dan trend kualitas air sungai dalam rangka pengelolaan kualitas air.

Lokasi Pemantauan adalah sebagai berikut :

a. Kab. Biak Numfor - Sungai Korem - Sungai Wafor - Kali Ruar - Sumur Snerbo	b. Kab. Nabire - Hulu Sungai Nabire - Hilir Sungai Nabire - Hulu Sungai Sanoba - Hilir Sungai Sanoba -
c. Kab. Paniai - Hulu Sungai Enarotali - Tengah Sungai Enarotali - Hilir Sungai Enarotali	d. Kab. Merauke - Rawa Biru - Sungai Maro - Sumur Nono - Sumur Sayonara
e. Kab. Mimika - Sungai Selamat Datang - Sungai SP III - Sungai Muja	

Titik Sampling di Kabupaten Paniai

NO.	NAMA TITIK SAMPLING	KOORDINAT
1.	Hulu Sungai Enarotali	-
2.	Tengah Sungai Enarotali	-
3.	Hilir Sungai Enarotali	-

Titik Sampling di Kabupaten Nabire

NO.	NAMA TITIK SAMPLING	KOORDINAT
1.	Hulu Sungai Nabire	LS. 03 ⁰ 24' 23,6" BT. 135 ⁰ 31' 19,1"
2.	Hilir Sungai Nabire	LS. 03 ⁰ 22' 06,6" BT. 135 ⁰ 29' 28,2"
3.	Hulu Sungai Sanoba	LS. 03 ⁰ 19' 53,4" BT. 135 ⁰ 32' 21,4"
4.	Hilir Sungai Sanoba	LS. 03 ⁰ 18' 52,1" BT. 135 ⁰ 32' 39,9"

Titik Sampling di Kabupaten Mimika

NO.	NAMA TITIK SAMPLING	KOORDINAT
1.	Sungai Selamat Datang	LS. 04 ⁰ 31' 23,0" BT. 136 ⁰ 51' 25,5"
2.	Sungai SP III	LS. 04 ⁰ 27' 24,6" BT. 136 ⁰ 51' 29,8"
3.	Sungai Muja	LS. 04 ⁰ 30' 08,0" BT. 136 ⁰ 50' 48,8"

Titik Sampling di Kabupaten Biak Numfor

NO.	NAMA TITIK SAMPLING	KOORDINAT
1.	Sungai Korem	LS. 08 ⁰ 40' 49,4" BT. 140 ⁰ 51' 21,3"
2.	Sungai Wafor	LS. 08 ⁰ 28' 52,7" BT. 140 ⁰ 26' 08,8"
3.	Kali Ruar	LS. 08 ⁰ 31' 25,6" BT. 140 ⁰ 24' 50,7"
4.	Sumur Snerbo	LS. 08 ⁰ 29' 58,5" BT. 140 ⁰ 23' 47,2"

Titik Sampling di Kabupaten Merauke

NO.	NAMA TITIK SAMPLING	KOORDINAT
1.	Rawa Biru	LS. 08 ⁰ 40' 49,4" BT. 140 ⁰ 51' 21,3"
2.	Hulir Sungai Maro	LS. 08 ⁰ 28' 52,7" BT. 140 ⁰ 26' 08,8"
3.	Sumur Nono	LS. 08 ⁰ 31' 25,6" BT. 140 ⁰ 24' 50,7"
4.	Sumur Sayonara	LS. 08 ⁰ 29' 58,5" BT. 140 ⁰ 23' 47,2"

Prosedur pengambilan sampel yang dilakukan pada 18 titik pantau tersebut menggunakan metode Grap Sample (sesaat). Parameter yang di uji adalah parameter acuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dengan Klasifikasi Mutu Air Kelas I yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Tabel 3.1. Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai Kabupaten Paniai

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	10 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Hulu S.Enarotali	25.7	111.0	30.0	7.16	3.67	10.0	1.25	0.08	2.40	0.33	0.90	0.015	0.41	1.0	0.009
2.	Tengah S.Enarotali	25.6	112.0	40.0	9.00	3.52	15.0	1.30	0.11	3.70	0.33	1.30	0.005	0,55	1.0	0,005
3.	Hilir S.Enarotali	24.7	161.0	22.0	7.91	5.67	30.0	1.23	5.36	4.20	0.40	3.10	0.010	2.18	1.0	0,008

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	Minyak/Lemak	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	100 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	0.00	0.163	0,005	3.67	0.053	0.000	0.016	0,048	0,135	4.0	298.0	10.0	0,04	9	37
2.	0,00	0.057	0,002	0,043	0,015	0,000	0,005	0,032	0,076	5.0	915.0	31.0	0,06	7	7
3.	0,00	1.578	0,003	0,049	0,302	0,000	0,029	0,112	0.056	16.0	600	39.0	0,12	4	46

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Provinsi Papua Tahun 2015.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

Tabel.3.2. Data Hasil Analisis Laboratorium Pemantauan Kualitas Air Sungai Kabupaten Nabire

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	10 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Hulu S. Nabire	28.1	210.0	23.0	7.00	3.15	10.0	6.61	0.17	8.00	0.056	1.40	0.003	<0.01	7	<0.001
2.	Hilir. S. Nabire	31.2	78.1	28	7.39	3.1	10	6.31	0.04	11.8	0.34	3	0.002	0.7	10	0.001
3.	Hulu S. Sanoba	25	158	27	7.95	4.12	10	7.6	<0.01	11.8	0.01	0.5	0.003	0.2	10	0.001
4.	Hilir S. Sanoba	29	173	60	7.9	3.8	15	7.12	0.1	9	0.5	1.4	0.002	0.6	9	0.008

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	100 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	0.00	0.1	0.002	<0.002	0.02	0.000	0.03	0.04	<0.01	8	447	35	0.09	166	188
2.	0.00	0.5	0.002	<0.001	0.09	0.000	0.06	0.04	0.06	60	682	24	0.05	48	≥1898
3.	0.00	0.3	0.004	0.001	0.08	0.000	0.06	0.06	<0.001	11	472	36	0.06	36	≥1898
4.	0.00	1.3	0.005	0.001	0.2	0.000	0.09	0.06	0.04	98	306	35	0.06	23	44

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Provinsi Papua Tahun 2015.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

Tabel 3.3. Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai Kabupaten Mimika

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	10 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Sungai Selamat Datang	28.3	72.0	70.0	7.13	3.65	15.0	6.82	0.67	3.70	0.51	1.91	0.100	0.66	16.0	0,001
2.	Sungai Muja	32.0	64.3	42.0	7.36	1.42	5.0	6.66	0.05	0.74	0.36	1.0	0.001	0.87	1.0	0.003
3.	Sungai SP III	25.0	77.9	65.0	7.48	2.84	15.0	7.25	0.07	3.70	0.28	1.20	0.001	0.79	8.0	0.003

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	100 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	0.00	0.281	0.007	0.021	0.096	0.000	0.022	0.056	< 0,001	21.0	450.0	40	0.06	40	55
2.	0.00	0.024	0.001	0.010	0.005	0.000	0.002	0.029	0.015	33	560.0	60.0	0.06	32	33
3.	0.00	0.023	0.001	0.026	0.006	0.000	0.002	0.027	0.025	21.5	1100.0	60.0	0.05	6	58

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2015.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

Tabel.3.4. Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai Kabupaten Merauke

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	10 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Rawa Biru	30	205.0	128.0	8.4.9	3.74	20	5.67	0.34	11	< 0,01	1.10	< 0,001	0.15	1.0	< 0,001
2.	Hulu S. Marro	29.9	24119.0	3289.0	8.17	5.18	20.0	7.70	0.48	491.0	0.13	1.80	0.002	0.69	70.0	0.002
3.	Sumur Nono	30.1	320.0	56.0	7.66	2.25	5.0	5.50	0.07	40.0	0.06	4.0	< 0,001	0.15	15.0	< 0,001
4.	Sumur Sayonara	31.3	366.0	24.0	7.75	2.64	5.0	8.50	0.19	13.0	< 0,01	21.0	< 0,001	0.73	32.0	< 0,001

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	100 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	0.00	0.043	0.001	0.004	0.012	0.000	0.024	0.026	0.026	1.0	317.0	14.0	0.03	14	58
2.	0.00	0.178	0.006	0.003	0.047	0.000	0.019	0.024	0.007	23.0	863.0	12.0	0.03	9	99
3.	0.00	0.063	0.002	0.002	0.019	0.000	0.009	0.085	0.007	45.0	530.0	11.0	0.01	2	45
4.	0.00	0.016	0.004	< 0,001	0.03	0.000	0.012	0.632	0.009	43.0	510.0	9.0	0.01	34	390

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2015.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

Tabel 3.5. Data Hasil Analisis Lab. Pemantauan Kualitas Air Sungai Kabupaten Biak Numfor

No.	Nama titik Sampling	Temp	TDS	TSS	pH	BOD ₅	COD	DO	NH ₃ -N	Cl	F	NO ₃ -N	NO ₂ -N	PO ₄ -P	SO ₄	S-H ₂ S
Baku mutu		Deviasi 3 °C	1000 mg/L	50 mg/L	6 - 9	2 mg/L	10 mg/L	≥ 6 mg/L	0,5 mg/L	600 mg/L	0,5 mg/L	10 mg/L	0,06 mg/L	0,2 mg/L	400 mg/L	0,002 Mg/L
1.	Sungai Korem	25.0	283.0	22.0	7.91	2.26	5.0	3.0	0.28	100.0	0.33	3.40	0.004	0.09	20.0	0.008
2.	Sungai Wafor	28.0	165.0	37.0	8.07	4.45	15.0	5.0	0.21	20.0	0.36	2.90	0.002	0.03	10.0	0.006
3.	PDAM Snerbo	26.4	643.0	15.0	7.80	4.18	15.0	4.10	0.16	197.0	0.23	5.50	0.003	0.33	100.0	0.002
4.	Kali Ruar	26.7	148.0	21.0	7.93	1.16	5.0	3.20	0.17	26.0	0.26	3.30	0.011	0.51	20.0	0.005

Tabel lanjutan

No.	As	Fe	Cd	Cr	Mn	Hg	Pb	Cu	Zn	MBAS	M & L	Fenol	Cl ₂	Fecal Coliform	Total Coliform
BM	0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,01 mg/L	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,001 mg/L	0,03 mg/L	0,02 mg/L	0,05 mg/L	200 µg/L	1000 µg/L	1 µg/L	0,03 mg/L	100 MPN/100 MI	1000 MPN/100 MI
1.	0.00	0.082	0.002	0.003	0.025	0.000	0.007	0.085	0.072	33.0	193.0	78.0	0.11	6	294
2.	0.00	0.041	0.001	0.021	0.019	0.000	0.04	0.066	0.072	36.0	462.0	49.0	0.11	16	≥1898
3.	0.00	0.164	0.003	0.009	0.029	0.000	0.008	0.542	0.041	25.0	666.0	50.0	0.06	0	0
4.	0.00	0.187	0.006	0.020	0.056	0.000	0.018	0.062	0.047	33.0	932.0	69.0	0.06	22	130

Sumber : Hasil Analisis LABKESDA Prov. Papua Tahun 2015.

Keterangan Tabel :

- Kuning Tua = Lokasi sampling
- Biru Tua = Nama Parameter yang dianalisis
- Biru Muda = Nilai Baku Mutu Acuan PP.82/2001
- Hijau Tua = Hasil analisis yang memenuhi baku mutu
- Kuning Muda = Hasil analisis yang memiliki nilai sama dengan baku mutu.
- Merah = Hasil analisis yang melewati baku mutu

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 204.500.000,- (Dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 92,45%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp.189.063.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah). Dengan bobot 9,32%.

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua

Mutu dokumen AMDAL sangat ditentukan oleh empat faktor antara lain, faktor kompetensi teknis anggota komisi penilai AMDAL, integritas anggota komisi penilai, tersedianya panduan penilaian AMDAL dan Akuntabilitas dalam proses penilaian AMDAL. Keempat hal ini perlu dimiliki oleh seorang anggota penilai AMDAL, karena terkait erat dengan pengambilan keputusan atas berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua juga terdiri dari masyarakat terkena dampak. Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

1. Pemberian informasi yang transparan dan lengkap
2. Kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terkait
3. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana
4. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.

Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang penting dan sangat diharapkan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan.

Mengacu pada hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Papua cq. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua terus berupaya meningkatkan kapasitas penilai melalui pembimbingan teknis maupun mengikutsertakan anggota penilai pada diklat AMDAL. Pembimbingan teknis dimaksud antara lain melalui kegiatan peningkatan kapasitas komisi penilai AMDAL kepada masyarakat adat di Kabupaten Sarmi dan Studi lapangan ke PT. Musim Mas di Provinsi Riau dan Sumatra Utara.

Output Kegiatan

Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas komisi penilai AMDAL kepada masyarakat adat di Kabupaten Sarmi dan studi lapangan ke PT. Musim Mas di Provinsi Riau dan Sumatra Utara.

Outcome Kegiatan

Outcome dari kegiatan ini Anggota Komisi Penilaian AMDAL memiliki kemampuan menilai dokumen AMDAL secara cepat, tepat dan benar.

Anggaran kegiatan sebesar Rp.328.750.000,-(Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 97,55% dan realisasi keuangan 96,10%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 315.916.700,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Dengan 14,99%.

3. Pemantauan RKL / RPL

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL & RPL) sebagaimana ketentuan yang telah termuat dalam dokumen RKL dan RPL dari suatu usaha dan/atau kegiatan pada suatu rencana usaha dan/atau kegiatan merupakan kewajiban pemrakarsa. Untuk mengetahui kepatuhan pemrakarsa dalam pengelolaan lingkungan hidup maka instansi pengendali dampak lingkungan wajib melakukan pemantauan pada lokasi-lokasi/titik-titik ketaatan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam dokumen RKL dan RPL.

Usaha dan/ atau kegiatan yang menjadi sasaran pemantauan RKL dan RPL pada tahun 2015 adalah kegiatan yang telah di pantau pada tahun 2013 dan 2014. Alasan dipilihnya usaha dan/ atau kegiatan tersebut adalah ingin melihat keseriusan dan ketaatan pemrakarsa melaksanakan hasil temuan pada tahun 2013 dan 2014 dalam bentuk pelaporan rutin pengelolaan dan Pemantauan RKL dan RPL yang dilakukan 6 (enam) bulan sekali sebagaimana tertuang pada dokumen RKL dan RPL tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL pada tahun 2015 dilakukan secara pasif dan aktif. Pasif dilakukan dengan mengevaluasi laporan RKL-RPL yang disampaikan oleh pemrakarsa kegiatan, sedangkan pemantauan aktif adalah langsung meninjau lapangan untuk melihat langsung kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemrakarsa.

Acuan pelaporan pelaksanaan RKL dan RPL adalah KEPMELH Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan oleh Pemrakarsa. BPLH Provinsi Papua merupakan institusi pemerintah pada tingkat Provinsi yang diberikan tugas untuk mengendalikan dampak lingkungan, untuk itu dalam tugas dan fungsinya, secara terus menerus/berkesinambungan melakukan

pemantauan dan pembinaan terhadap usaha atau kegiatan yang telah mendapat kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan hidup.

Output Kegiatan

Melaksanakan pemantauan RKL dan RPL pada kegiatan yang telah di pantau pada tahun 2013 dan 2014 adalah:

1. PT. Salaki Mandiri Sejahtera di Bonggo-Sarmi

- **Pemantauan Pasif**

Sampai dengan dilakukan pemantauan aktif, PT. Salaki Mandiri Sejahtera, belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL dan hasil pemantauan RKL-RPL Tahun 2014. Laporan pelaksanaan RKL-RPL Periode II Juli – Desember 2014, belum mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan laporan pelaksanaan RKL dan RPL.

- **Pemantauan Aktif**

Pemantauan aktif dilakukan dilokasi kegiatan PT. Salaki Mandiri Sejahtera, di Distrik Bonggo, dan hasilnya disajikan dibawah ini:

a. Administrasi :

1. Dokumen AMDAL kegiatan IUPHHK PT. Salaki Mandiri Sejahtera telah mendapat SK Kelayakan Lingkungan dari Gubernur Papua dengan Nomor 183 Tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002.
2. Pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup PT. Salaki Mandiri Sejahtera tahun 2006-2013 tidak dibuat dan dilaporkan ke instansi lingkungan hidup Kabupaten maupun Provinsi Papua.

3. Pelaporan RKL-RPL periode II Juli – Desember 2014 belum mengacu pada KEPMENLH 45 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan RKL-RPL.

b. Program CSR :

1. Pihak Perusahaan telah memberikan bantuan Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dari kampung Biri II sejak tahun 2006.
2. Telah dibayar kompensasi hak ulayat kepada masyarakat suku Sagre periode kesatu Januari –Juni 2014 sebesar Rp. 650.049.025,-
3. Telah dilakukan Pembayaran kompensasi hak ulayat (suku Sagre) periode kedua Juli – Desember 2014 kepada pemilik hak ulayat pada RKT 2014 sebesar Rp. 1.120.751.625,-
4. Kopersasi hak ulayat yang telah dibayarkan oleh PT Salaki Mandiri Sejahtera sejak tahun 2004 s/d 2014 sebesar Rp. 10.647.525.832,-
5. Pembayaran honor ondoafi dan Pemerintah Distrik, Koramil, Polsek yang telah dimulai sejak 2006 sampai sekarang.
6. Bantuan BBM kepada pemerintah distrik Bonggo, Bonggo Barat dan distrik Sungai Biri.

c. Kegiatan Lapangan :

1. Penebangan kayu sudah di RKT 2015 pada km 74
2. Pembangunan jalan angkutan kayu (sarat) telah mencapai ± 76 km
3. Perlindungan terhadap sempadan sungai pada km 54 di sungai Boaf;

4. Rongsokan alat berat ditampung dan di kirim ke Biak;
5. Ban bekas dimanfaatkan untuk peletakan tempat sampah;
6. Oli bekas ditampung di drum dan digunakan untuk pelumas chansow;
7. Ceceran oli masih terlihat disekitar bengkel;
8. Sampah organik dikumpulkan di TPS dan dibakar disekitar basecamp;
9. Reboisasi telah dilakukan pada RKT 2014 km 76.
10. Para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat bekerja;
11. Penebangan dan pengkutan kayu jadi (saw timber) oleh masyarakat pemilik hak ulayat pada areal kerja PT. Salaki Mandiri Sejahtera tanpa izin pihak perusahaan;
12. Penebangan dan pengangkutan kayu jadi (saw timber) mendapat izin dari ondoafi.

d. Rekomendasi :

1. Pemrakarsa/pihak perusahaan segera menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup sejak Tahun 2011-2015 dengan mengacu pada Permen LH 45 tahun 2005;
2. Pemrakarsa perlu memperhatikan ceceran oli bekas disekitar bengkel dan peyimpanan pada TPS limbah B3 yang sebagaimana diatur PP No 18 Th 1999 jo PP No 85 Th 1999;
3. Pemrakarsa wajib mengevaluasi bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang dibiayai oleh oleh pihak PT. Salaki Mandiri Sejahtera;
4. Pemrakarsa wajib mensosialisasikan manfaat APD dan sanksi atas kelalaian penggunaan APD;

5. Pemrakarasa perlu berkoordinasi dengan pihak ondoafi (masyarakat pemilik hak ulayat) bersama pemerintah kabupaten Sarmi terkait dengan penebangan dan pengangkutan kayu jadi (saw timber) pada areal konsensi PT. Salaki Mandiri Sejahtera.

2. PT. Rimba Matoa Lestari di Bonggo Sarmi.

- **Pemantauan Pasif**

PT. Rimba Matoa Lestari telah melaporkan hasil pelaksanaan RKL dan RPL sebagai bentuk komitmen pihak perusahaan pada izin lingkungan, hal-hal yang menjadi dampak penting hipotetik (DPH) yang perlu dikelola dan dipantau secara bertahap dilakukan oleh pihak management PT. Rimba Matoa, dan laporannya telah mengacu pada KEPMENLH Nomor 45 Tahun 2005.

- **Pemantauan Aktif**

Hasil Pemantauan aktif yang dilakukan oleh Tim BPLH Provinsi Papua, tercantum dibawah ini:

1. Manajemen PT. Rimba Matoa Lestari wajib menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) baik padat maupun cair yang bersumber dari klinik, gudang pupuk dan *workshop* ;
2. Seluruh limbah B3 yang dihasilkan disimpan di TPS limbah B3 disertai *logbook* limbah;
3. Tempat penyimpanan/tangki BBM (solar) wajib dilengkapi dengan papan nama, tanggul pengaman volume 110% dari kapasitas tangki dan titik koordinat ;
4. Gudang penyimpanan pupuk, herbisida dan pestisida, dilengkapi papan nama dan titik koordinat;

5. Lantai bengkel/workshop wajib kedap air/minyak, dilengkapi dengan *oil catcher* dan memasang titik koordinat;
 6. Manajemen PT. Rimba Matoa Lestari segera mengirimkan laporan pelaksanaan RKL – RPL semester II Tahun 2014;
 7. Program CSR atau pemberdayaan masyarakat secara khusus di bidang ekonomi sebaiknya tidak hanya memberikan insentif pemilik hak ulayat tetapi pengembangan potensi masyarakat melalui pelatihan pengembangan ekonomi kerakyatan ;
 8. Manajemen PT. Rimba Matoa Lestari wajib membuat Peta Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau peta lokasi *sampling*;
 9. Pengawasan terhadap pemanfaatan limbah oli bekas wajib diawasi oleh manajemen perusahaan secara ketat dengan memperhatikan Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
 10. *Landclearing* yang dilakukan perusahaan pada RKT 2015 dan RKT selanjutnya wajib melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat. Selain itu, perusahaan wajib memperhatikan dan melindungi tempat – tempat sakral, tempat mata pencaharian masyarakat dan tempat perlindungan setempat termasuk dusun sagu.
3. PT. Pusaka Agro Lestari di Kabupaten Mimika
- **Pemantauan Pasif**

Berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh pihak pemrakarsa, maka sistim pelaporan telah mengikuti Permenlh 45 Tahun 2005, hanya saja untuk beberapa komponen

lingkungan yang termasuk dalam DPH masih perlu mendapat perhatian untuk dipantau seperti air dan udara.

- **Pemantauan Aktif**

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana DPH yang disepakati pada dokumen RKL dan RPL.

- a. **Administrasi :**

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan dilapangan terkait dengan perizinan lingkungan ada terjadi penghentian sementara yang diakibatkan oleh pemerintah kabupaten Mimika yang belum mendapat penjelasan terkait dengan perizinan lingkungan dan ijin usaha. Namun keadaan ini sudah diselesaikan ditingkat manajemen dengan pemerintah Kabupaten Mimika.

- b. **Pelaksanaan CSR antara lain :**

1. Pembangunan sarana pendidikan sebanyak 1 unit untuk 3 (tiga) kelas.
2. Guru-guru didatangkan dan digaji oleh PT. PAL

- c. **Rekomendasi**

1. Segera membangun pabrik untuk mengelola buah yang akan dipanen
2. Melakukan pemantauan kualitas air dan udara sesuai titik pemantauan yang termuat dalam dokumen lingkungan sebagai bentuk ketaatan pemrakarsa.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian kawasan konservasi untuk menjaga jenis-jenis flora fauna yang dilindungi pada sekitar kawasan konservasi dan mendukung keberlanjutan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan konservasi.

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja dan pembangunan fasilitas pendidikan dari 3 (tiga) kelas menjadi 6 (enam) kelas.

4. PT. Berkat Cipta Abadi di Kabupaten Merauke

- **Pemantauan Pasif**

Pelaporan pelaksanaan RKL-RPL oleh PT. Berkat Cipta Abadi belum dilakukan sebagaimana komitmen/ janji pihak perusahaan.

- **Pemantauan Aktif**

Hasil pemantauan aktif yang dilakukan oleh Tim BPLH Provinsi Papua sebagaimana dibawah:

1. PT. BCA tetap berpedoman pada dok. ANDAL, RKL dan RPL yang telah mendapat kelayakan lingkungan untuk pengelolaan lingkungan.
2. PT. BCA segera membentuk departemen lingkungan hidup.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan RKL dan RPL secara periodik kepada BPLH Provinsi Papua.

5. PT. Semarak Dharma Timber di Kabupaten Keerom

- **Pemantauan Pasif**

Pelaporan pelaksanaan RKL dan RPL PT. Semarak Dharma Timber belum dilakukan karena masih pada tahap konstruksi, sementara Industri dari PT. Semarak Dharma Timber yang sedang beroperasi, dan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL Tahap II Juli – Desember 2014 dan tahap I Januari – Juni 2015 telah disampaikan kepada BLH Kabupaten Keerom dan ditembuskan pada BPLH Provinsi Papua. Pelaporan pelaksanaan UKL-UPL telah mengikuti Pedoman Kepmenlh 45 Tahun 2005.

- **Pemantauan Aktif**

1. Limbah Domestik dan potongan-potongan kayu perlu ditampung pada TPS;
2. Karyawan wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) pada saat bekerja;
3. Pembakaran sisa potongan kayu tidak diletakan dengan arah angin sebab mengganggu karyawan yang bekerja pada pabrik pengolahan kayu;
4. Sisa oli bekas perlu ditampung dan disimpan pada tempat yang aman dan disesuaikan dengan pada TPS limbah B3 yang sebagaimana diatur PP No 18 Th 1999 jo PP No 85 Th 1999;

Outcome Kegiatan

1. Tingkat ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh kelima perusahaan yang dipantau, lima diantaranya belum menunjukkan perbaikan lingkungan sebagaimana termuat pada dokumen ANDAL, RKL dan RPL.
2. Masih rendahnya efektifitas pelaksanaan RKL dan RPL sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan.
3. Pemahaman terhadap regulasi/peraturan perundang-undangan masih masih perlu ditingkatkan dan disikronisasikan dengan perkembangan perubahan regulasi.

Anggaran kegiatan sebesar Rp.299.750.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 63,77 % dan realisasi keuangan 63,63%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 190.727.200,-(seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus rupiah). Dengan bobot 13,66%.

4. Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Meningkatnya berbagai aktivitas ekonomi seperti transportasi dan industri telah mengakibatkan pencemaran di udara. Kualitas udara perkotaan di Indonesia telah menunjukkan kecenderungan menurun dalam dua dekade ini. Hal ini terjadi karena sumber pencemar telah melampaui daya dukung lingkungan sehingga tidak dapat dinetralkan secara alami. Pencemaran udara ini memiliki dampak yang cukup signifikan pada gangguan kesehatan manusia, ekosistem, perubahan iklim dan pemanasan global.

Risiko kesehatan yang dikaitkan dengan pencemaran udara di perkotaan secara umum, banyak menarik perhatian dalam beberapa dekade belakangan ini. Parameter utama pencemaran udara yang memiliki dampak signifikan pada kesehatan adalah Kandungan Karbon Monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Dioksida (NO₂), dan Partikulat. Partikulat yang terdapat pada atmosfer umumnya berukuran hingga 50 µm, yang bervariasi waktu eksistensinya bergantung pada besar kecilnya ukuran. Partikulat udara yang berukuran kurang dari 2,5 µm (PM_{2,5}), disebut dengan partikulat halus, sangat berbahaya karena dapat berpenetrasi menembus bagian terdalam dari paru-paru dan jantung, menyebabkan gangguan kesehatan di antaranya infeksi saluran pernafasan akut, kanker paru-paru, penyakit kardiovaskular bahkan kematian. Partikulat halus diperkirakan memberi kontribusi besar pada angka kematian yang diakibatkan oleh gangguan kesehatan terkait pencemaran udara.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengendalian pencemaran udara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, dilakukan sesuai dengan norma, standard, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran udara, melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua pada tahun 2015 melakukan pemantauan kualitas udara ambient yaitu kualitas udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di wilayah Papua yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Pemantauan Udara ambien dilaksanakan di 7 (tujuh) Kabupaten /Kota tepatnya di Sentani Kabupaten Jayapura, Biak di Kabupaten Biak Numfor, Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Timika di Kabupaten Mimika, Merauke di Kab Merauke, Nabire di Kabupaten Nabire dan Jayapura di Kota Jayapura dimana lokus dari titik pemantauan meliputi lokasi pemukiman atau, pusat perdagangan/ perindustrian, road side/lalulintas.

Kegiatan pemantauan udara ambien memiliki arti penting untuk mengetahui kualitas udara sebagai kebutuhan bagi semua makhluk hidup dan sebagai informasi bagi masyarakat luas tentang kualitas udara yang ada dilingkungannya.

Output Kegiatan

Tersedianya Data dan informasi bagi masyarakat luas tentang kualitas udara yang ada dilingkungannya dan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan 7 (tujuh) Kabupaten /Kota tepatnya di Sentani Kabupaten Jayapura, Biak di Kabupaten Biak Numfor, Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Timika di Kabupaten Mimika, Merauke di Kab Merauke, Nabire di Kabupaten Nabire dan Jayapura di Kota Jayapura dimana lokus dari titik pemantauan meliputi lokasi pemukiman atau, pusat perdagangan/perindustrian, road side/lalulintas sebagai berikut:

1. Kabupaten Jayapura

Untuk mewakili lokasi daerah industri, lokasi sekitar PLTD Sentani PT. PLN Persero, mewakili daerah perdagangan, pusat pertokoan dipilih lokasi Sentani City Square, sedangkan lokasi yang mewakili pemukiman, perkantoran dan sekolah dipilih Lokasi kantor Bupati Kabupaten Jayapura.

a) Lokasi PT. PLN Persero (PLTD Sentani)

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	25
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	<3313
3.	Nitogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	34
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	39
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	86
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	<6,53

No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	32,9
2.	Kelembaban	%	59,7
3.	Kecepatan angin	m/s	0,1-0,5
4.	Arah angin		Timur
5.	Cuaca	-	Berawan
6.	Tekanan Udara	mmHg	752
7.	Koordinat	E: 140 ⁰ 30'40,59" S: 02 ⁰ 34'03,06"	

b) Sentani City Square (Borobudur)

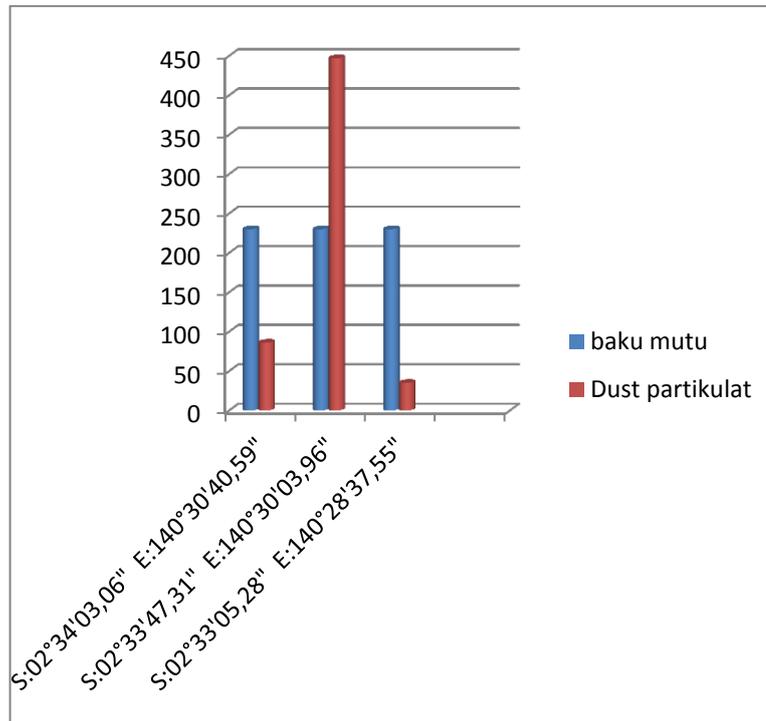
No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	22
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	<10020
3.	Nitogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	34
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	27
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	447
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	89,7

No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	30,8
2.	Kelembaban	%	64,7
3.	Kecepatan angin	m/s	0,4-0,7
4.	Arah angin		Timur
5.	Cuaca	-	Berawan
6.	Tekanan Udara	mmHg	753
7.	Koordinat	E: 140 ⁰ 30'03,96"	
		S: 02 ⁰ 33'47,31"	

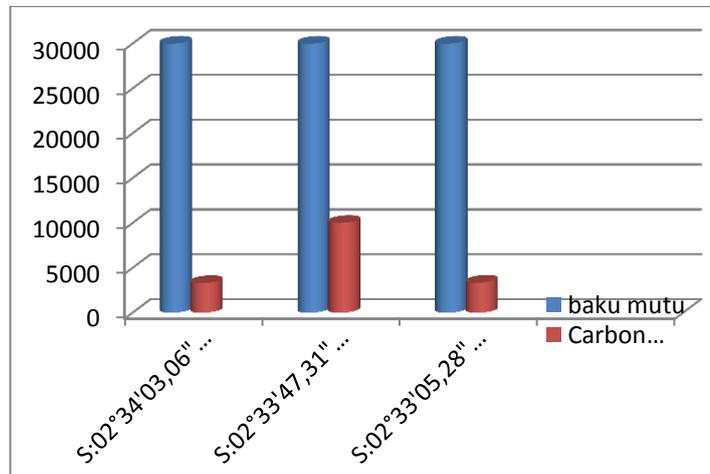
c) Kantor Bupati Sentani

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	21
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	<3352
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	29
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	19
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	35
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	59,7

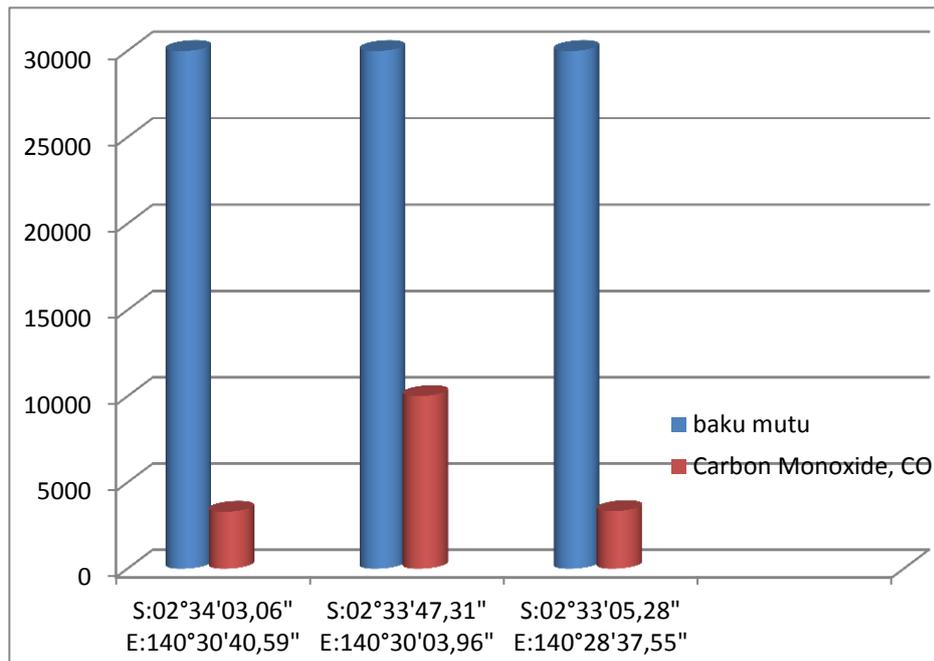
No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	29,1
2.	Kelembaban	%	76,2
3.	Kecepatan angin	m/s	0,1-0,6
4.	Arah angin		Timur
5.	Cuaca	-	Berawan
6.	Tekanan Udara	mmHg	752
7.	Koordinat	E: 140 ⁰ 28'37,55"	
		S: 02 ⁰ 33'05,28"	



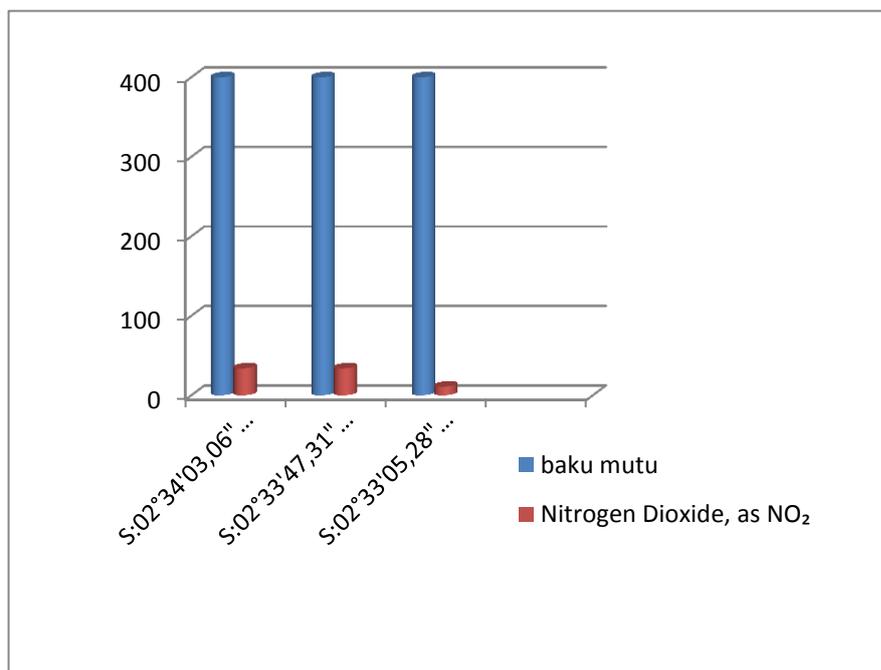
Gambar 1: Kandungan Dust, Partikulat daerah Sentani



Gambar 2: Kandungan Sulfur Dioxide, SO₂ Daerah Sentani



Gambar 3: Kandungan Carbon Monoxide, CO Daerah Sentani



Gambar 4: Kandungan Nitrogen Dioxide, as NO₂ daerah Sentani

2. Kabupaten Jayawijaya

Untuk mewakili lokasi daerah industri, lokasi sekitar PLTD Sinakma PT. PLN Persero, mewakili daerah perdagangan, pusat pertokoan dipilih lokasi depan hotel Ranu Jaya I, sedangkan lokasi yang mewakili pemukiman, perkantoran dan sekolah dipilih Lokasi kantor Bupati Jayawijaya.

a) Lokasi Depan Hotel Ranu Jaya I

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	28
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	4568
3.	Nitogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	62
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	27
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	33
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	NonMethane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	74,6

No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	33,1
2.	Kelembaban	%	31,6
3.	Kecepatan angin	m/s	0,0-1,5
4.	Arah angin		Barat
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	623
7.	Koordinat	E: 138 ⁰ 56'40,63"	
		S: 04 ⁰ 05'21,76"	

b) Lokasi PLTD Sinakma Wamena

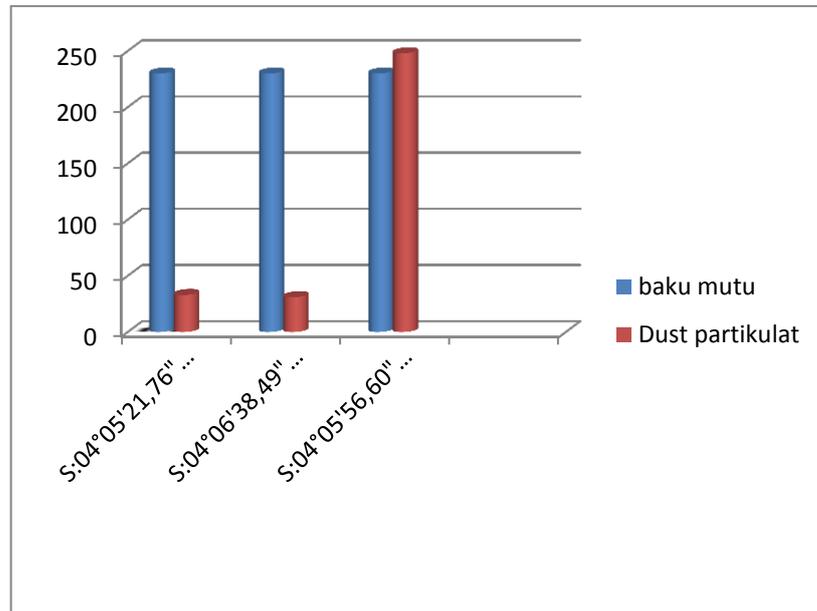
No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	21
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	2802
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	42
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	20
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	31
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	<69,8

No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	27,3
2.	Kelembaban	%	54,2
3.	Kecepatan angin	m/s	0,0-0,9
4.	Arah angin		Selatan
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	625
7.	Koordinat	E: 138 ⁰ 53'38,26"	
		S: 04 ⁰ 06'38,49"	

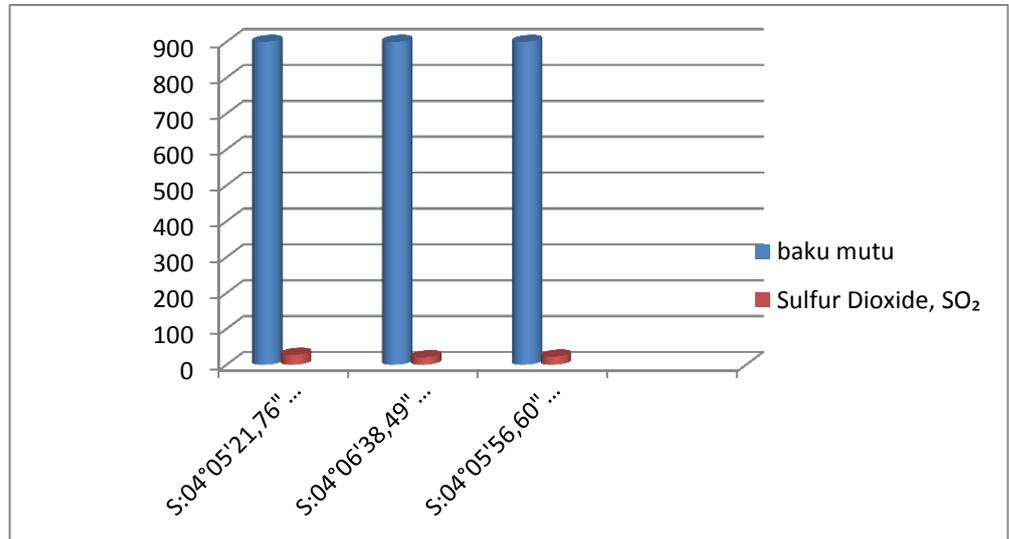
c) Depan Kantor Bupati Jayawijaya

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	23
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	2756
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	68
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	44
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	248
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	76,9

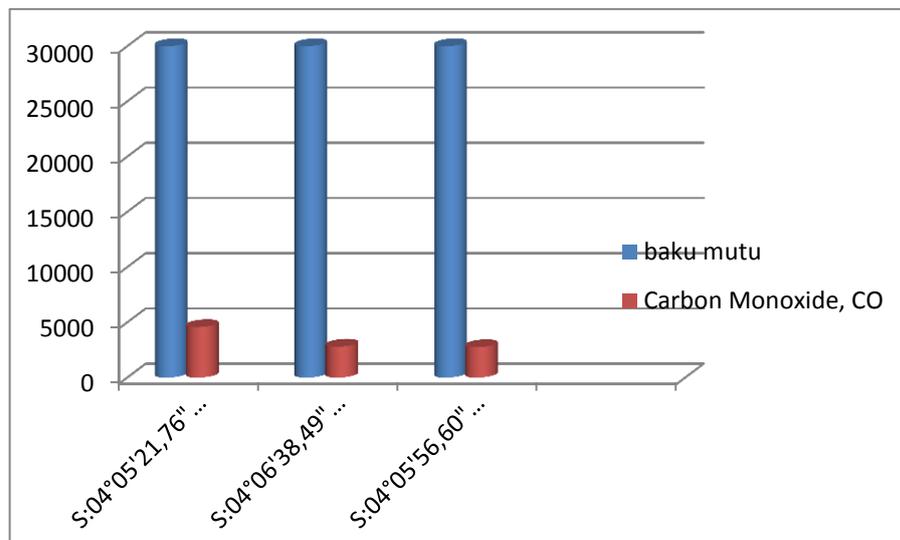
No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	32,8
2.	Kelembaban	%	41,4
3.	Kecepatan angin	m/s	0,2-3,7
4.	Arah angin		Timur
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	626
7.	Koordinat	E: 138 ⁰ 56'34,61"	
		S: 04 ⁰ 05'56,60"	



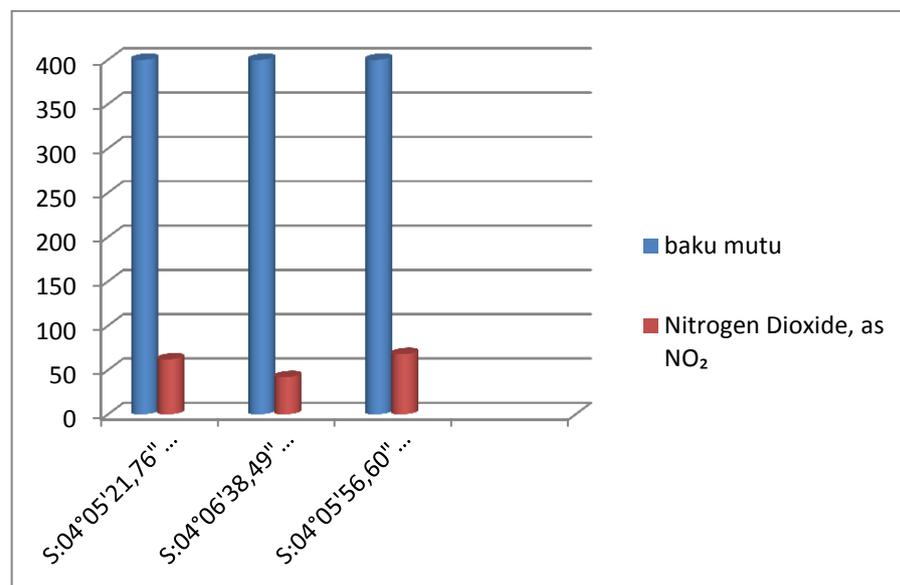
Gambar 5: Kandungan Dust, Partikulat daerah Wamena



Gambar 6: Kandungan Sulfur Dioxide, SO₂ daerah Wamena



Gambar 7: Kandungan Carbon Monoxide, CO



Gambar 8: Kandungan Nitrogen Dioxide, as NO₂ daerah Wamena

3. Kabupaten Biak Numfor

Untuk mewakili lokasi daerah industri, lokasi sekitar industry plywood Wapoga Mutiara industro, mewakili daerah perdagangan, pusat pertokoan dipilih lokasi depan hotel Manna di jalan Ahmad yani, , sedangkan lokasi yang meakili pemukiman, perkantoran dan sekolah dipilih Lokasi kantor Lurah Waupnor Biak Kota

a) Lokasi PT. Wapoga Mutiara Industri

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	900/1H	3318
2.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	30000/1H	33
3.	Nitogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	28
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	54
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	39
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	74,9

No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	33,6
2.	Kelembaban	%	61,3
3.	Kecepatan angin	m/s	0,0-2,4
4.	Arah angin		Selatan
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	755
7.	Koordinat	E: 136°01'47,34" S: 01°08'36,52"	

b) Lokasi Kantor Kelurahan Waupnor

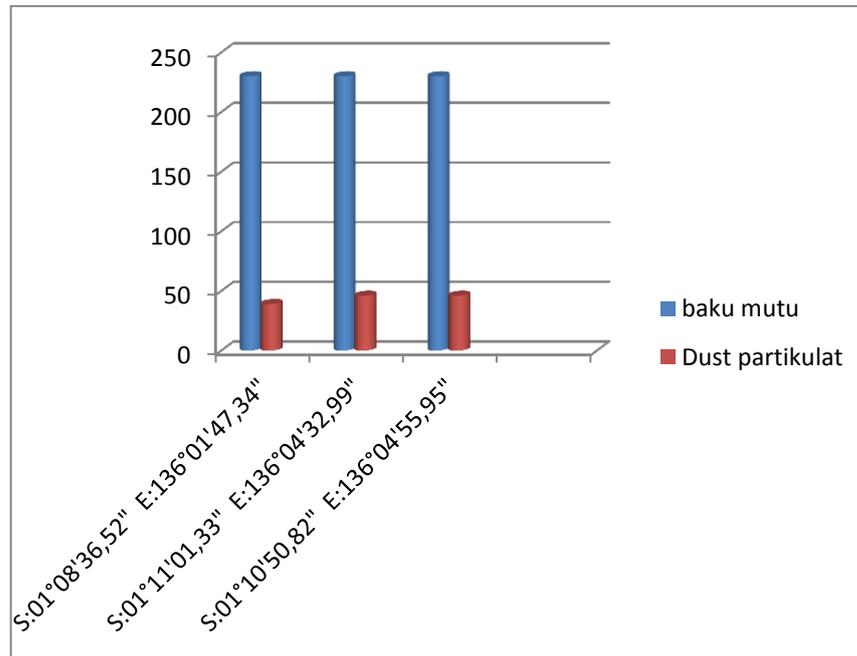
No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	21
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	3307
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	46
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	32
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	46
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	65,7

No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	34,2
2.	Kelembaban	%	49,3
3.	Kecepatan angin	m/s	0,0-1,9
4.	Arah angin		Barat
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	754
7.	Koordinat	E: 136 ⁰ 04'32,99"	
		S: 01 ⁰ 11'01,33"	

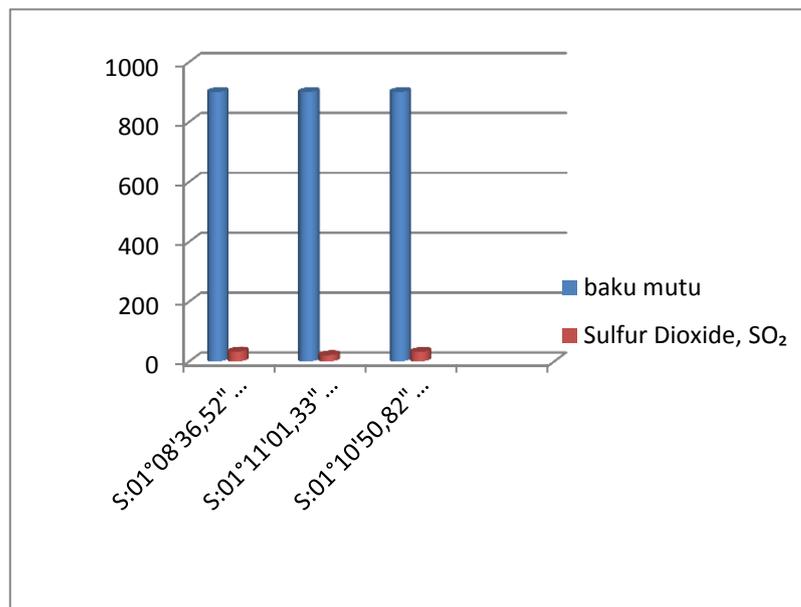
c) Depan Hotel Manna

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	32
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	3323
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	47
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	28
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	46
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	74,6

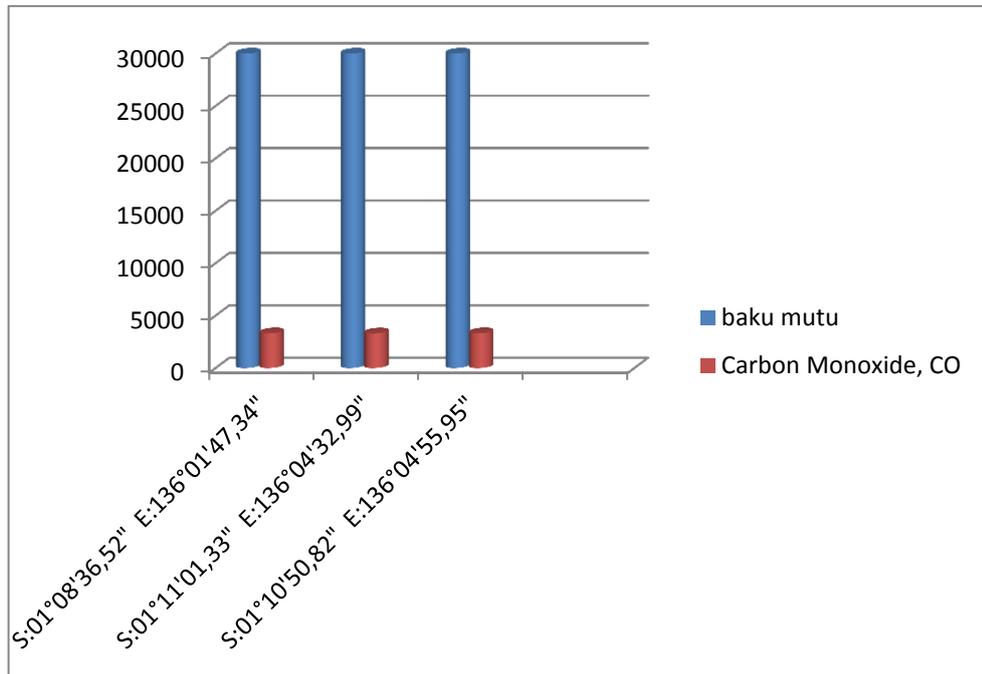
No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	32,7
2.	Kelembaban	%	66,0
3.	Kecepatan angin	m/s	0,0-1,4
4.	Arah angin		Selatan
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	754
7.	Koordinat	E: 136 ⁰ 04'55,95" S: 01 ⁰ 10'50,82"	



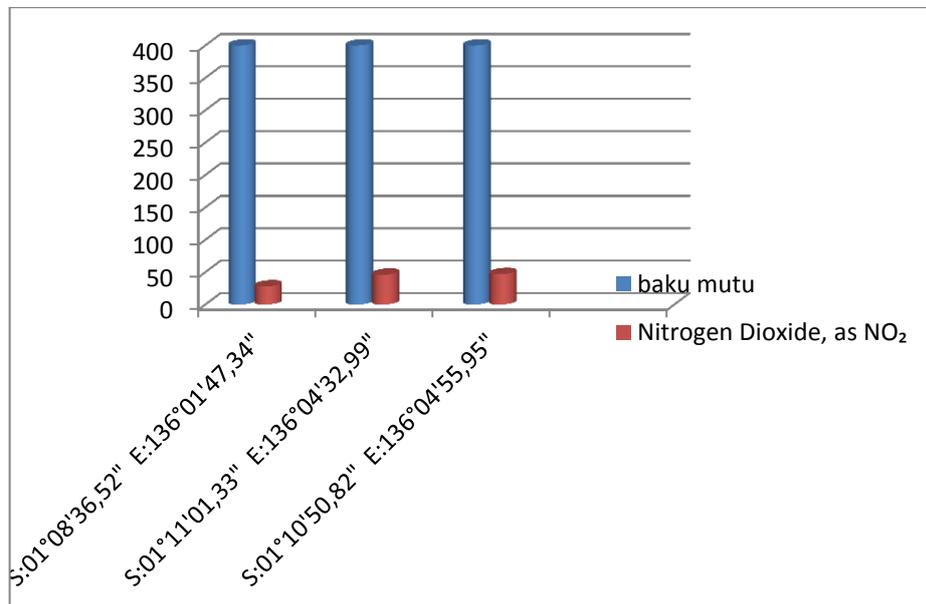
Gambar 9: Kandungan Dust, Partikulat daerah Biak



Gambar 10: Kandungan Sulfur Dioxide, SO₂ Daerah Biak



Gambar 11: Kandungan Carbon Monoxide, CO daerah Biak



Gambar 12: Kandungan Nitrogen Dioxide, as NO₂ daerah Biak

4. Kota Jayapura

Untuk mewakili lokasi daerah industri, lokasi sekitar PLTD Waena PT. PLN Persero, mewakili daerah perdagangan, pusat pertokoan dan lokasi pendidikan dipilih lokasi Kampus YAPIS Jayapura, sedangkan lokasi yang mewakili pemukiman, dipilih Lokasi perumahan ASPOL di daerah Deplat kiri

a) Lokasi PLTD Waena

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	15
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	2192
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	59
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	33
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	26
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	65,8

No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	33,6
2.	Kelembaban	%	55,7
3.	Kecepatan angin	m/s	0,0-1,0
4.	Arah angin		Selatan
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	748
7.	Koordinat	E: 140 ⁰ 38'30,90"	
		S: 02 ⁰ 35'19,07"	

b) Depan Universitas YAPIS Jayapura

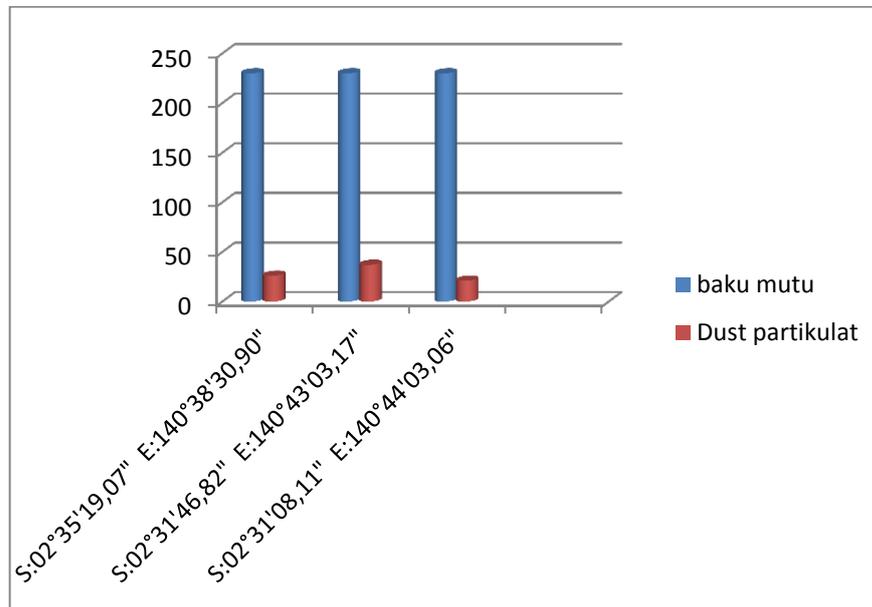
No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	17
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	3322
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	35
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	32
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	37
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	68,9

No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	32,5
2.	Kelembaban	%	60,9
3.	Kecepatan angin	m/s	0,0-2,4
4.	Arah angin		Timur
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	753
7.	Koordinat	E: 140 ⁰ 43'03,17"	
		S: 02 ⁰ 31'46,82"	

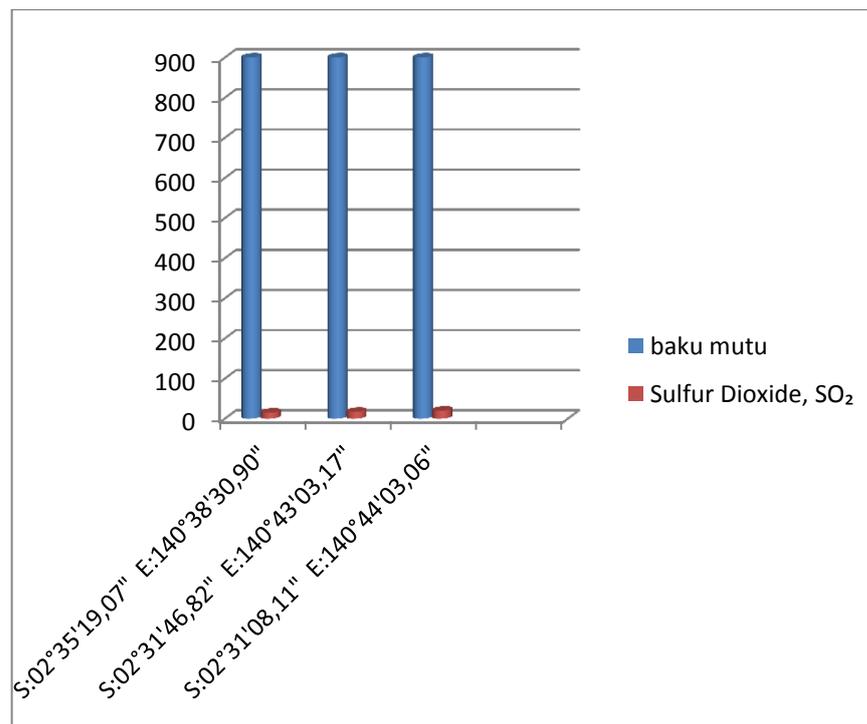
c) Kiri (ASPOL)

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	20
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	4434
3.	Nitogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	47
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	19
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	21
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	77,5

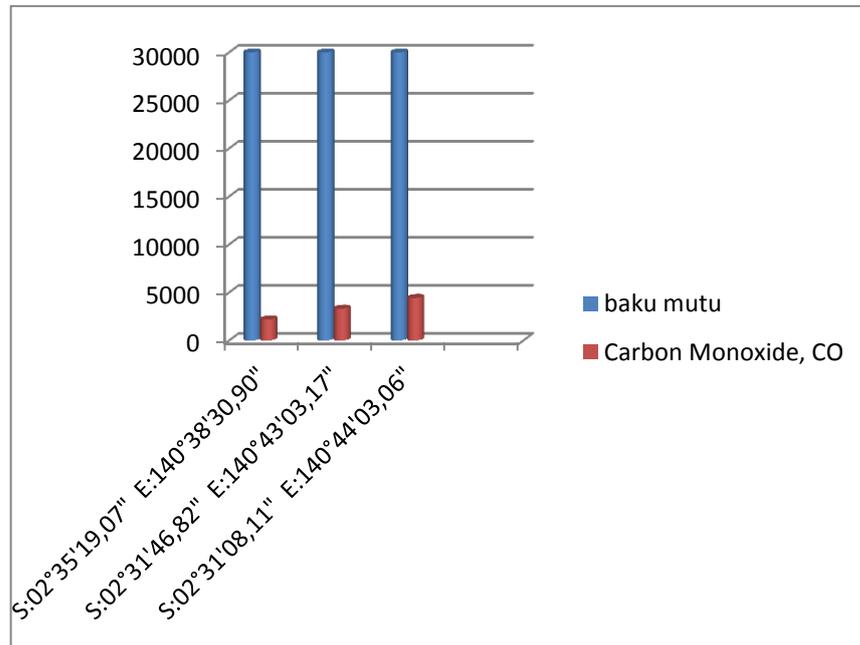
No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	32,7
2.	Kelembaban	%	62,3
3.	Kecepatan angin	m/s	0,0-1,2
4.	Arah angin		Selatan
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	755
7.	Koordinat	E: 140 ⁰ 49'03,06" S: 02 ⁰ 31'08,11"	



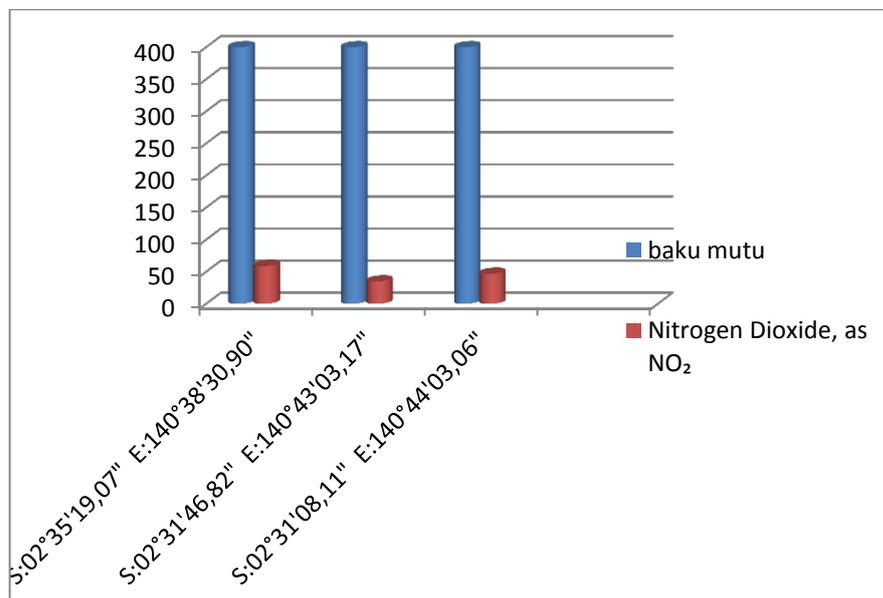
Gambar 13: Kandungan Dust, Partikulat daerah Jayapura



Gambar 14: Kandungan Sulfur Dioxide, SO₂ daerah Jayapura



Gambar 15: Kandungan Carbon Monoxide, CO daerah Jayapura



Gambar 16: Kandungan Nitrogen Dioxide, as NO₂ daerah Jayapura

5. Kabupaten Merauke

Untuk mewakili lokasi daerah industri, lokasi sekitar PLTD Kelapa Lima Merauke, mewakili daerah perdagangan, pusat pertokoan dipilih lokasi Depan Ruko sentosa, sedangkan lokasi yang mewakili pemukiman dan lokasi pendidikan, dipilih Lokasi SMP Negeri I.

a) Lokasi PLTD Kelapa Lima

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	27
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	3287
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	53
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	47
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	50
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	74,3

No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	38,5
2.	Kelembaban	%	52,0
3.	Kecepatan angin	m/s	0,9-2,5
4.	Arah angin		Utara
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	760
7.	Koordinat	E: 140 ⁰ 24'33,32" S: 08 ⁰ 30'08,73"	

b) Depan Ruko Sentosa

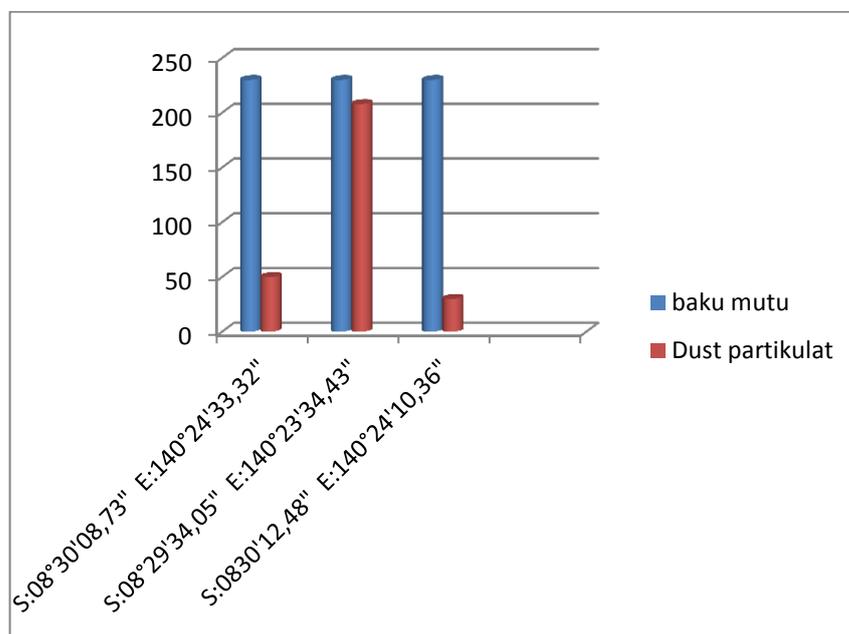
No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	14
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	14294
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	32
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	35
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	208
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	98,5

No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	37,6
2.	Kelembaban	%	54,6
3.	Kecepatan angin	m/s	1,7-3,6
4.	Arah angin		Utara
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	761
7.	Koordinat	E: 140 ⁰ 23'34,43"	
		S: 08 ⁰ 29'34,05"	

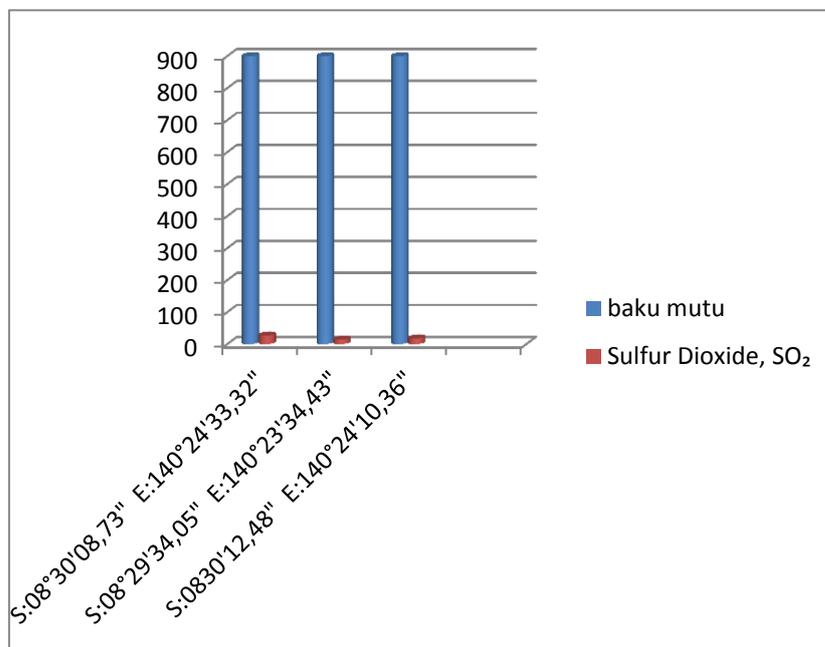
c) SMPN I Merauke

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	18
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	2212
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	36
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	42
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	30
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	62,3

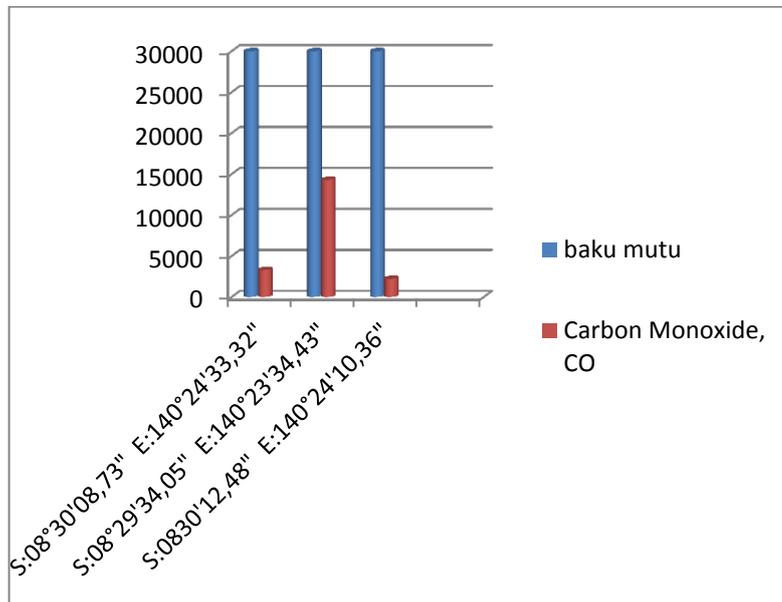
No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	35,3
2.	Kelembaban	%	58,7
3.	Kecepatan angin	m/s	2,7-4,3
4.	Arah angin		Utara
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	759
7.	Koordinat	E: 140 ⁰ 24'10,36'' S: 08 ⁰ 30'12,48''	



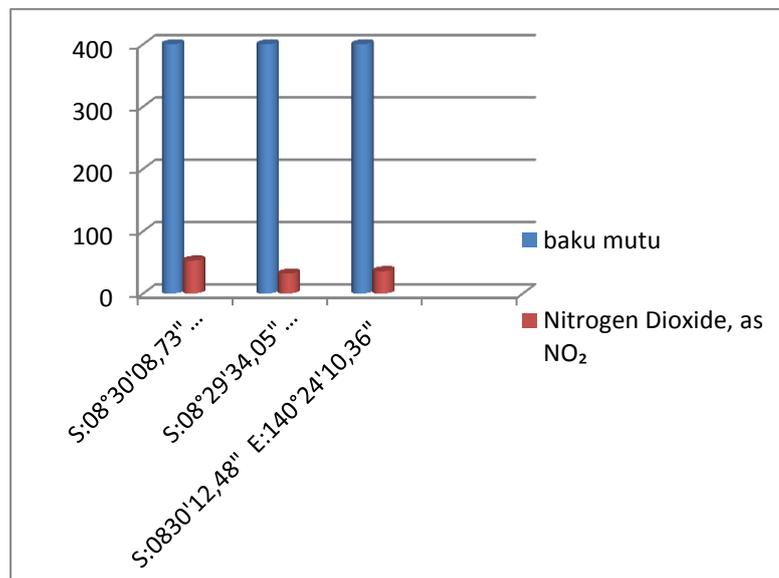
Gambar 13: Kandungan Dust, Partikulat daerah Merauke



Gambar 14: Kandungan Sulfur Dioxide, SO₂ daerah Merauke



Gambar 15: Kandungan Carbon Monoxide, CO daerah Merauke



Gambar 16: Kandungan Nitrogen Dioxide, as NO₂ daerah Merauke

6. Kabupaten Mimika

Untuk mewakili lokasi daerah industri, lokasi sekitar PT. PLN Rayon Timika, mewakili daerah perdagangan, pusat pertokoan dan lokasi pendidikan dipilih lokasi Depan Gedung Emeneme Jaware, sedangkan lokasi yang mewakili pemukiman, dipilih Lokasi RS Mitra Masyarakat Timika.

a) Lokasi PT. PLN Rayon Timika

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	22
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	3398
3.	Nitogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	40
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	23
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	37
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	71,8

No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	28,3
2.	Kelembaban	%	75,5
3.	Kecepatan angin	m/s	0,2-1,3
4.	Arah angin		Timur
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	760
7.	Koordinat	E: 136 ⁰ 53'37,73"	
		S: 04 ⁰ 33'14,91"	

b) Depan Gedung Emeneme Jaware

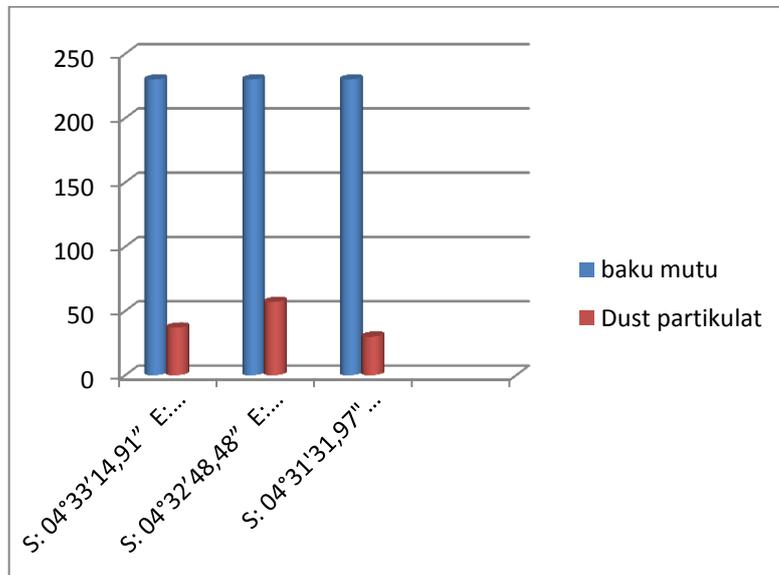
No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	21
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	6507
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	40
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	11
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	57
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	72,4

No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	40,6
2.	Kelembaban	%	42,9
3.	Kecepatan angin	m/s	1,5-1,9
4.	Arah angin		Utara
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	757
7.	Koordinat	E: 136 ⁰ 52'59,11'' S: 04 ⁰ 32'48,48''	

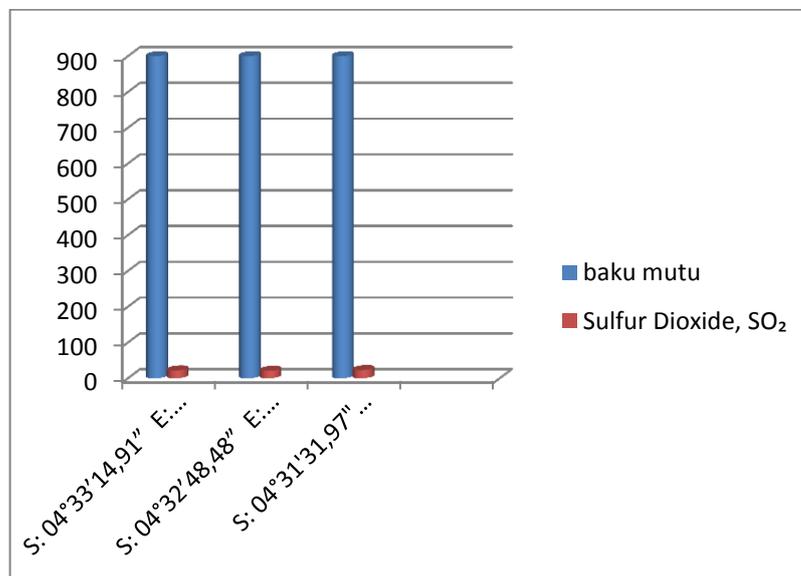
c) RS Mitra Masyarakat Timika

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	23
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	2156
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	38
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	28
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	30
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	61,7

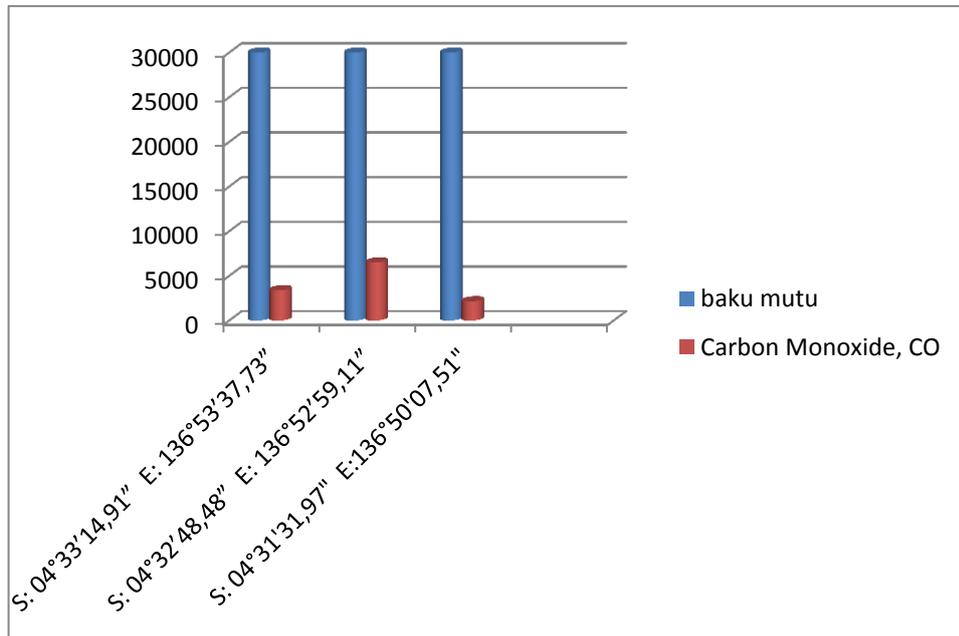
No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	43,3
2.	Kelembaban	%	42,1
3.	Kecepatan angin	m/s	0,2-1,2
4.	Arah angin		Utara
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	760
7.	Koordinat	E: 136 ⁰ 50'07,51"	
		S: 04 ⁰ 31'31,97"	



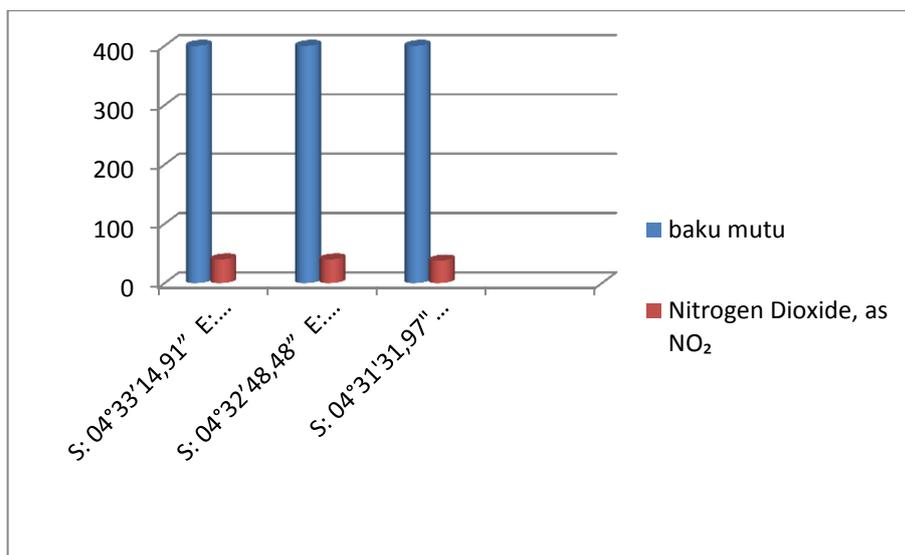
Gambar 13: Kandungan Dust, Partikulat daerah Timika



Gambar 14: Kandungan Sulfur Dioxide, SO₂ daerah Timika



Gambar 15: Kandungan Carbon Monoxide, CO daerah Timika



Gambar 16: Kandungan Nitrogen Dioxide, as NO₂ daerah Timika

7. Kabupaten Nabire

Untuk mewakili lokasi daerah industri, lokasi Depan Bengkel Nabire, mewakili daerah perdagangan, pusat pertokoan dan lokasi pendidikan dipilih lokasi RSUD Nabire, sedangkan lokasi yang mewakili pemukiman dan Perkantoran, dipilih Lokasi Kantor BLH Nabire.

a) Lokasi Depan Bengkel Nabire

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	20
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	6519
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	95
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	42
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	125
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	73,9

No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	39,8
2.	Kelembaban	%	47,2
3.	Kecepatan angin	m/s	0,0-0,7
4.	Arah angin		Selatan
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	757
7.	Koordinat	E: 135°30'13,29" S: 03°23'08,43"	

b) RSUD Nabire

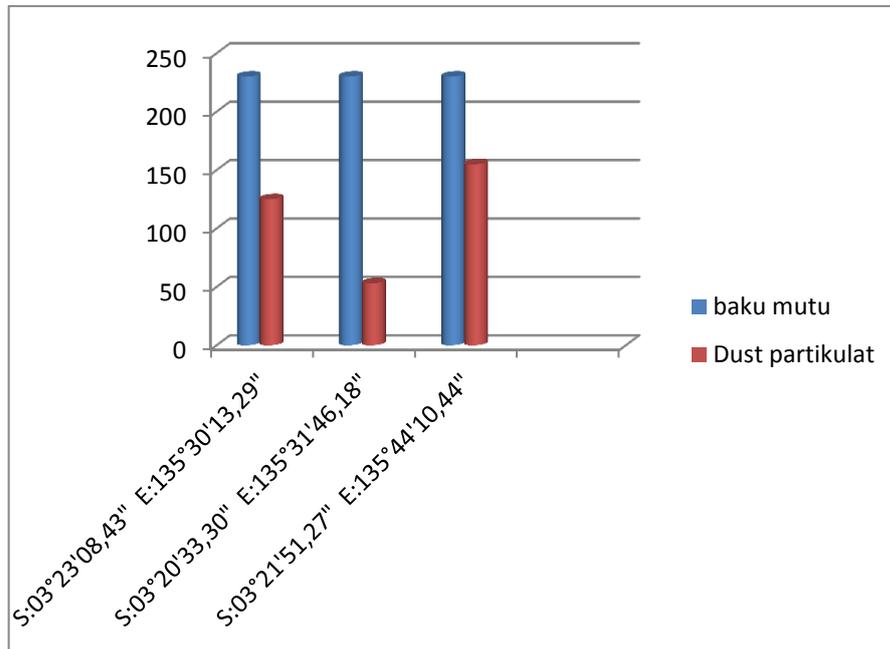
No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	19
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	2213
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	61
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	32
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	53
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	62,1

No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	35,3
2.	Kelembaban	%	56,7
3.	Kecepatan angin	m/s	0,0-0,7
4.	Arah angin		Barat
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	760
7.	Koordinat	E: 135 ⁰ 31'46,18"	
		S: 03 ⁰ 20'33,30"	

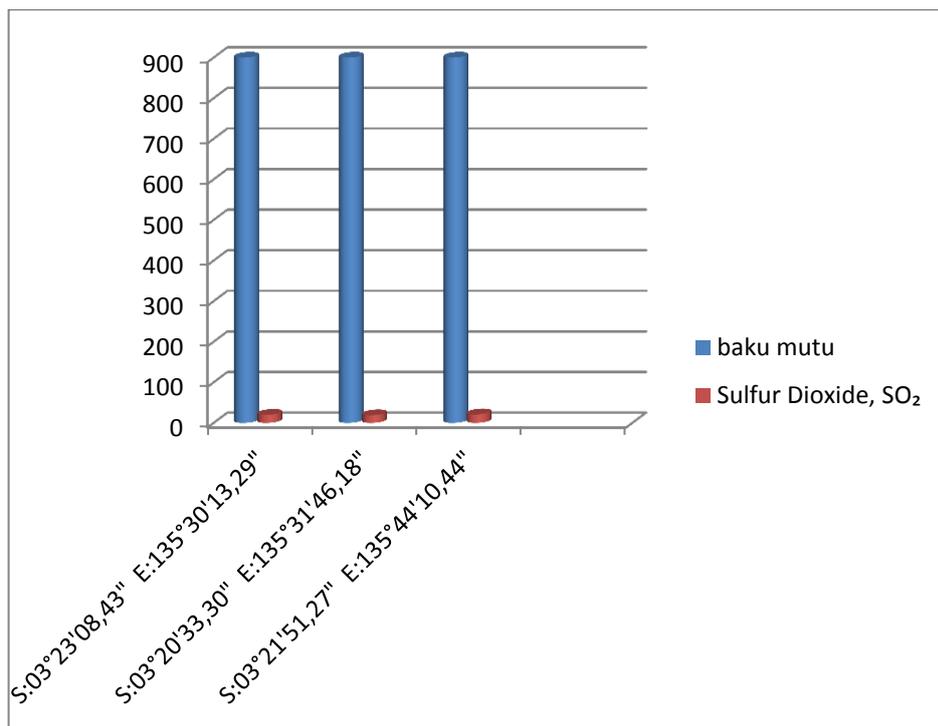
c) Kantor BLH Nabire

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil
1.	Sulfur Dioxide, SO ₂	ug/Nm ³	900/1H	21
2.	Carbon Monoxide, CO	ug/Nm ³	30000/1H	3326
3.	Nitrogen Dioxide, NO ₂	ug/Nm ³	400/1H	56
4.	Oxidant, O ₃	ug/Nm ³	235/1H	25
5.	Dust Particulate	ug/Nm ³	150/24H	155
6.	Lead, Pb	ug/Nm ³	2/24H	<0,1
7.	Non Methane Hydrocarbon, NMHC	ug/Nm ³	160/3H	65,3

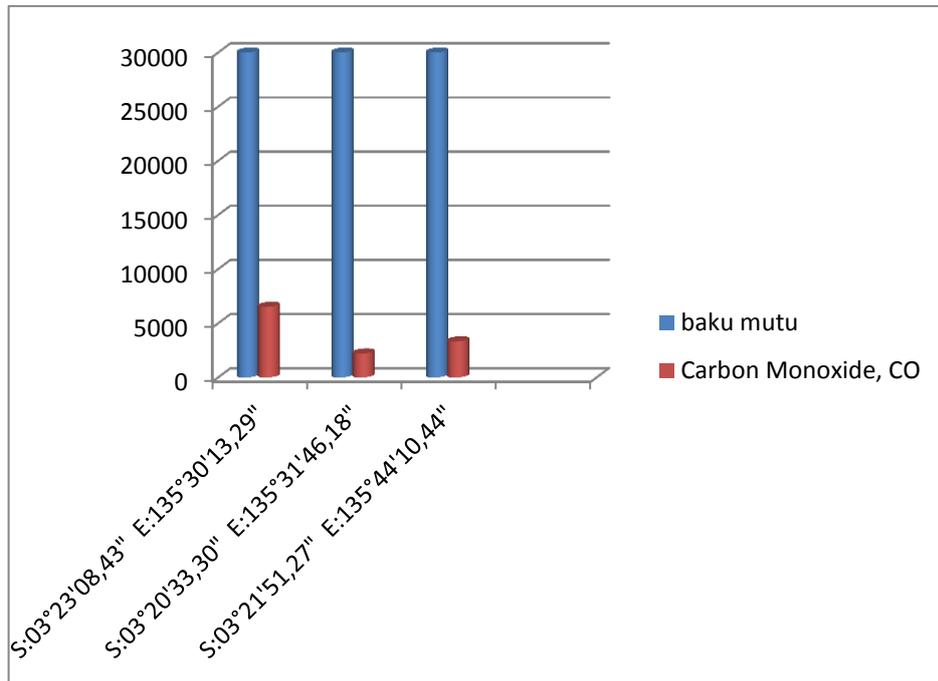
No.	Kondisi Udara Ambien	Satuan	Hasil
1.	Temperatur	°C	34,5
2.	Kelembaban	%	63,3
3.	Kecepatan angin	m/s	0,0-1,0
4.	Arah angin		Selatan
5.	Cuaca	-	Cerah
6.	Tekanan Udara	mmHg	759
7.	Koordinat	E: 135 ⁰ 30'10,44"	
		S: 03 ⁰ 21'51,27"	



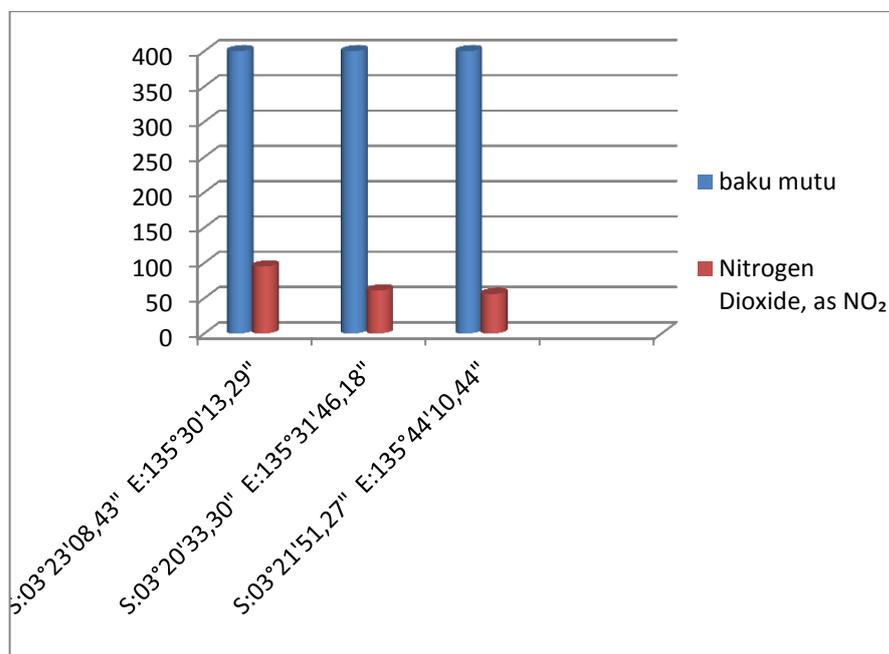
Gambar 13: Kandungan Dust, Partikulat daerah Nabire



Gambar 14: Kandungan Sulfur Dioxide, SO₂ daerah Nabire



Gambar 15: Kandungan Carbon Monoxide, CO daerah Nabire



Gambar 16: Kandungan Nitrogen Dioxide, as NO₂ daerah Nabire

Outcome Kegiatan

Dengan adanya informasi tentang kualitas udara, langkah pengendalian pencemaran udara akan dapat dilakukan sehingga masyarakat dapat menikmati udara yang sehat dan bersih.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 560.100.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 96,39%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 539.893.900,- (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus rupiah). Dengan bobot 3,97%.

5. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat Sadar Hukum Lingkungan

Peraturan perundang-undang pada bidang lingkungan terus berkembang dari waktu-ke waktu seiring dengan permasalahan dan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi penopang hidup manusia.

Masyarakat Adat merupakan salah satu komunitas tujuan mendaratnya peraturan-perundang-undangan lingkungan sebagai protek terhadap penjagaan lingkungan hidup. Di Papua wilayah adat menjadi lima wilayah adat antara lain Meepago, Lapago, Mamta, Aanim, dan Saireri. Pada tataran adat terdapat berbagai aturan adat yang diberlakukan untuk mengkonservasi wilayah adatnya, sementara aturan positif sedang berkembang dari waktu ke waktu sebagai wasit dalam menjaga lingkungan. pada tataran ini keduanya harus dapat dilakukan seiring untuk menjawab pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat adat sendiri memiliki kapasitas atas tanahnya, sehingga perlu diisi dengan aturan positif untuk menjaga SDA yang berada pada wilayah adatnya.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat Sadar Hukum Lingkungan adalah:

- Terbentuknya 1 (satu) kelompok Pemberdayaan Masyarakat Adat Sadar Hukum di Kabupaten Paniai.

Outcome Kegiatan

Lingkungan terjaga oleh Masyarakat Adat.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 153.759.350,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 60,98% dan realisasi keuangan 56,10%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 86.259.350,- (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). Dengan bobot 7,01%.

6. Kegiatan Pengawasan Lingkungan

Peningkatan dunia usaha/kegiatan di Provinsi Papua mempengaruhi perkembangan pembangunan diberbagai sektor. Pengaruh ini dapat menimbulkan dampak positif yaitu peningkatan pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja, penyerapan teknologi, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain dampak positif, dampak negatif meningkatnya dunia usaha/kegiatan juga dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan seperti limbah hasil proses industri yang tidak diolah akan mengganggu keseimbangan lingkungan dan dapat merusak/mencemari lingkungan sekitarnya.

Program penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup perlu dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Pelaksanaan pengawasan atau inspeksi ketaatan oleh institusi pemerintah terkait bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan dunia usaha/kegiatan terhadap ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup termasuk persyaratan-persyaratan perijinan.

Fungsi pengawasan perlu didukung oleh aparat pengawas yang handal, terampil dan bertanggungjawab, sehingga penataan dunia usaha/kegiatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dapat meningkat. Terbatasnya tenaga pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan dunia usaha/kegiatan dapat mempengaruhi fungsi pengawasan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas tenaga pengawas lingkungan hidup di Provinsi Papua.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup adalah:

- Pengawasan pada PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika
 - Fasilitas IPAL Limbah Domestik di Ridge Camp dengan tambahan inlet dari pembangunan penambahan fasilitas yang menghasilkan limbah cair, akan menambah beban pada IPAL yang dapat mengakibatkan akan kurang efektifnya pengolahan limbah.
 - Fasilitas tambahan yang dibuat untuk mendukung dan membantu IPAL Limbah Domestik di Ridge Camp berupa instalasi pengolah limbah *grey water* kurang sesuai dan tidak

efektif pengoperasiannya karena fungsi/ peruntukannya berbeda.

- Ada potensi cecceran/ tumpahan air larian yang mengandung konsentrat, meresap dan terbuang ke lingkungan.
- Pengawasan pada PT. Agriprima Cipta Persada dan Agrinusa Persada Mulia di Kabupaten Merauke.

Administrasi

- Dokumen AMDAL kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrinusa Persada Mulia Nomor 125 Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012;
- Pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup PT. Agrinusa Persada Mulia periode II (Juli-Desember 2014) telah dilaporkan ke BLH Kabupaten Merauke dan BPLH Provinsi Papua. Laporan pelaksanaan RKL/RPL telah mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005;
- Narasi pada kata pengantar tentang dokumen ANDAL, RKL dan RPL disahkan oleh komisi penilai amdal Kabupaten Merauke dengan keputusan Bupati Merauke No. 34 Tahun 2008;

Program Sosial, Ekonomi Dan Budaya

- Kompensasi terhadap hasil hutan kayu pada saat land clearing telah dilakukan berdasarkan Pergub Papua No. 64 Thn 2012.
- Masyarakat masih menuntut janji perusahaan untuk membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.
- Masyarakat dari Kampung Bunggai, Bupul Kampung, Bupul Indah, Gerisar, Sipias Distrik Elikobel, Kumaaf Dan Kandrakai Distrik Ulilin Prasasti, Man Waybob, Afkab

Makmur, Andaito, Enggol Jaya dan Sigabel Distrik Muting, diharapkan agar pihak perusahaan secara kontinu melakukan peningkatan kemampuan masyarakat lokal yang akan diperkerjakan di perusahaan.

- Tenaga kerja lokal yang sekarang telah direkrut \pm 90 orang dan akan terus dilakukan pendampingan dan pelatihan kerja.
- Pendekatan program CSR masih perlu ditingkatkan.

Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan

- Pemrakarsa telah membayar sebesar kayu pada areal perkebunan seluas 2.283.63 Ha dengan harga Rp. 75.000/m³. Dibayar secara bertahap.
- Perusahaan akan menjawab namun akan dilakukan secara berangsur-angsur.
- Akan terus dilakukan oleh perusahaan hingga masyarakat lokal dapat bekerja di perusahaan.

Fisik, Kimia dan Biologi (Tahap konstruksi)

- Air bersih
 - **Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan**
 - Telah dibangun saluran drainase dan kolam retention dilokasi proyek maupun kolam pengolahan limbah.
- Air Minum Karyawan
 - **Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan**
 - Telah dibuat unit pengolahan air bersih
- Air Permukaan
 - **Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan**
 - Telah dibangun kanal/saluran darurat disekeliling tapak proyek dan jalan koridor. Kegiatan ini belum sesuai

dengan dokumen RKL. Hasil pemeriksaan sampel air dari sungai Bian, Maro dan Kumbe, masih berada dibawah baku mutu (parameter air sebagai PP 82/2001 pada kelas IV.

- **Komponen Biologi**
 - **Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan**
 - Telah dilakukan pengolahan lingkungan untuk mempertahankan tanaman pada *buffer zone* disepadan sungai Bian, Mandom. Jenis tanaman sebagai pengayaan di Distrik Ulilin adalah gaharu, rambutan.
- Pengawasan pada PT. Sinar Kencana Inti Perkasa di Kabupaten Jayapura
 - Penambahan tinggi dinding bangunan pada Fiber KSRM.
 - Penambahan tinggi dinding gudang HCL No. 2, karena saat ini drum HCL masih terkena sinar matahari langsung, jarak drum HCL dengan dinding minimal 1 meter
 - Posisi tabung APAR hindari terkena sinar matahari langsung
 - Kebersihan parit yang ada disekeliling Gudang KSRM dan Workshop
 - Perawatan mesin pompa
 - Jarak permukaan air tanah dengan permukaan air didalam Sumur Pantau kurang dari 2 meter
 - Disarankan untuk memonitoring pengukuran air dalam sumur pantau pada saat perubahan cuaca
 - Disarankan sebelum pengambilan sample air dalam sumur pantau, sehari sebelumnya dilakukan pengurasan.
- Pengawasan pada PT. Dongin Prabhawa di Kabupaten Mappi
 - Pengamatan kami di lapangan CSR telah dilaksanakan dengan

baik oleh pihak Perusahaan

- Infrastruktur
- Biaya pendidikan baik dari TK sampai Perguruan Tinggi
- Logpond/Pelabuhan khusus untuk perubahan
 - Untuk sementara dipergunakan bongkar muat kayu gelondongan di angkut melalui tongkang ke PT. Korindo di Asiki.
 - Kapal berbobot tonase 8000 ton berlabuh di pelabuhan perusahaan
 - Pihak perusahaan telah membangun pelabuhan khusus untuk masyarakat untuk naik turun penumpang melalui taxi laut/speedboat antar kampung dan kota disekitarnya.
 - Untuk sementara ini pengangkutan CPO belum dilakukan karena pabrik sementara dibangun
 - Tangki penampungan CPO di Pelabuhan belum selesai dikerjakan.
- Logpond/pelabuhan yang dibangun oleh PT. Dongin Prabhawa di kampung Mam Distrik Ngguti Kabupaten Mappi untuk kebutuhan perusahaan.
- Logpond/pelabuhan yang dibangun oleh PT. Dongin Prabhawa di kampung Mam Distrik Ngguti untuk kebutuhan masyarakat
- Tangki/penampungan CPO di area logpond/pelabuhan kampung Mam Distrik Ngguti
- Tangki/penampungan CPO di area logpond/pelabuhan kampung Mam Distrik Ngguti
- CPO

- Pabrik CPO dalam tahap penyelesaian 99% selesai
- Baru uji coba biji buah kelapa sawit untuk menjadi CPO
- Pabrik CPO sementara penyelesaian 99% rampung
- Diklat peningkatan kapasitas tim yang melaksanakan pengawasan yaitu:
 - a. Diklat Pengawasan
 - Pelatihan Dasar-Dasar Pengawasan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jalan Mayjen Ishak Juarsa Gunung Batu Kotak Pos 141 Bogor 16118. Pelatihan ini dilaksanakan selama 20 hari, mulai tanggal 6 sampai dengan 26 Oktober 2015.
 - Peserta Pelatihan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua berjumlah dua orang yang merupakan peserta terbanyak dari beberapa instansi terkait se-Indonesia. Peserta yang ditugaskan adalah : John Kennedy Thesia, ST., MT (19851121 201104 1 001) dan Herman Wayeni, ST (19830117 201004 1 002).
 - Kurikulum Materi Diklat/Pelatihan Dasar-Dasar Pengawasan Lingkungan Hidup berjumlah 20 Mata Pelajaran dengan jumlah 144 Jam Pelajaran.
 - b. Diklat Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - Pelatihan Pengelolaan B3 dan Pengendalian Limbah B3 diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta selama lima hari, yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2015.
 - Staf BPLH Provinsi Papua yang mengikuti Pelatihan ini adalah Nurul Matin, MT (19770506 200801 2 026) dan Nurdian Wahyuni, ST (19760601 200801 2 022). Peserta

- yang telah mengikuti Pelatihan Pengelolaan B3 dan Pengendalian Limbah B3 ini disiapkan untuk mengikuti Diklat PPLH yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Mata Pelajaran Pelatihan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Pengendalian Limbah B3 yang disampaikan terdiri dari 18 materi dengan jumlah 36 Jam.

Outcome Kegiatan

Outcome kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup adalah perusahaan melakukan pengelolaan lingkungan sebagai berikut:

1. Rekomendasi PT. Freeport Indonesia

Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah :

- a. Mengeluarkan fasilitas IPAL Limbah Domestik MP-64 dari daftar perijinan karena fasilitas tersebut sudah tidak beroperasi.
- b. Fasilitas tambahan pada IPAL Ridge Camp berupa instalasi pengolahan limbah *Grey Water* masih memerlukan kajian pengolahan yang sesuai dengan jenis air buangnya.
- c. PT. Freeport Indonesia melakukan kajian dan perbaikan terhadap fasilitas tambahan IPAL Limbah Domestik di Ridge Camp agar dapat mengatasi bertambahnya kapasitas limbah cair yang dihasilkan sehingga layak lingkungan dan memenuhi baku mutu dan persyaratan yang diwajibkan dalam ijin dan perturan perundang undangan lainnya.
- d. Proses penambahan desinfektan (chlorin) pada fasilitas IPAL Limbah Domestik di MP 38 perlu diperbaiki agar lebih efisien dan efektif.
- e. Melakukan perawatan (Maintenance) terhadap semua fasilitas IPAL Limbah domestik secara rutin sehingga tidak terjadi

penumpukan kotoran dan korosi/perkaratan yang mengakibatkan meningkatnya nilai Total Padatan Tersuspensi (TSS).

- f. Memastikan Run off (air larian) pada lingkungan IPAL Dewatering Plan-A mengalir ke IPAL dan tidak ada yang terbang ke lingkungan.
- g. Memastikan lantai yang menahan/ menampung konsentrat yang ada di sekitar IPAL dibangun dari bahan yang kedap air dan tidak ada retakan yang memungkinkan konsentrat terbang ke lingkungan

Fasilitas *Secondary Containment* :

Fasilitas *secondary containment* tidak memerlukan ijin pembuangan limbah cair dikarenakan tidak ada air buangan (*effluent*) dari fasilitas penyimpanan tangki bahan bakar minyak, namun demikian PTFI harus :

- h. Memastikan konstruksi dinding dan lantai secondary containment kedap air sehingga tidak ada kontaminasi/ rembesan minyak ke lingkungan.
- i. Memperbaiki konstruksi lantai secondary containment dengan memperhatikan kemiringan/ elevasi minimal 1° mengarah pada bak pengumpul dan/atau oil trap.
- j. Memperbaiki bak pengumpul yang terdapat pada secondary containment dengan membuat saluran under flow (aliran bawah) yang berfungsi sebagai penahan dan pengumpul minyak.

2. Rekomendasi PT. Agriprima Cipta Persada

a. Persepsi Masyarakat :

Pemrakarsa dan Pihak Pemerintah Distrik segera menyelesaikan konflik lahan atas Marga Mahuse dan selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Merauke.

b. Tenaga Kerja :

Pemrakarsa wajib mendampingi tenaga kerja lokal.

c. Workshop (bengkel) :

- Perlu dipasang papan informasi dan simbol-simbol jenis-jenis B3 pada TPS B3 dan disesuaikan dengan PP 18 Tahun 1999 Jo 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.
- PP 18 Tahun 1999 Jo 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 pasal 40 ayat 1a; Permen 18 Tahun 2009 mengenai Tata Cara Perijinan.
- Permen 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perijinan & Pengawasan Pengelolaan LB3; Kepka. Bapedal 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpan Dan Pengumpul Limbah B3.

d. Poliklinik :

Perlu disiapkan TPS untuk pembuangan limbah medik

e. Alat Pelindung Diri (APD) :

Pemrakarsa mewajibkan karyawan menggunakan APD saat bekerja.

f. Gudang Pupuk :

Perlu disiapkan gudang yang memadai untuk penyimpanan pupuk dan diberlakukan secara khusus.

g. Departemen Sustainability (keberlanjutan)

Perlu dilengkapi dengan Unit Lingkungan pada perusahaan

3. Rekomendasi PT. Agrinusa Persada Mulia

a. Persepsi Masyarakat :

Pemrakarsa dan Pihak Pemerintah Distrik segera menyelesaikan konflik lahan atas Marga Mahuse dan selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Merauke.

b. Tenaga Kerja :

Pemrakarsa wajib mendampingi tenaga kerja lokal

c. Workshop (bengkel) :

d. Perlu dipasang papan informasi dan simbol-simbol jenis-jenis B3 pada TPS B3 dan disesuaikan dengan PP 18 Tahun 1999 Jo 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

e. PP 18 Tahun 1999 Jo 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 pasal 40 ayat 1a; Permen 18 Tahun 2009 mengenai Tata Cara Perijinan.

f. Permen 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perijinan & Pengawasan Pengelolaan LB3; Kepka. Bapedal 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpan Dan Pengumpul Limbah B3.

g. Poliklinik :

Perlu disiapkan TPS untuk pembuangan limbah medik

h. Alat Pelindung Diri (APD) :

Pemrakarsa mewajibkan karyawan menggunakan APD saat bekerja.

i. Gudang Pupuk :

Perlu disiapkan gudang yang memadai untuk penyimpanan pupuk dan diberlakukan secara khusus.

j. Departemen Sustainability (keberlanjutan)

Perlu dilengkapi dengan Unit Lingkungan pada perusahaan

4. Rekomendasi PT. Sinar Kencana Inti Perkasa

- a. Penambahan tinggi dinding bangunan pada Fiber KSRM
- b. Penambahan tinggi dinding gudang HCL Nomor 2, karena saat ini drum HCL masih terkena sinar matahari langsung, jarak drum HCL dengan dinding minimal 1 meter
- c. Posisi tabung APAR hindari terkena sinar matahari langsung
- d. Kebersihan parit yang ada di sekeliling Gudang KSRM dan Workshop
- e. Perawatan mesin pompa
- f. Jarak permukaan air tanah dengan permukaan air di dalam Sumur Pantau kurang dari 2 meter, minimal 2 meter sesuai yang tercantum dalam SK Bupati untuk Ijin Land Application.
- g. Disarankan untuk memonitoring pengukuran air dalam sumur pantau pada saat perubahan cuaca
- h. Disarankan sebelum pengambilan sample air dalam sumur pantau, sehari sebelumnya dilakukan pengurasan

5. Rekomendasi PT. Dongin Prabhawa

- a. Pihak PT. Dongin Prabhawa perlu membentuk Devisi Lingkungan Hidup.
- b. Pihak PT. Dongin Prabhawa harus mempunyai Radio untuk taxi / speedboat untuk kepentingan perusahaan, mengingat cukup luas dan medan yang sulit dilalui.
- c. Diharapkan agar manajemen menunjuk staf yang memiliki kompetensi Dasar-Dasar AMDAL yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan.
- d. Pohon pelindung endemik asli daerah ditanam pada area perkantoran maupun di lokasi pabrik sebagai penyaring dan keindahan lingkungan.
- e. Agar pihak perusahaan menghindari pembukaan lahan dengan cara mencegah kebakaran di lokasi areal perusahaan.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 304.250.000,- (Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 90,07% dan realisasi keuangan 89,91%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 273.564.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Dengan bobot 13,87%.

7. Kegiatan Pembinaan Pemanataan dan Penilaian Adipura

Dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup selama ini, masih dijumpai kendala rendahnya partisipasi stakeholder maupun masyarakat untuk berperan dalam pelestarian lingkungan hidup untuk menciptakan kota bersih dan teduh disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap permasalahan lingkungan yang ada, rendahnya tingkat kemampuan dan rendahnya komitmen masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, disamping pemahaman pelaku pemerintahan terhadap pelestarian lingkungan juga masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dari persepsi para pelaku pelestari lingkungan hidup yang sangat bervariasi.

Mengingat pentingnya Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku dan menjadi media yang sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, etika, disiplin dan budi pekerti pelaksana Pemerintahan dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, maka disusunlah suatu kebijakan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang Undang No. 32 pada tahun 2009 oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Pelaksanaan dalam Pengelolaan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Instansi terkait.

Adapun dasar pelaksanaan dari kegiatan dimaksud antara lain : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengolaan Sampah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.01 Tahun 2009, tentang Program ADIPURA dan Permendagri No.01 Tahun 2007, tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Pembinaan Pemantauan dan Penilaian Adupura adalah:

Terlaksananya pembinaan pemantauan dan penilaian Adipura di 8 (delapan) Kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Mimika, Nabire, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Yahukimo, Jayawijaya dan Pegunungan Bintang.

Outcome Kegiatan

Outcome Kegiatan dari kegiatan Pembinaan Pemantauan dan Penilaian Adipura adalah Kabupaten Biak Numfor mendapatkan piala Adipura, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Yapen mendapat sertifikat Adipura sebagai Kota Bersih.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 342.600.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 94,86%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 325.003.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ribu Rupiah). Dengan bobot 15,62%.

V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

1. Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Kalpataru

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku dan menjadi media yang sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, etika, disiplin dan budi pekerti pelaksana Pemerintahan dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, maka disusunlah suatu kebijakan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang Undang No. 32 pada tahun 2009 oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Adapun dasar pelaksanaan dari kegiatan dimaksud adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.15 tahun 1995: tentang Pemberian Penghargaan Kalpataru.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Pembinaan Penilaian Kalpataru adalah:
Terlaksananya pembinaan dan penilaian Kalpataru di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Jayawijaya dan Tolikara

Outcome Kegiatan

Outcome dari kegiatan Pembinaan dan Penilaian Kalpataru adalah terjaganya lingkungan oleh masyarakat.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 136.050.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 97,82%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 133.080.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu rupiah). Dengan bobot 39,32%.

2. Kegiatan Pemberdayaan Institusi Kemasyarakatan Dalam Penyelamatan Danau

Danau merupakan suatu ekosistem perairan menggenang menampung air dengan inlet lebih dari pada outletnya. Pada danau alami biasanya berbentuk mangkok (*bowl-shape*) yang lebih rendah dari permukaan tanah, yang terisi air dalam waktu lama, terbentuk akibat bencana alam besar seperti glasier, aktivitas gunung berapi atau gempa tektonik.

Danau-danau di Indonesia memiliki potensi yang sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia. Fungsi dan nilai manfaat danau sangat beragam, ada danau yang memiliki fungsi tunggal ada pula danau yang memiliki multi-fungsi. Selain fungsi ekologi dan kaya dengan keanekaragaman hayati, fungsinya untuk menunjang kehidupan manusia juga sangat besar. Seperti tercantum pada, jenis pemanfaatan air danau adalah sebagai berikut:

- a) Air baku untuk penduduk di sekitarnya.
- b) Pertanian untuk penduduk yang berkebun di sempadan danau, atau air irigasi di hilir danau.
- c) Perikanan tangkap dan perikanan budidaya di danau atau pada sungai/ saluran air yang berasal dari danau.
- d) Sumber daya tenaga listrik atau PLTA, baik yang dibangun pada outlet danau ataupun pada sungai yang keluar dari danau.
- e) Pengendalian banjir, karena menyimpan air diwaktu musim hujan.
- f) Pariwisata bagi penduduk di sekitarnya maupun wisatawan domestik dari daerah lain, serta wisatawan asing.
- g) Sumber plasma nuftah; tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora dan fauna yang penting.
- h) Reservoir alam tempat penyimpanan kelebihan air yang berasal dari air hujan, aliran permukaan, sungai-sungai atau sumber-sumber air bawah tanah; juga berfungsi sebagai pengendali banjir.

- i) Memelihara iklim mikro, dimana keberadaan ekosistem danau dapat mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat.
- j) Sarana pendidikan, rekreasi dan objek wisata.

Bentuk komitmen pemerintah daerah, pada tahun 2015 adalah dengan memberikan dana hibah barang/jasa kepada kelompok masyarakat adat penyelamat danau yang diberikan kepada 4 (empat) kelompok masyarakat adat penyelamat danau di Danau, Sentani dan Danau Paniai.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Pemberdayaan Institusi Kemasyarakatan Dalam Penyelamatan Danau adalah:

- a) Terlaksananya pemberian dana pembinaan bagi 2 kelompok masyarakat adat dalam penyelamatan danau di Danau Sentani Kabupaten Jayapura dan 2 kelompok masyarakat adat dalam penyelamatan danau di Danau Paniai Kabupaten Paniai.
- b) Terlaksananya penyelamatan ekosistem danau melalui pembersihan eceng gondok di Danau Sentani dan Danau Paniai.
- c) 4 (empat) kelompok masyarakat adat penyelamat danau yang terdiri dari 2 (dua) kelompok Danau sentani dan 2 (dua) kelompok Danau Paniai.
- d) Pemahaman dan komitmen institusi masyarakat adat dalam melakukan pengelolaan danau.

Outcome Kegiatan

Outcome Kegiatan dari kegiatan kegiatan Pemberdayaan Institusi Kemasyarakatan Dalam Penyelamatan Danau adalah:

- a) Komitmen Masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- b) Menurunnya ancaman terhadap kerusakan lingkungan.
- c) Terpeliharanya dan terjaganya kearifan lokal masyarakat adat.
- d) Terbentuknya kelompok masyarakat adat yang baru dalam rangka penyelamatan Danau.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 97,02%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 203.750.000,- (Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan bobot 60,68%.

VI. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Kegiatan Pekan Lingkungan Hidup

Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau *World Environment Day* merupakan perayaan lingkungan hidup terakbar di seluruh dunia. Puncak acaranya diperingati pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya. Sejak digelar pertama kali pada tahun 1972, telah menjadi media bagi PBB (melalui UNEP) untuk mengampanyekan akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup, serta menyadarkan semua pihak untuk ikut bertanggung jawab merawat bumi sekaligus menjadi pelopor perubahan dan penyelamat bumi dan lingkungan hidup.

Pada tahun 2015 ini, perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau *World Environment Day* mengangkat tema "*Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care*". Oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menetapkan Tema nasional "*Mimpi dan Aksi Bersama untuk keberlanjutan Kehidupan di Bumi*" serta tema lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua yaitu "*Gunakan Sumber Daya Alam secukupnya untuk kesejahteraan Masyarakat Papua*".

Tema ini dipilih dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2050 total penduduk bumi yang diperkirakan mencapai 7 milyar. Jika penduduk bumi tetap mempertahankan pola konsumsi dan produksi seperti saat ini, dibutuhkan hingga tiga buah bumi untuk mempertahankan pola hidup dan konsumsi masyarakat dunia. Padahal hingga saat ini, bumi tetap menjadi satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh manusia. Dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang terus berlangsung, membuat ekosistem bumi mendekati titik kritis.

Oleh karena itu diperlukan perubahan pola konsumsi manusia terhadap sumber daya di bumi. Diperlukan pola hidup dan konsumsi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Segala kegiatan konsumsi dan produksi tetap memperhitungkan keberlangsungan sumber daya alam dan dampak lingkungan. Sehingga bumi akan tetap menjadi sebuah planet yang nyaman dan sehat untuk dihuni oleh manusia dan anak cucunya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua melaksanakan Kegiatan Pekan Lingkungan Hidup 2015.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Pekan Lingkungan adalah:

- 1) Terlaksananya lomba kebersihan dan penghijauan tingkat Sekolah Dasar sampai SMU/SMK atau sederajat
- 2) Terlaksananya Lomba Pidato bagi Siswa dan Guru tingkat SLTP, SMU/SMK atau sederajat di kota Jayapura, Kab.Jayapura, Kab. Keerom.
- 3) Terlaksananya Lomba Menggambar Tingkat Sekolah Dasar yaitu kelas 2 dan 3 SD
- 4) Terlaksananya Lomba Mewarnai yang diikuti oleh siswa Taman kanak-kanak.

- 5) Terlaksananya Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diikuti oleh siswa dan Guru SMU/SMK sederajat di Kota Jayapura, Kab.Jayapura dan Kab. Keerom.

Outcome Kegiatan

Outcome Kegiatan dari kegiatan Pekan Lingkungan Hidup adalah:

- a) Meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam menjaga lingkungan hidup
- b) Menyebarkan Informasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 473.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 98,45%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 465.672.900,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Dengan bobot 38,05%.

2. Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Provinsi Papua merupakan kegiatan wajib yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 10 huruf h) yang mewajibkan pemerintah baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat.

Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan, dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang dilakukan sejak tahun 2002, didasarkan pada surat Menteri lingkungan Hidup kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan mengacu kepada Pedoman Umum Penyusunan Laporan SLHD yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH). Mulai tahun 2008, buku laporan Status Lingkungan Hidup di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota disebut Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (SLHD Provinsi) dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah adalah:

- 1) Tersedianya Buku Status Lingkungan Hidup Provinsi Papua yang terdiri dari 50 buku Laporan dan 50 buku data.

- 2) Tersedianya tenaga Tim Pengelola SILH di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Outcome Kegiatan

Outcome dari kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah adalah:

- a) Menyediakan data dasar bagi perbaikan pengambilan keputusan pada semua tingkatan.
- b) Menyebarkan Informasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 279.520.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 95,31%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 266.410.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Dengan bobot 22,49%.

3. Kegiatan Penyebarluasan Informasi SDA dan LH

Informasi adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, data atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur dalam bentuk laporan, file, buku, peta, foto dan sebagainya. Informasi Publik adalah informasi yang diberikan, dibuat, dan dipelihara oleh badan publik, dimana informasi tersebut milik publik dan dipercayakan pada lembaga-lembaga pemerintahan untuk dilaksanakannya dan dapat diakses publik setiap saat, kecuali informasi yang dikecualikan.

Transparansi (keterbukaan) adalah suatu system dimana lembaga-lembaga dan pejabat public mempunyai akses informasi yang bisa dipahami dan digunakan dengan baik oleh publik, dan diatur dengan hukum positif sehingga memberikan kepastian hukum tentang hal-hal yang dapat atau harus diketahui oleh publik dan hal-hal yang tidak diketahui oleh public.

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana maka setiap badan publik dapat menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi serta membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat tersedia dan pelayanan cepat, tepat waktu, murah dan sederhana.

Pada kegiatan penyebarluasan informasi BPLH yang dilaksanakan pada tahun 2015 mencakup beberapa sub kegiatan yang diupayakan dapat menjawab permasalahan penyebarluasan informasi yang ada.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Penyebarluasan Informasi SDA dan LH adalah:

- 1) Tersedianya Buletin Cartenz terbit setiap triwulan dengan jumlah 100 eksemplar

- 2) Tersedianya liflet AMDAL, Sampah, Pemberdayaan Masyarakat dan Stiker Sampah.
- 3) Tersedianya Buku sesuai dengan Standar Nasional dengan penomoran ISBN terdiri dari Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Papua, Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (Srap) Papua dalam Implementasi Redd+, Kumpulan Pidato dan Karya Ilmiah Siswa dan Guru Hari Lingkungan Hidup Tahun 2014-2015 Provinsi Papua dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Tersedianya kalender 2016.

Outcome Kegiatan

Outcome Kegiatan dari kegiatan Penyebarluasan Informasi SDA dan LH adalah:

- a) Tersebarluasnya Informasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 312.275.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 90,75% dan realisasi keuangan 90.04%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 281.186.950,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah). Dengan bobot 25,12%.

4. Kegiatan Pekan Cinta Puspa dan Satwa Papua

Hutan hujan tropis khususnya Papua menyimpan ratusan juta spesies yang merupakan sumber plasma nutfah yang belum diteliti dan diidentifikasi maupun diketahui kegunaannya. Karena hutan sebagai satu ekosistem maka sumberdaya hayati meliputi flora dan fauna yang sangat beragam, mulai dari tumbuhan berkayu sampai yang merambat maupun cendawan serta berbagai jenis satwa liar, membuat Papua menyimpan sejumlah plasma nutfah yang sangat beragam. Potensi tersebut merupakan salah satu tantangan besar bagi para pakar baik di perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga penelitian maupun para pakar di pemerintahan untuk memberikan kepedulian dan perhatian dalam hal : melindungi (konservasi), meneliti, memahami dan memanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Untuk membangun kepedulian ini, melalui peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) 2015 yang merupakan agenda tahunan disemua daerah di Indonesia melaksanakan kegiatan terkait dengan penyelamatan puspa dan satwa.

Tema HCPSN 2015 adalah **“Ayo Selamatkan Puspa dan Satwa Sebagai Penyangga Kehidupan Mulai Dari Lingkungan Kita”** merupakan momentum bagi gerakan penyelamatan satwa dan tumbuhan lokal yang diwujudkan melalui upaya nyata dalam bentuk program dan kegiatan baik pada tataran nasional maupun daerah. Peringatan ini telah berlangsung selama 23 tahun, namun semangat kepedulian seluruh masyarakat perlu terus ditingkatkan demi pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Sesuai dengan visi Gubernur Papua untuk mewujudkan **“Papua bangkit, mandiri dan sejahtera”** sebagai upaya untuk

mengambil peran dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat Papua yang lebih baik lagi dan guna mendorong partisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengembangan Cinta Puspa dan Satwa di Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Paniai dan Kepulauan Yapen berusaha memberikan dukungan kepada masyarakat untuk pengembangan kemandirian ekonomi kreatif.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Pekan Cinta Puspa dan Satwa Papua adalah:

- 1) Terlaksananya kerjasama tim bersama instansi terkait
- 2) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam melestarikan puspa dan satwa Papua
- 3) Terlaksananya pekerjaan lapangan, meliputi :
 - Kegiatan survey di 4 Kabupaten yaitu kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Paniai dan Kepulauan Yapen dalam rangka pengumpulan data dan informasi
- 4) Teridentifikasinya satwa dan puspa endemik Papua di 4 kabupaten yaitu kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Paniai dan Kepulauan Yapen

Outcome Kegiatan

Outcome dari kegiatan Pekan Cinta Puspa dan Satwa Papua adalah:

- a) Terbentuknya kelompok masyarakat dalam pelestarian satwa dan puspa endemik Papua yaitu Kelompok pengembangan Anggrek di Kabupaten Yahukimo dan Paniai; Kelompok Pengembangan Kelinci di Kabupaten Intan Jaya dan Kelompok Konservasi Penyu Belimbing di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 178.250.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 97,03%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 172.960.100,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Rupiah). Dengan bobot 14,34%.

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN-KAWASAN LAUT DAN HUTAN

1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengembangan Ekowisata

Ekowisata merupakan terjemahan dari kata eco-tourism, dipahami sebagai “perjalanan” yang sengaja ke kawasan-kawasan alam untuk memahami budaya dan sejarah lingkungan tersebut, sambil menjaga keutuhan kawasan, tidak mengubah dan mampu menghasilkan peluang untuk pendapatan bagi masyarakat sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari upaya pelestarian sumber daya alam.

Kegiatan eko-wisata sebenarnya merupakan bagian kecil dari arti pariwisata. Yang membedakan ekowisata dengan pariwisata adalah konsep bukan hanya melestarikan alam atau konservasi, melainkan harus konsisten pada kegiatan yang berbasiskan masyarakat (*community based*).

Oleh karena itu, kegiatan eko-wisata lebih mengutamakan pada usaha-usaha dalam skala kecil dan menekankan pada kepentingan pelestarian lingkungan dan sosial masyarakat setempat. Ekowisata memang menjadi sebuah alternatif dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati sebuah ekosistem yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ekosistem tersebut.

Dikaitkan dengan isu perubahan iklim telah menjadi perhatian banyak pihak baik di tingkat internasional, regional, nasional dan lokal. Berbagai kejadian terkait dengan kondisi iklim yang tidak menentu seperti banjir, kekeringan, longsor, gelombang tinggi, dan peningkatan muka air laut semakin sering terjadi dengan intensitas yang semakin meningkat, sehingga menimbulkan korban jiwa serta kerugian ekonomi dan ekologi.

Kondisi tersebut perlu disikapi dengan memperkuat aksi nyata di tingkat lokal yang dapat berkontribusi terhadap upaya mitigasi untuk mengurangi kerusakan lingkungan serta upaya adaptasi untuk meningkatkan kapasitas seluruh pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Aksi nyata pelestarian ekosistem menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan strategi pengelolaan ekowisata untuk mencegah perubahan iklim, yang perlu terus dikembangkan dan diperkuat pelaksanaannya di daerah.

Melalui pelaksanaan ekowisata, BPLH Provinsi Papua memberikan dukungan pembinaan terhadap kelompok yang secara berkesinambungan telah melakukan aksi lokal terkait dengan upaya menjaga lingkungan. dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelestarian lingkungan untuk menghadapi iklim dan dampak perubahan iklim. Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dikembangkan dan telah dilaksanakan mencakup antara lain peningkatan tutupan vegetasi mangrove dan budidaya kopi.

Beragam kegiatan yang dilaksanakan masyarakat pada lokasi-lokasi tersebut, menunjukkan bahwa aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bukan sesuatu hal yang sama sekali baru dan sulit untuk dilakukan. Inovasi pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat

diarahkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat dengan adanya isu perubahan iklim.

Dukungan dari berbagai pihak termasuk instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan dunia usaha dapat memperkuat inisiatif masyarakat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk dihuni. Lokasi ekowisata tersebut diharapkan dapat menjadi model percontohan penerapan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan berperan sebagai agen pembawa perubahan bagi lingkungan di sekitarnya.

Sesuai dengan visi Gubernur Papua untuk mewujudkan “Papua bangkit, mandiri dan sejahtera” sebagai upaya untuk mengambil peran dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat Papua yang lebih baik lagi. Guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Jayawijaya, Biak Numfor, Merauke dan Nabire, berusaha menggali dan menemukan obyek-obyek wisata berbasis masyarakat untuk pengembangan kemajuan pembangunan dan ekonomi masyarakat

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengembangan Ekowisata adalah:

- a. Terlaksananya kerjasama Tim bersama instansi terkait
- b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat adat dalam pengembangan ekowisata di kabupaten
- c. Terlaksananya pekerjaan lapangan, meliputi:
 - Kegiatan survei di lokasi ekowisata dalam rangka pengumpulan data dan informasi;

- Kegiatan penyediaan data/informasi (leaflet) tentang potensi ekowisata dan pendokumentasian data (video) terkait ekowisata di kabupaten;
- d. Tersusunnya laporan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengembangan ekowisata di kabupaten
- e. Teridentifikasinya lokasi ekowisata dan potensi di dalamnya.
- f. Tersedianya data/informasi potensi ekowisata di 4 (empat) Kabupaten yaitu Jayawijaya, Biak Numfor, Merauke dan Nabire, berupa dokumentasi (foto), leaflet dan video lokasi ekowisata.

Outcome Kegiatan

Outcome dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengembangan Ekowisata adalah:

- Sebagai sumber penghasilan devisa bagi pengelolaan Taman Wisata dan Konservasi.
- Sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat lokal/adat.
- Mengurangi kegiatan eksploitasi wilayah hutan dan sumber-sumber alam secara terkendali.
- Memanfaatkan lahan sebagai aksi dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 229.650.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 98,04%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 225.150.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan bobot 1,45%.

VIII. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

1. Pembentukan Pos Pengaduan LH Papua

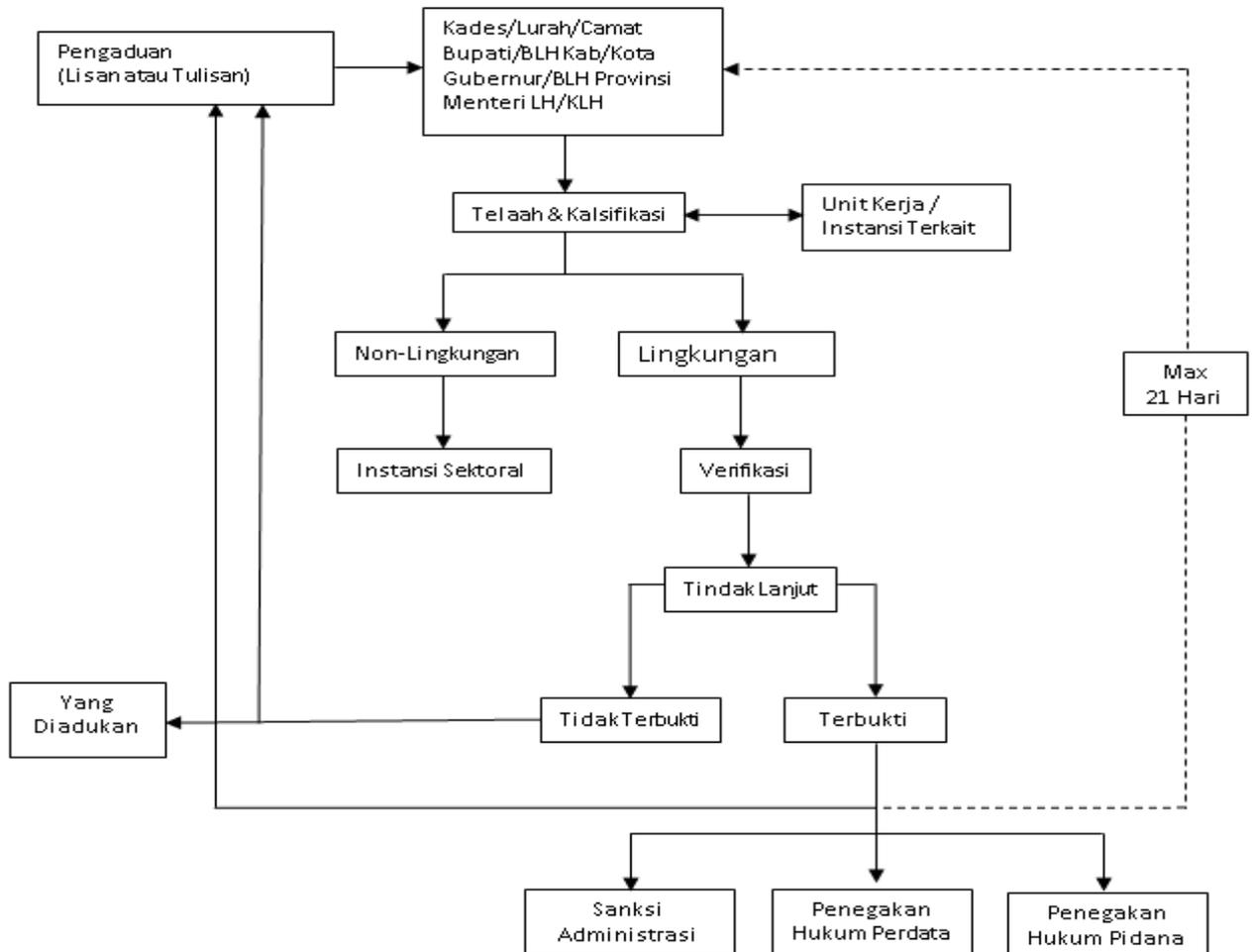
Permasalahan lingkungan dari waktu ke waktu terus meningkat, hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akan sumber daya alam di Papua. Provinsi Papua merupakan masa depan Indonesia dan dunia, dimana berbagai investasi sedang di arahkan ke Papua, mulai dari Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Pertanian dan jasa lainnya. Kondisi ini berdampak pada lingkungan hidup dan ekologi yang berada di atasnya. Tingkat kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan hiduppun semakin hari mulai menurun seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat sementara sumber daya yang tersedia masih sangat terbatas atau belum dikelola secara maksimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat Papua.

Untuk menangani berbagai permasalahan lingkungan yang sedang terjadi di Papua, maka Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua telah membentuk Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang disingkat P3SLH di Tingkat Provinsi dan lima Kabupaten mewakili wilayah lima wilayah adat di Papua. Pos Pengaduan ini bertugas menerima, mengidentifikasi memverifikasi laporan pengaduan yang disampaikan oleh public/masyarakat.

Pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup telah terbentuk di lima wilayah adat. Lima wilayah adat tersebut antara lain Ha'anim, Meepago, Lapago, Mamta dan Saireri. Sekretariat pos pengaduan berada di BLH di Kabupaten Jayapura, Mimika, Merauke, Biak, Nabire dan Jayawijaya. Untuk mengoperasionalkan pos pengaduan sebagaimana Permenlh 9 Tahun 2010, maka harus dilengkapi dengan PPLHD/PPLH dan PPNS.

PPLHD/PPLH dan PPNS bertugas untuk memverifikasi pengaduan yang disampaikan oleh pengadu.

Mekanisme pengaduan sebagai berikut:



Gambar. Mekanisme Pengaduan menurut Permenlh 09 Tahun 2010.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Pembentukan Pos Pengaduan LH Papua adalah: Terbentuknya pos pengaduan di lima wilayah Adat antara lain di Kabupaten Jayawijaya mewakili Lapago, Kabupaten Merauke mewakili wilayah adat Ha'anim, Kabupaten Nabire mewakili wilayah adat Saereri, Kabupaten Mimika mewakili wilayah adat Meepago,

Kabupaten Biak Numfor mewakili wilayah adat Saireri, Kabupaten Jayapura wilayah adat Mamta.

Outcome Kegiatan

Outcome dari kegiatan Pembentukan Pos Pengaduan LH Papua adalah:

- Menangani pengaduan masyarakat di lima wilayah adat
- Penyebaran informasi tentang mekanisme pengaduan
- Menerima dan menverifikasi dan menegakkan hukum lingkungan hidup

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 337.350.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 95,38%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 321.750.900,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuan Sembilan Ratus Rupiah). Dengan bobot 13,38%.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Komisi AMDAL Kabupaten/Kota

Pesatnya rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL mendorong kesiapan Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua untuk lebih cermat dan memiliki independensi dalam memberikan penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat hingga 2015 di Provinsi Papua hanya memiliki 3 Kabupaten/Kota yang memiliki lisensi sebagai Komisi Penilai AMDAL (KPA) sehingga beberapa proses penilaian yang seharusnya menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota masih dinilai oleh KPA Provinsi Papua.

Mendasari kondisi tersebut maka kegiatan Pembinaan dan Pengawasan KPA Kabupaten/Kota perlu dilakukan untuk memperkuat

3 KPA yang telah memiliki lisensi tetapi juga mendorong Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota untuk membentuk KPA dan mengajukan permohonan lisensi KPA.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Komisi Amdal Kabupaten/Kota adalah:

Berdasarkan hasil pengawasan dan pembinaan terhadap 3 (tiga) KPA yang berlisensi dan 2 (dua) KPA yang belum memiliki lisensi maka perlu dievaluasi kinerja KPA dimaksud.

- KPA Kabupaten Jayapura

Memperhatikan hasil pengawasan dan merujuk pada PERMENLH 15 Tahun 2010, maka secara administrasi proses AMDAL dan mutu dokumen masih belum dapat berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat terlihat dari belum ada tindaklanjut BINWAS Tahun 2014 baik yang dilaksanakan oleh KPA Provinsi Papua maupun KPA Pusat.

5 (lima) dokumen yang diproses KPA Kabupaten Jayapura secara administrasi tidak terdokumentasikan pada *logbook* masing – masing jenis rencana kegiatan sedangkan untuk mutu dokumen tidak dapat dievaluasi secara efektif mengingat dokumen yang disajikan merupakan dokumen *draft*.

Dapat disimpulkan bahwa rekomendasi lisensi KPA Kabupaten Jayapura perlu mendapat pertimbangan dan evaluasi oleh BPLH Provinsi Papua untuk diberikan terguran secara tertulis hingga sanksi pencabutan rekomendasi lisensi.

- KPA Kota Jayapura

Dari hasil yang diperoleh pada dasarnya masih banyak terdapat kekurangan baik secara administrasi proses AMDAL dan mutu dokumen AMDAL yang dinilai oleh KPA Kota Jayapura. Dengan

mengacu pada PERMENLH 15 Tahun 2010, maka mutu dokumen yang dihasilkan cukup buruk karena salah satunya tidak ada konsistensi antara DPH yang dihasilkan saat pelingkupan di KA dengan kajian ANDAL dan RKL – RPL. Begitu juga secara administrasi masih terdapat tahapan proses yang tidak terdokumentasikan sehingga dapat dikategorikan proses dokumen AMDAL tidak sesuai mekanisme yang diatur.

Dapat disimpulkan bahwa rekomendasi lisensi KPA Kabupaten Jayapura perlu mendapat pertimbangan dan evaluasi oleh BPLH Provinsi Papua untuk diberikan terguran secara tertulis hingga sanksi pencabutan rekomendasi lisensi.

- **KPA Kabupaten Merauke**

KPA Kabupaten Merauke berdasarkan hasil BINWAS terhadap administrasi proses AMDAL dan mutu dokumen AMDAL masih terdapat banyak kekurangan. Secara administrasi untuk setiap dokumen yang dinilai tidak terdokumentasikan dengan rapi dalam logbook sehingga tahapan yang wajib dilalui sesuai dengan tata laksana AMDAL dan Izin Lingkungan tidak dapat diketahui. Sedangkan untuk mutu dokumen yang dihasilkan belum dapat dievaluasi secara efektif mengingat dokumen tersedia hanya Kerangka Acuan. Hasil uji diperoleh pelingkupan dan metode pengumpulan dan analisis data belum dilakukan secara cermat. Hal ini dapat dilihat dari evaluasi dampak potensial menjadi DPH atau DTPH masih dangkal.

Dapat disimpulkan untuk KPA Kabupaten Merauke perlu terus dilakukan pembinaan secara administrasi maupun melalui peningkatan kapasitas anggota KPA termasuk anggota tim teknis dan sekretariat dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen yang dihasilkan.

- **KPA Kabupaten Nabire**

Kabupaten Nabire merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua dengan jumlah investasi yang cukup banyak. Telah 4 (empat) jenis kegiatan yang proses AMDAL dan Izin Lingkungannya diproses oleh KPA Provinsi Papua mengingat hingga 2015 KPA Kabupaten Nabire belum memiliki lisensi KPA dan terutama disebabkan oleh minimnya SDM yang memiliki kualifikasi sebagaimana yang diwajibkan dalam persyaratan lisensi (PERMENLH 15 Tahun 2010). Hasil pengawasan menunjukkan sebagian besar persyaratan belum terpenuhi.

Pembinaan dalam rangka pembentukan KPA Kabupaten Nabire perlu secara kontinyu dilakukan sehingga kelengkapan administrasi dapat terpenuhi. Hal ini ditunjang juga dengan keterlibatan sektor – sektor usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Nabire.

- **KPA Kabupaten Biak Numfor**

BINWAS terhadap KPA Biak Numfor serupa dengan yang dilakukan dengan KPA Kabupaten Nabire. Hal ini disebabkan kedua KPA belum memiliki lisensi untuk melakukan penilaian. Sejak BLH Kabupaten Biak Numfor dibentuk, belum ada pengajuan permohonan lisensi kepada BPLH Provinsi Papua. Hal ini dapat dilihat dari hasil BINWAS menunjukkan masih banyak persyaratan lisensi yang belum terpenuhi. Minimnya SDM menjadi faktor utama termasuk juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh KPA.

Pembinaan dalam rangka pembentukan KPA perlu secara kontinyu dilakukan sehingga kelengkapan administrasi dapat terpenuhi. Komunikasi dan kerja sama dengan KPA Provinsi Papua maupun keterlibatan dalam proses penilaian dokumen AMDAL terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di

Kabupaten Biak Numfor wajib dilakukan untuk meningkatkan kesiapan KPA.

Outcome Kegiatan

Outcome dari kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Komisi Amdal Kabupaten/Kota adalah:

1. KPA Kota Jayapura, KPA Kabupaten Jayapura dan KPA Kabupaten Merauke, perlu dipertimbangan rekomendasi linsensi yang telah diberikan mengingat secara umum :
 - a. Administrasi proses AMDAL tidak terdokumentasikan sesuai tahapan yang wajib dilalui
 - b. Mutu dokumen AMDAL dan berkualitas buruk
2. KPA Kabupaten Nabire dan KPA Kabupaten Biak Numfor belum memenuhi persyaratan yang diwajibkan untuk memperoleh rekomendasi dan lisensi KPA sebagaimana yang diatur dalam PERMENLH 15 Tahun 2010.
3. Hasil evaluasi terhadap 3 KPA yang telah memiliki lisensi menunjukkan :
 - a. KPA Kota Jayapura
Teguran tertulis terhadap administrasi proses AMDAL yang tidak terdokumentasikan dan peningkatan kapasitas SDM dalam menghasilkan dokumen berkualitas baik.
 - b. KPA Kabupaten Jayapura
Teguran tertulis terhadap administrasi proses AMDAL yang tidak terdokumentasikan dan pencabutan rekomendasi KPA.
 - c. KPA Kabupaten Merauke
Teguran tertulis terhadap administrasi proses AMDAL yang tidak terdokumentasikan dan peningkatan kapasitas SDM dalam menghasilkan dokumen berkualitas baik.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 198.250.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 72,16% dan realisasi keuangan 71,82%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 142.384.400,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah). Dengan bobot 7,86%.

3. Kegiatan Rakoornis Lingkungan Hidup Provinsi Papua

Dalam mendukung semangat Otonomi Khusus Papua melalui visi misi Gubernur Papua “Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” di perlukan peran serta dan partisipasi semua pihak baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat sebagai pilar pembangunan. Gagasan dan upaya mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua perlu di lakukan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kualitas hidup orang papua untuk jangka panjang dan masa depan anak cucu, sesuai amanat pasal 63 dan pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Selain itu potensi dan kekayaan alam papua juga menjadi modal utama pembangunan yang perlu dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan serta dibutuhkan penataan system politik, social, ekonomi, hukum dan infrastruktur sebagai alat dan sarana yang perlu dikembangkan dan digunakan secara tepat.

Peran para pihak melalui kerjasama diberbagai bidang atau sektor pembangunan sangatlah penting dan perlu terjaga dengan harmonis agar mendukung pembangunan berkelanjutan di papua secara bijaksana, adil dan merata

Salah satu bentuk kerjasama yang perlu di koordinasikan untuk menjawab permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi saat ini maupun ke depan di Provinsi Papua adalah bagaimana meningkatkan fungsi koordinasi dan menggalang serta menggerakan peran aktif semua pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

sebagai upaya melestarikan fungsi lingkungan yang dimulai sejak perencanaan sampai dengan penegakan hukum. Untuk itu pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinir pelaksanaan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan di wilayah Provinsi Papua, berupaya membangun kerjasama dengan Instansi Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota maupun mitra kerja lainnya, agar bersama-sama mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua.

Rapat Koordinasi Teknis (Rakoornis) Lingkungan Hidup setiap tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua merupakan salah satu sarana yang digiatkan untuk memfasilitasi atau memediasi, koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, sinerginitas program dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan antara Instansi Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota serta mitra kerja, sehingga diharapkan dapat meminimalisir permasalahan lingkungan di Provinsi Papua.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Rakoornis Lingkungan Hidup Provinsi Papua adalah:

Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2015 dari tanggal 24 s/d 27 Februari 2015, di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan dihasilkan sejumlah **Rekomendasi** sebagai berikut:

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Februari Tahun Dua Ribu Lima Belas, peserta rapat koordinasi teknis Instansi Lingkungan hidup Se Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diusulkan kepada Gubernur Papua agar Instansi Lingkungan Hidup di Provinsi Papua dan Kab/Kota tidak digabung dengan instansi Kehutanan dan Sektor Lainnya di daerah;

2. BPLH Provinsi Papua segera membuat telaahan tentang pentingnya instansi Lingkungan Hidup di Daerah kepada Gubernur, untuk selanjutnya mewajibkan para Bupati membentuk instansi Lingkungan Hidup setara Eselon II termasuk yang sudah ada tetapi masih berstatus Kantor Lingkungan Hidup atau Bagian;
3. Penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota khususnya SDM dan sarana prasarana pengendalian dampak lingkungan agar difasilitasi dan didanai dari APBD Provinsi Papua dan APBD Kabupaten/Kota;
4. BPLH Provinsi Papua dan Instansi Lingkungan Hidup Kab/Kotawajib melakukan inventarisasi potensi alam, mengidentifikasi isu lingkungan dan penganan kapasitasmasyarakat adat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan dukungan dana yang dialokasi dari APBD;
5. Program dan kegiatan lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib yang dikoordinir oleh Instansi Lingkungan Hidup di Provinsi Papua dan Kab/Kota, Wajib mendapatkan Prioritas Pendanaan dari pembagian dana Otsus 20% dan 80%;
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup yang bersumber dari APBN wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota, bukan SKPD lain sesuai petunjuk teknis DAK.
7. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota agar menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan pendanaannya melalui program Pembentukan Kampung Perubahan Iklim (Proklim) yang tersebar di 5 (lima) Wilayah Adat dalam bentuk proposal yang dapat disampaikan kepada Global Environment Facility (GEF) KLH;

8. Bappeda Provinsi Papua dan Bappeda Kab/Kota Wajib mendukung program kampung iklim (PROKLIM) dan pengendalian sampah melalui program kampanye kebersihan dan peduli lingkungan, pembangunan TPST, TPA, Bank Sampah, dll di Kabupaten/Kota sebagaimana Program GERMANG MAS HASRAT PAPUA;
9. BPLH Provinsi Papua agar memfasilitasi kerjasama mitra swasta yang berada di Provinsi Papua dengan Instansi Lingkungan Hidup Kab/Kota dalam mendukung program/kegiatan pengendalian dan pengawasan Lingkungan serta pembinaan masyarakat peduli Lingkungan di Kab/Kota (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, dll).
10. BPLH Provinsi Papua dan Instansi Lingkungan Kab/Kota Wajib membentuk Pos Pengaduan Lingkungan Hidup;
11. Dalam pengusulan Perubahan Anggaran Tahun 2015 BPLH Provinsi Papua agar dimasukkan kegiatan diklat PPLHD, PPNS dan Diklat Teknis Lingkungan (AMDAL, Audit Lingkungan, Tenaga Laboratorium, Tenaga Sampling Kualitas Air dan Udara, dll);
12. Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Lingkungan Se-Papua Tahun 2016 dilaksanakan di Kota Jayapura.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bali

Tanggal : 27 Pebruari 2015

Yang Merekomendasi:

Dr. Ir. Noak Kapisa, M.Sc	BPLH Provinsi Papua
Ir. Ketty Kailola	BLH Kota Jayapura

Maria Tanawani, S.Si, M.Kes	BLH Kab. Kep Yapen
Framasius Obe, S.Sos	BLH Kab. Merauke
Drs. Barnabas Taygat	BLH Kab. Keerom
Drs. Patrisius Yamlai	BLH Kab. Jayapura
Kostafina Palpialy, Amd.Pi	BLH Kab. Biak Numfor
Elay Giban, SE, MM	BLH Kab. Yahukimo
Ir. Clemens Rumbiak	BAPEDALDA Sarmi
S. Soumilena	BLH Kab. Mimika
George de Fretes, SH	BLH Kab. Jayawijaya
Klemens Danumira, S.Sos	BLH Kab. Nabire
Manase Katoki, S.Sos, MA	Bapedalda Kab. Paniai
Carla Karubaba, S.Hut, M.Si	Dinas Kehutanan dan Lingk Hidup Kab. Supiori
Andrias Patoding	Bappeda Kab. Pegunungan Bintang
Manuel Marto Pasau	Bappeda Kab. Boven Diegol
Demianus Loho	KLH Kab. Yalimo
Toguan Hutapea, M.Si	KLH Kab. Mamberamo Tengah
Thobias Zonggonau, S.IP	KLH Kab. Intan Jaya
Else Hallatu, ST	KLH Kab. Tolikara

Outcome Kegiatan

Outcome dari kegiatan Rakoornis Lingkungan Hidup Provinsi Papua adalah:

1. Adanya kesepakatan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu;
2. Teridentifikasi permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Papua;
3. Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan lingkungan hidup secara terpadu;
4. Terjalannya koordinasi lintas wilayah administrasi dan lintas instansi lingkungan hidup;
5. Adanya pemahaman pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara terpadu.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 923.161.610,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 97,60%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 900.960.900,- (Sembilan Ratus Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Dengan bobot 36,62%.

4. Kegiatan Penilaian Dokumen LH 10 Kegiatan Wajib AMDAL

Aktifitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktifitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga dampak pengendalian dampak negative dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.

Perangka atau instrument yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah AMDAL dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. Dan pada pasal 34 diwajibkan memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL harus sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabel, dan integritas semua pihak terkait agar instrument ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif. AMDAL dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua juga mempunyai peran yang strategis dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di Papua. Dengan semakin besarnya minat investor untuk berinvestasi di Papua, tentu akan menimbulkan dampak lingkungan hidup yang besar. Dokumen AMDAL dan UKL-UPL menjadi kegiatan perencanaan yang letaknya dibagian depan investasi di daerah.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Penilaian Dokumen LH 10 Kegiatan Wajib AMDAL adalah:

Pada tahun 2015, Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua telah menilai kegiatan wajib AMDAL sebanyak 40 kegiatan dengan kegiatan yang memperoleh Kelayakan dan Izin Lingkungan sebanyak 12 kegiatan. UKL-UPL 1 Kegiatan. Sedangkan kegiatan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH sebanyak 27 kegiatan. Komisi AMDAL juga memproses Kesepakatan Kerangka Acuan, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan untuk Proses AMDAL. Keputusan yang lain adalah Surat teguran pembuatan dokumen lingkungan hidup, rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dan keputusan DELH.

Outcome Kegiatan

Outcome dari kegiatan Penilaian Dokumen LH 10 Kegiatan Wajib AMDAL adalah:

- Mutu dokumen AMDAL yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 318.750.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 90,75% dan realisasi keuangan 90,62%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 288.844.510,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah). Dengan bobot 12,64%.

**Kegiatan Wajib AMDAL dan DELH yang telah diproses oleh Komisi Penilai AMDAL
Provinsi Papua pada Tahun 2015**

Tabel 3.6. KEGIATAN PEMBAHASAN DOKUMEN AMDAL (KA-ANDAL, ANDAL, RKL/RPL)

No	Pemrakarsa/ Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan/ Sektor	Lokasi/ Luas Areal/ T. Koordinat	Proses AMDAL				Konsultan	Keterangan
				Pengumuman		Pembahasan			
				Cetak	Konsultasi Publik	KA-ANDAL	ANDAL, RKL/RPL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Nelman Tarigan, SPd.T,ST	Rencana Pembangunan Ruas Jalan Wamena-Habbema-Kenyam Prov. Papua	Panjang Jalan 140 Km di Kab. Jayawijaya dan Nduga 1380 33.84224' BT dan 40 14,04795' LS	Harian papua Tgl , 6 Juni 2012	18 Januari 2013	*) 28 Mei 2013 R. Tim Teknis belum disepakati *) 12 Juli 2013 R. Tim Teknis disepakati dengan perbaikan *) 19 Maret 2014 R. Tim Teknis disepakati dengan perbaikan *) 19 Maret 2014 R. Asistensi Tim Teknis disepakati dengan perbaikan *) 02 Juli 2014 R.	*) 17 Desember 2014 R. Tim Teknis belum disetujui *) 23 Desember 2014 R. Verifikasi Timtek *) 29 Desember 2014 R. Komisi	Perorangan Dr. Ir. Dedik Budianto Ketua Tim Penyusun	*) SK Kesepakatan Nomor 25 Tahun 2014 Tanggal, 2 September 2014 *) SK Kelayakan Lingkungan Nomor 662/13/Tahun 2015 Tanggal, 19 Januari 2015 *) Izin Lingkungan Nomor 503/14/Tahun 2015 Tanggal, 22 Januari 2015

						Perubahan KA-ANDAL oleh Tim Teknis disepakati dengan perbaikan *) 15 Desember 2014 Terima Dok. Final			
2.	PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industri Yulius Lim	Rencana Usaha Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Distrik Arso Timur Kab. Keerom Luas : + 4.855 Ha 140 ⁰ 46' 33,5"-140 ⁰ 51'59,2" BT 02 ⁰ 52' 29,5"-02 ⁰ 57'08,1" LS	Koran Harian Suluh Papua, 8 April 2014	24 April 2014	*) 19 Agustus 2014 R. Tim Teknis *) 22 Oktober 2014 R. Tim Teknis	*) 30 Desember 2014 R. Timtek diterima dengan perbaikan *) 14 Januari 2015 R. Verifikasi Timtek *) 19 Januari 2015 R. Komisi	PT. Hexagonal DR. HBenry Bastaman, MES	*) SK Kesepakatan Nomor 29 Tahun 2014 Tanggal, 3 November 2014 *) SK Kelayakan Lingkungan Nomor 12 Tahun 2015 Tanggal, 16 Februari 2015 *) Izin Lingkungan Nomor 13 Tahun 2015 Tanggal, 16 Februari 2015
3.	PT. Tunas Sawaerma Kim Hoon	Rencana Usaha Pembangunan	Kampung Asikie Distrik Luas : 20 Ha	Harian Cenderawasih Pos 24 April 2014	23 Juli 2014	*) 19 November 2014 R. Timtek *) 30 Januari 2015 R. Verifikasi		PT. Alas Consutans Jl. Sengked Kampus IPB	*) SK Kesepakatan No 01 Tahun 2015 Tgl, 4 Feb 2015

		Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawi di Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua	140 ⁰ 24°49,6",14 0 ⁰ 30'15,8", 140 ⁰ 31°3,3", 140 ⁰ 31°27,8", 140 ⁰ 25°42,6" BT 6 ⁰ 22'1,9", 6 ⁰ 20'56", 6 ⁰ 31'11,6", 6 ⁰ 31'37,2", 6 ⁰ 33'42,4" LS			Timtek *) 16 Februari 2015 Terima Dok. Final		Darmaga-Bogor 16680 Jabar Telp. (0251) 8621133 Fax (0251)n8621 137 Sonny Anggoro	
4.	PT. Berkat Cipta Abadi Sae Jeong Sik	Rencana Usaha Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit	Di Kamp. Getenkiri Distrik Jair Luas : 12.500 Ha 140 ⁰ 25°57,36"- 140 ⁰ 32'0,96" BT & 6 ⁰ 34°31,44"- 6 ⁰ 45°56,52" LS	Harian Cenderawasih Pos 24 April 2014	23 Juli 2014	*) 18 November 2014 R. Tim Teknis *) 30 Januari 2015 R. Verifikasi Timtek 16 Februari 2015 Terima Dok. Final		PT. Alas Consutans Jl. Sengked Kampus IPB Darmaga-Bogor 16680 Jabar Telp. (0251) 8621133 Fax (0251)8621137 Sonny Anggoro	*) SK Kesepakatan Nomor 02 Tahun 2015 Tanggal, 4 Februari 2015

5.	PT. Medcopapua Alam Lestari Sukiman	Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI)	Di Distrik Ngguti dan Kaptel Kabupaten Merauke seluas : 72.426 Ha 139 ⁰ 39°15,48"- 140°01'27,84" BT & 7°25'47,28"- 7°52'46,92" LS	16 Juni 2014	09 Sept 2014	*) 9 Desember 2014 R. Tim Teknis disepakati dengan perbaikan *) 23 Januari 2015 R. Verifikasi Timtek *) 16 Februari 2015 Terima Dok. Final	*) 1 April 2015 R. Timtek	PT. Alas Consutans Jl. Sengked Kampus IPB Darmaga-Bogor 16680 Jabar Telp. (0251) 8621133 Fax (0251) 8621137 Sonny Anggoro	*) SK Kesepakatan Nomor 07 Tahun 2015 Tanggal, 26 Januari 2015
6.	Dishub Komunikasi dan Informatika Kab. Nabire (PT. Lintas Karya Envirtama) Ka Dis hubkomimfo	Rencana Pembangunan Bandar Udara Douw Aturure Nabire	Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Seluas:265,5 Ha 3°22'51" LS- 135°23'08" BT dan 3°24'48" LS-135°24'11" BT	20 November 2014	26 Agustus 2014	*) 26 November 2014 R. Tim Teknis disepakati untuk diperbaiki *) 8 Desember 2014 R. Verifikasi Timtek. Disepakati untuk diperbaiki	*) 15 April 2015 R. Timtek *) 24 April 2015 R. Komisi *) 27 April 2015 R. Verifikasi Timtek	PT. Lintas Karya Envirtama Amiruddin	*) SK Kesepakatan Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal, 4 Februari 2015

7.	PT. Daya Indah Nusantara Surja	Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Distrik Pantai Timur Barat Kabupaten Sarmi Seluas : + 10.576,27 Ha 139024'37,649"- 139030'31,491" BT dan 3012'8,886"- 303'42,593" LS		27 Juni 2014	*) 11 Desember 2014 R. Tim Teknis disepakati dengan perbaikan *) 10 Februari 2015 R. Verifikasi Timtek	*) 16 Maret 2015 R. Timtek *) 18 Maret 2015 R. Komisi *) 19 Maret 2015 R. Verifikasi Timtek.	PT. Widya Cipta Buana Drs. Azis Rachman Komp. Perkantoran Metro Jl. Venus Barat Kav. 15 Margahayu Raya-Soekarno Hatta Bandung 40 286 Telp. 022-7568445/7509159/ Fax. 7509172	*) SK Kesepakatan Nomor 04 Tahun 2015 Tanggal, 11 Februari 2015
8.	PT. Himagro Sukses Selalu Jimmy Asmadi	Rencana Usaha Perkebunan dan Industri Karet	Distrik Edera, Syahcame dan Bamgi Kab. Mappi Provinsi Papua Luas 40.000 Ha	Harian Cenderawasi Pos, 20 Januari 2014	15 feb 2014	*) 12 Mei 2014 R. Mandiri Tim Teknis *) 3 Juli 2014 R. Tim Teknis belum disepakati *) 17 Februari 2015 R. Verifikasi Timtek *) 14 April 2015 R. Verifikasi Timtek		PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants Sony Anggoro	*) SK Kesepakatan Nomor 05 Tahun 2015 Tanggal, 14 April 2015

9.	PT. Mappi Sejahtera Bersama Ang Anton Asmadi	Usaha Pembangunan Perkebunan dan Industri Pengolahan Karet	Di Distrik Edera dan Syahcame Kab. Mappi. Luas : 20 Ha 139 ⁰ 30'56,00" 139 ⁰ 32'56,00" BT dan 7 ⁰ 3'17,92"- 7 ⁰ 3'45,00" LS	Harian Cenderawasi Pos, 20 Januari 2014	13 Februari 2014	*) R. Mandiri Tim Teknis *) 4 Juli 2014 R. Tim Teknis belum disepakati *) 18 Februari 2015 R. Verifikasi Timtek *) 14 April 2015 R. Verifikasi Timtek		PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants Sony Anggoro	*) SK Kesepakatan Nomor 06 Tahun 2015 Tanggal, 14 April 2015
10.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X (PU) Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Se.Eng	Rencana Pembangunan Ruas Jalan Waropko -Oksibil	Di Kab. Boven Digoel dan Pegunungan Bintang sepanjang + 109 Km	18 Agustus 2014	10 Oktober 2014	*) 21 November 2014 R. Tim Teknis belum dapat disepakati	*) 21 September 2015 R. Timtek disepakati dengan perbaikan *) 1 Oktober 2015 R. Verifikasi *) 12 Oktober 2015 R. Komisi *) 13 Oktober 2015 R. Verifikasi	Perorangan Edy Priatna (Ketua Tim)	
11.	Balai Besar Pelaksanaan Jln Nasional X (PU) Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Se.Eng	Rencana Pembangunan Ruas Jalan Oksibil - Dekai	Di Kab. Yahukimo & Pegunungan Bintang sepanjang + 308,58 Km 04 ⁰ 54'11,0",04" 53'02,7", 04 ⁰	18 Agustus 2014	15 Sept 2014 18 Sept 2014	*) 20 November 2014 R. Tim Teknis belum dapat disepakati	*) 21 Sept 2015 R. Timtek *) 1 Oktober 2015 R. Verifikasi *) 12 Oktober 2015 R. Komisi *) 13 Oktober 2015 R. Verifikasi	Perorangan Pranoto (Ketua Tim)	*) SK Kesepakatan Nomor 07 Tahun 2015 Tanggal, 17 April 2015

			53°10,5", 04 ⁰ 52°41,4", 04 ⁰ 50°16,4", 04 ⁰ 49°28,9", BT dan 140°37'55,7",1 140°34'31,0",14 140°34'22,2", 140°32'16,8", 140°27'41,8", 140°25'54,7", LS						
12.	PT. Sawit Makmur Abadi Benny Adrian	Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahannya	Distrik Wapoga Kabupaten Nabire Seluas : 40.000 Ha 136°0'0"- 136°20'0" BT dan 2°47'9"- 3°0'2" LS	22 Desember 2014	13 Januari 2015	*) 8 Maret 2015 R. Timtek		PT. Widya Cipta Buana Drs. Azis Rachman Komp. Perkantoran Metro Jl. Venus Barat Kav. 15 Margahayu Raya-Soekarno Hatta Bandung 40286 Telp.	*) SK Kesepakatan Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal, 23 Juni 2015

								022-7568445/7509159/ Fax. 7509172	
13.	PT. Mondialindo Setya Pratama Oki Handoyo Probo	UPHHK	Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi Seluas : 123 ⁰ 1'2''- 139 ⁰ 00'4'' BT dan 2 ⁰ 0'7''- 2 ⁰ 20'7'' LS	4 Februari 2014	20 Februari 2015	*) 19 Maret 2015 R. Timtek *) 2 April 2015 R. Verifikasi Timtek	*) 29 Juli 2015 R. Timtek	PT. Hexagonal International Konsultant	*) SK Kesepakatan Nomor 05 Tahun 2015 Tanggal, 7 April 2015 *) SK Kelayakan Lingkungan Nomor 2015 Tanggal, 2015 *) Izin Lingkungan Nomor 2015 Tanggal, 2015
14.	Disperindag kop Kab. Pegunungan Bintang	Rencana Pemb. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH)	Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang Kapasitas 1 (satu) MW			*) 23 April 2015 R. Timtek *) 6 Mei 2015 R. Verifikasi Timtek			Sk Kelayakan Izin Ling
15.	Kementerian PU Balai Wilayah Sungai	Rencana Pembangunan Daerah	Kab. Sarmi Luas : 3.200 Ha	1 September 2014	26 Sept 2014			PT. Multi Karadiguna Jasa Suisli Mardaniba	Sedang diproses

	Papua Ir. Happy Mulya, ME	Irigasi Bonnggo Kab. Sarmi Prov. Papua							
16.	Kementerian PU Balai Wil. Sungai Papua Ir. Happy Mulya, ME	Pembang unan Penyedia an Air Baku di Kabupate n Merauke	Sungai Maro	19 Juni 2014	1 Juli 2014	*) 16 Desember 2014 R. Tim Teknis belum disepakati		PT. Multi Karadiguna Jasa Suisli Mardaniba	Sedang diproses
17.	Kementerian PU Balai Wil. Sungai Papua Ir. Happy Mulya, ME	Pembang unan Penyedia an Air Baku di Kabupate n/Kota Jayapura		19 Juni 2014	23 September 2014			PT. Multi Karadiguna Jasa Suisli Mardaniba	Sedang diproses
18.	Dinas PU Prov. Papua Kadis	Peningka tan Ruas Jalan Arso XIV-	Distrik Arso dan Skamto Kab. Keerom Sepanjang 30 Km	16 Desember 2014	10 Maret 2015			PT. Teisar Cipta Sarana Ir. Ahcmad Dhanni	Sedang diproses

		Sawia-Kwarja	14300'3"- 14600'0" BT dan 2045'5"- 300'0" LS						
19.	Dinas PU Prov. Papua Kadis	Pemb. Ruas Jalan Burmeso - Gesa- Barapasi	Distrik Mamberamo Tengah dan Benuki Kab. Mamberamo Raya Sepanjang 15 Km	16 Desember 2014	19 Maret 2015			PT. Teisar Cipta Sarana Ir. Ahcmad Dhanni	Sedang diproses
20.	Dinas PU Prov. Papua Kadis	Pemb. Ruas Jalan Menawi- Sumberb aba	Distrik Angkaisera dan Teluk Ampimoi Kab. Kepulauan Yapen Sepanjang 15 Km	16 Desember 2014	20 Maret 2015 21 Maret 2015			PT. Teisar Cipta Sarana Ir. Ahcmad Dhanni	Sedang diproses
21.	Dinas PU Prov. Papua Kadis	Pembang unan Ruas Jalan Ilu- Karubaga	Distrik Karubaga Kab. Tolikara Sepanjang 15 Km	16 Desember 2014	25 Maret 2015			PT. Teisar Cipta Sarana Ir. Ahcmad Dhanni	Sedang diproses

22.	Dinas PU Prov. Papua Kadis	Pembang unan Ruas Jalan Taja - SP V - Kwarja	Distrik Yapsi Kab. Jayapura sepanjang 40 Km	16 Desember 2014	31 Maret 2015			PT. Teisar Cipta Sarana Ir. Ahcmad Dhanni	Sedang diproses
23.	Dinas PU Prov. Papua Kadis	Pembang unan Ruas Jalan Taja- Lereh	Distrik Yapsi Kab. Jayapura Sepanjang 25 Km	16 Desember 2014	31 Maret 2015			PT. Teisar Cipta Sarana Ir. Ahcmad Dhanni	Sedang diproses
24.	PT. Sawit Murni Sejahtera Gunawan Sumantri	Pembang unan Perkebuna n Kelapa Sawit seluas 20.442 Ha dan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 90 Ton TBS/Jam	Distrik Obaa Kab. Mappi Seluas : ± 20.725 H 139 ⁰⁰ '03''- 139 ²⁰ '01'' BT dan 5 ⁵⁰ :06''- 6 ⁰⁰ '08'' LS	23 April 2015		*) 11 Agustus 2015 R. Timtek belum dapat disepakati		PT. Adi Banuwa	Sedang diproses

25.	PT. Putra Palma Cemerlang	Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 32.119 Ha dan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 2x90 Ton TBS/Jam	Distrik Assue Kab. Mappi Seluas : ± 33.775 Ha 139 ⁰⁶ "-139 ⁰²⁹ " BT dan 6 ⁰⁶ "-6 ¹⁶ " LS	23 April 2015		*) 12 Agustus 2015 R. Timtek belum dapat disepakati		PT. Adi Banuwa	Sedang diproses
26.	PT. Ekolindo Palm Lestari	Pembangunan Perkebunan Tanaman Pangan seluas 25.700 Ha dan Pabrik Pengolahan Kapasitas 100 Ton/Jam	Distrik Obaa Kab. Mappi Seluas : ± 25.700 Ha 139 ⁰⁹ "-139 ²⁴ " BT dan 5 ⁵² "-6 ⁰² " LS	23 April 2015		*) 13 Agustus 2015 R. Timtek belum dapat disepakati		PT. Adi Banuwa	Sedang diproses

27.	PT. Ekolindo Palm Nusantara	Pembangunan Perkebunan Tanaman Pangan seluas 21.300 Ha dan Pabrik Pengolahan Kapasitas 100 Ton/Jam	Distrik Obaa Kab. Mappi Seluas : ± 21.300 Ha 139 ⁰ 11"-139 ⁰ 24" BT dan 6 ⁰ 1"-6 ⁰ 7" LS	23 April 2015		*) 13 Agustus 2015 R. Timtek belum dapat disepakati		PT. Adi Banuwa	Sedang diproses
28.	PT. Karya Mandiri Environment (Dishub Provinsi Papua/Kadis Perhub	Pembangunan Pelabuhan Waren Kabupaten Waropen	Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Provinsi Papua 20 14' 00,0" LS dan 1360 22' 49' 6" BT atau 9753065	20 Agustus 2013	23 Agustus 2013	*) 07 November 2013 R. Tim Teknis belum disepakati		PT. Karya Mandiri Environment	Sedang diproses

			N & 6535065 E						
29.	BLH Kab. Biak Numfor	Rencana Pembangunan Waterfront City (Kota Pantai)	Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor	21 Oktober 2015	21 September 2015	*) 30 November 2015 R. Tim Teknis		Gelar Buana Semesta Ir. Kirbrandiati	Sedang diproses
30.	BLH Kab. Biak Numfor	Rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Wadibu	Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor	21 Oktober 2015	21 September 2015	*) 30 November 2015 R. Tim Teknis		Gelar Buana Semesta Ir. Kirbrandiati	Sedang diproses
31.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mappi	Rencana Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)	Kampung Sumur Aman Distrik Minyamur Kabupaten Mappi	8 Oktober 2015					Sedang diproses
32.	Dinas Pekerjaan Umum Prov. Papua	Pembangunan Ruas Jalan Sarmi-Arbais							Sedang diproses

33.	Dinas Pekerjaan Umum Prov. Papua	Rencana Pembangunan Jalan Tiom (Lanny Jaya)-Maki-Bolakme (Jayawijaya) Sepanjang 40 Km	Kabupaten Lanny Jaya dan Jayawijaya						
34.	Dinas Pekerjaan Umum Prov. Papua	Rencana Pembangunan Jalan Dekai-Logpond-Pattipi Sepanjang 18,50 Km	Kabupaten Yahukimo						Sedang diproses
35.	Dinas Pekerjaan Umum Prov. Papua	Rencana Pembangunan Jalan Kanggim	Kabupaten Tolikara						Sedang diproses

		e-Mamit Sepanjang 40 Km							
36.	Dinas Pekerjaan Umum Prov. Papua	Rencana Pembangunan Jalan Mandala- Wolo- Kobakma Sepanjang 92 Km	Kabupaten Merauke						Sedang diproses
37.	Dinas Pekerjaan Umum Prov. Papua	Rencana Pembangunan Jalan Kaugapu (SP VIII)-SP V Sepanjang 18 Km	Kabupaten Mimika						Sedang diproses
38.	Dinas Pekerjaan Umum Prov. Papua	Rencana Pembangunan Jalan Kepi-	Kabupaten Mammpi						Sedang diproses

		Bade Sepanjang 95 Km							
39.	Dinas Pekerjaan Umum Prov. Papua	Rencana Pembangunan Jalan Enarotali-Sugapa Sepanjang 50 Km	Kabupaten Paniai						Sedang diproses
40.	Dinas Pekerjaan Umum Prov. Papua	Rencana Pembangunan Jalan Sarmi-Arbais Sepanjang 55 Km	Kabupaten Sarmi						Sedang diproses

Sumber : Log Book Sekretariat Komisi AMDAL Provinsi Papua, 2015

Tabel 3.7. KEGIATAN YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN LINGKUNGAN TAHUN 2015

No	Pemrakarsa/ Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan/ Sektor	Lokasi/ Luas Areal/ T. Koordinat	Proses AMDAL				Konsultan	Keterangan
				Pengumuman		Pembahasan			
				Cetak	Konsultasi Publik	KA-ANDAL	ANDAL, RKL/RPL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Nelman Tarigan, SPd.T,ST	Rencana Pembangunan Ruas Jalan Wamena- Habbema- Kenyam Prov. Papua	Panjang Jalan 140 Km di Kab. Jayawijaya dan Nduga 1380 33.84224' BT dan 40 14,04795' LS	Harian papua Tgl , 6 Juni 2012	18 Jan 2013	*) 28 Mei 2013 R. Tim Teknis blm disepakati *) 12 Juli 2013 R. Tim Teknis disepakati dgn perbaikan *) 19 Maret 2014 R. Tim Teknis disepakati dgn perbaikan *) 19 Maret 2014 R. Asistensi Tim Teknis disepakati dgn perbaikan	*) 17 Des 2014 R. Tim Teknis blm disetujui *) 23 Des 2014 R. Verifikasi Timtek *) 29 Des 2014 R. Komisi	Perorangan Dr. Ir. Dedik Budianto Ketua Tim Penyusun	*) SK Kesepakatan No.25 Tahun 2014 Tgl, 2 Sept 2014 *) SK Kelayakan Lingkungan No 662/13/Tahun 2015 Tgl, 19 Januari 2015 *) Izin Lingkungan No.503/14/Thn 2015 Tgl, 22 Januari 2015

						*) 02 Juli 2014 R. Perubahan KA-ANDAL oleh Tim Teknis disepakati dengan perbaikan *) 15 Des 2014 Terima Dok. Final			
2.	PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industri Yulius Lim	Rencana Usaha Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Distrik Arso Timur Kab. Keerom Luas : + 4.855 Ha 140 ⁰ 46' 33,5"-140 ⁰ 51' 59,2" BT 02 ⁰ 52' 29,5"-02 ⁰ 57' 08,1" LS	Koran Harian Suluh Papua, 8 April 2014	24 April 2014	*) 19 Agustus 2014 R. Tim Teknis *) 22 Oktober 2014 R. Tim Teknis	*) 30 Des 2014 R. Timtek diterima dgn perbaikan *) 14 Jan 2015 R. Verifikasi Timtek *) 19 Jan 2015 R. Komisi	PT. Hexagonal DR. HBenry Bastaman, MES	*) SK Kesepakatan No 29 Tahun 2014 Tanggal, 3 Nov 2014 *) SK Kelayakan Lingkungan No 12 Tahun 2015 Tgl, 16 Feb 2015 *) Izin Lingkungan No 13 Tahun 2015 Tgl, 16 Feb 2015
3.	PT. Tunas Sawaerma Kim Hoon	Rencana Usaha Pembangunan Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawi	Kampung Asikie Distrik Luas : 20 Ha 140 ⁰ 24' 49,6", 14 0 ⁰ 30' 15,8",	Harian Cenderawasih Pos 24 April 2014	23 Juli 2014	*) 19 Nov 2014 R. Timtek *) 30 Jan 2015 R. Verifikasi Timtek *) 16 Feb 2015 Terima Dok. Final		PT. Alas Consutans Jl. Sengked Kampus IPB Darmaga-Bogor 16680 Jabar	*) SK Kesepakatan No 01 Tahun 2015 Tgl, 4 Feb 2015

		di Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua	140 ⁰ 31'3,3", 140 ⁰ 31'27,8", 140 ⁰ 25'42,6" BT 6 ⁰ 22'1,9", 6 ⁰ 20'56", 6 ⁰ 31'11,6", 6 ⁰ 31'37,2", 6 ⁰ 33'42,4" LS					Telp. (0251) 8621133 Fax (0251)8621137 Sonny Anggoro	
4.	PT. Berkat Cipta Abadi Sae Jeong Sik	Rencana Usaha Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit	Di Kampung Getenkiri Distrik Jair Luas : 12.500 Ha 140 ⁰ 25'57,36"- 140 ⁰ 32'0,96" BT dan 6 ⁰ 34'31,44"- 6 ⁰ 45'56,52" LS	Harian Cenderawasi h Pos 24 April 2014	23 Juli 2014	*) 18 Nov 2014 R. Tim Teknis *) 30 Jan 2015 R. Verifikasi Timtek *) 16 Feb 2015 Terima Dok. Final		PT. Alas Consutans Jl. Sengked Kampus IPB Darmaga- Bogor 16680 Jabar Telp. (0251) 8621133 Fax (0251)n86211 37 Sonny Anggoro	*) SK Kesepakatan No 02 Tahun 2015 Tgl, 4 Februari 2015

5.	PT. Medcopapua Alam Lestari Sukiman	Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI)	Di Distrik Ngguti dan Kaptel Kab. Merauke seluas : 72.426 Ha 139 ⁰ 39°15,48''- 140°01'27,84'' BT & 7°25'47,28''- 7°52'46,92'' LS	16 Juni 2014	09 Sept 2014	*) 9 Des 2014 R. Tim Teknis disepakati dgn perbaikan *) 23 Jan 2015 R. Verifikasi Timtek *) 16 Feb 2015 Terima Dok. Final	*) 1 April 2015 R. Timtek	PT. Alas Consutans Jl. Sengked Kampus IPB Darmaga-Bogor 16680 Jabar Telp. (0251) 8621133 Fax (0251)8621137 Sonny Anggoro	*) SK Kesepakatan No 07 Tahun 2015 Tgl, 26 Jan 2015
6.	Dishub Komunikasi Informatika Kab. Nabire (PT. Lintas Karya Envirtama) KplaDis hubkomimfo	Rencana Pembangunan Bandar Udara Douw Aturure Nabire	Distrik Wanggar Kab.Nabire Seluas:265,5 Ha 3°22'51'' LS- 135°23'08'' BT & 3°24'48'' LS- 135°24'11'' BT	20 Nov 2014	26 Agustus 2014	*) 26 Nov 2014 R. Tim Teknis disepakati untuk diperbaiki *) 8 Des 2014 R. Verifikasi Timtek. Disepakati untuk diperbaiki	*) 15 April 2015 R. Timtek *) 24 April 2015 R. Komisi *) 27 April 2015 R. Verifikasi Timtek	PT. Lintas Karya Envirtama Amiruddin	*) SK Kesepakatan No 03 Tahun 2015 Tgl, 4 Feb 2015

7.	PT. Daya Indah Nusantara Surja	Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Distrik Pantai Timur Barat Kabupaten Sarmi Seluas : + 10.576,27 Ha 139024'37,64 9"- 139030'31,49 1" BT dan 3012'8,886"- 303'42,593" LS		27 Juni 2014	*) 11 Des 2014 R. Tim Teknis disepakati dengan perbaikan *) 10 Feb 2015 R. Verifikasi Timtek	*) 16 Maret 2015 R. Timtek *) 18 Maret 2015 R. Komisi *) 19 Maret 2015 R. Verifikasi Timtek.	PT. Widya Cipta Buana Drs. Azis Rachman Komp. Perkantoran Metro Jl. Venus Barat Kav. 15 Margahayu Raya-Soekarno Hatta Bandung 40 286 Telp. 022-7568445/7509159/ Fax. 7509172	*) SK Kesepakatan No 04 Tahun 2015 Tgl, 11 Februari 2015
8.	PT. Himagro Sukses Selalu Jimmy Asmadi	Rencana Usaha Perkebunan dan Industri Karet	Distrik Edera, Syahcame dan Bangi Kab. Mappi Prov.Papua Luas 40.000 Ha	Harian Cenderawasi Pos, 20 Januari 2014	15-02-2014	*) 12 Mei 2014 R. Mandiri Tim Teknis *) 3 Juli 2014 R. Tim Teknis blm disepakati *) 17 Feb 2015 R. Verifikasi Timtek		PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants Sony Anggoro	*) SK Kesepakatan No 05 Tahun 2015 Tgl, 14 April 2015

						*) 14 April 2015 R. Verifikasi Timtek			
9.	PT. Mappi Sejahtera Bersama Ang Anton Asmadi	Usaha Pembangunan Perkebunan dan Industri Pengolahan Karet	Di Distrik Edera dan Syahcame Kab. Mappi. Luas : 20 Ha 139 ⁰ 30'56,00" - 139 ⁰ 32'56,00" BT dan 7 ⁰ 3'17,92"- 7 ⁰ 3'45,00" LS	Harian Cenderawasi Pos, 20 Jan 2014	13 Feb 2014	*) R. Mandiri Tim Teknis *) 4 Juli 2014 R. Tim Teknis belum disepakati *) 18 Februari 2015 R. Verifikasi Timtek *) 14 April 2015 R. Verifikasi Timtek		PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants Sony Anggoro	*) SK Kesepakatan No 06 Tahun 2015 Tgl, 14 April 2015
10.	PT. Sawit Makmur Abadi Benny Adrian	Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahanny	Distrik Wapoga Kab.Nabire Seluas : 40.000 Ha 136 ⁰ 0'0''- 136 ⁰ 20'0'' BT dan 2 ⁰ 47'9''- 3 ⁰ 0'2'' LS	22 Des 2014	13 Jan 2015	*) 8 Maret 2015 R. Timtek		PT. Widya Cipta Buana Drs. Azis Rachman Komp. Perkantoran Metro Jl. Venus Barat Kav. 15	*) SK Kesepakatan No 10 Tahun 2015 Tgl, 23 Juni 2015

								Margahayu Raya- Soekarno Hatta Bandung 40 286 Telp. 022- 7568445/7509 159/ Fax. 7509172	
11.	PT. Mondialin do Setya Pratama Oki Handoyo Probo	UPHHK	Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi Seluas : 94.800 Ha 123 ⁰ 1'2"- 139 ⁰ 00'4" BT dan 2 ⁰ 0'7"- 2 ⁰ 20'7" LS	4 Feb 2014	20 Feb 2015	*) 19 Maret 2015 R. Timtek *) 2 April 2015 R. Verifikasi Timtek	*) 29 Juli 2015 R. Timtek	PT. Hexagonal International Konsultant	*) SK Kesepakatan No 05 Tahun 2015 Tgl, 7 April 2015 *) SK Kelayakan Lingkungan No 2015 Tgl, 2015 *) Izin Lingkungan No 2015 Tgl, 2015

12.	Disperindagkop Kab. Pegunungan Bintang	Rencana Pemb. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH)	Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang Kapasitas 1 (satu) MW			*) 23 April 2015 R. Timtek *) 6 Mei 2015 R. Verifikasi Timtek			Sk Kelayakan Izin Ling
-----	--	---	---	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 288.080.000,- (Dua Ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,89%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 287.766.800,- (Dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Dengan bobot 3,97%.

5. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Laboratorium Lingkungan

Salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi efektif dan efisiennya pengelolaan lingkungan hidup di suatu negara atau daerah adalah tersedianya laboratorium yang dalam hal ini adalah laboratorium lingkungan yang mampu menghasilkan data yang valid dan reliable, tidak terbantahkan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Oleh karena itu, peranan dan fungsi laboratorium lingkungan adalah sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah terutama yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di pusat atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkungan hidup di daerah seperti Badan Pengelolalaan Lingkungan Hidup (BPLH), untuk menyediakan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid baik untuk dipergunakan guna mengetahui atau memonitor ada tidaknya pencemaran lingkungan di suatu wilayah (mis: sungai) maupun sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan.

Data kualitas lingkungan dapat dipergunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, maupun pengawasan yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan, perencana, penyusun program, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup. Hal itu sesuai dengan filosofi yang menyatakan bahwa: “*No Measurement – No Data; No Data – No Information; No Information*

– *No Management; No Management – No Policy*”. Meningkatnya kasus-kasus pencemaran lingkungan dan sering kandasnya kasus-kasus lingkungan melalui proses pengadilan di Indonesia (mis: pencemaran sungai, kebakaran hutan) seringkali disebabkan oleh kurangnya data-data dan informasi serta tidak validnya data yang dikumpulkan dari lapangan maupun yang dihasilkan dari analisis laboratorium, sehingga data sebagai alat bukti pencemaran sangat lemah, yang selanjutnya mengakibatkan dakwaan maupun pembuktian sangat lemah, dimana selanjutnya sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum lingkungan. Kelemahan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Memang harus diakui bahwa laboratorium pengujian lingkungan yang ada di Indonesia saat ini baru dimiliki oleh daerah-daerah tertentu pada level provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten, hanya kabupaten-kabupaten tertentu yang memilikinya, itupun hanya laboratorium sederhana yang sangat minim peralatannya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan anggaran pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah yang sangat terbatas

Pada akhirnya, agar pengelolaan lingkungan berjalan dengan efektif di daerah serta untuk dapat mengendalikan kerusakan lingkungan yang lebih parah, sudah selayaknya pemerintah mengalokasikan dana untuk membangun laboratorium lingkungan di setiap daerah tingkat II/kabupaten dilengkapi dengan SDM yang kompeten, sebab bagaimanapun canggihnya suatu laboratorium dengan segala peralatannya bila tidak ditunjang oleh SDM yang kompeten dan memadai serta dana/anggaran pengelolaan yang memadai akan sia-sia belaka.

Menyadari hal tersebut, maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua, agar laboratorium ini beroperasi dengan baik

maka diperlukan suatu regulasi yang akan menjadi landasan hukum dan operasi dari Laboratorium dimaksud, sekaligus memberikan penguatan terhadap kelembagaan Laboratorium tersebut.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Laboratorium Lingkungan tidak dilaksanakan ***karena tidak melaksanakan lelang***

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 146.000.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 31,51 % dan realisasi keuangan 31,51%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah). Dengan bobot 5,79%.

6. Kegiatan Pembentukan Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi Papua

Lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan Indonesia saat ini berada di ambang kehancuran akibat over eksploitasi selama 32 tahun. Berlakunya otonomi daerah dengan tidak disertai tanggung jawab dan tanggung gugat dari pelaksana negara, rakyat semakin terpinggirkan dan termarginalkan haknya, sementara kerusakan lingkungan dan sumber kehidupan berlangsung di depan mata. Keadaan ini kian memburuk seiring dengan reformasi yang setengah hati. Isu dan permasalahan lingkungan dan sumber kehidupan di Indonesia tidak menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan bahkan masih termarginalkan. Padahal dalam tataran politik, isu lingkungan merupakan bagian yang menentukan dalam suatu pengambilan keputusan.

Perencanaan pembangunan nasional yang masih berkarakteristik mengabaikan wawasan Lingkungan Hidup tidak dapat dipisahkan dari

kebijakan pembangunan yang didesain oleh negara. Untuk itu, adanya intervensi kebijakan harus dilakukan oleh para pembuat kebijakan itu sendiri. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang merupakan mitra pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan termasuk kebijakan pembangunan, perlu memiliki wawasan pengarusutamaan lingkungan hidup. Diharapkan nantinya dalam menjalankan fungsi legislasi dan anggaran serta pengawasan (Kebijakan), DPRD berorientasi pada Lingkungan Hidup.

Berangkat dari kenyataan tersebut diatas, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua melaksanakan pembentukan Kaukus Lingkungan Hidup bagi Anggota DPR Provinsi Papua untuk memperkenalkan konsep-konsep baru seperti green polity, green policy, green budget, greenparty, green politician, dan sebagainya. kepada anggota DPRD yang mempunyai peranan dan fungsi dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah dibidang Pengelolalan Lingkungan Hidup.

Output Kegiatan

Output dari kegiatan Pembentukan Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi Papua tidak terbentuk kaukus Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan hanya melaksanakan bimbingan teknis tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi 10 (sepuluh) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Outcome Kegiatan

Outcome dari kegiatan Pembentukan Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi Papua

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 597.700.000,- (Lima ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 95,44% dan realisasi keuangan 95,15%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 568.700.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Dengan bobot 23,71%.

IX. PROGRAM MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

1. Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota (Pilot Project)

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semakin tingginya jumlah penduduk dan aktifitasnya, membuat volume sampah terus meningkat. Akibatnya, untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Disamping itu, tentu saja sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Berdasarkan SK SNI tahun 1990, Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Pada umumnya paradigma masyarakat terhadap sampah dengan sifat padat yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga atau industri, adalah benda yang tidak lagi diinginkan atau tidak bernilai ekonomis.

Dengan adanya UU No. 18/2008, Keseriusan dan keharusan pengelolaan sampah mulai di perhatikan dari hulu (sumber sampah) sampai hilir (tempat pembuangan akhir) dengan implementasi konsep seperti 3 R sampai 5 R, sedangkan pada masyarakat penekanan 3 R lebih diutamakan, karena memaksimalkan pencapaian dengan 3 R saja sudah cukup banyak menangani masalah sampah. Reuse, Reduse, Recycle kemudian ditambah Revalue dan Recovery. Reduse yaitu

mengurangi timbunan sampah, Reuse yaitu dengan upaya pemanfaatan kembali sampah atau barang yang sudah tidak berguna lagi. Recycle adalah daur ulang dari sampah menjadi produk lain yang bernilai ekonomis. Recovery adalah menemukan kegunaan atau manfaat lain dari barang tersebut. Dan revalue yaitu memberi nilai dari barang yang disampahkan agar dapat dijual sebagai barang bekas layak pakai.

Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan (jika feasible), dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat. Dalam pengertian ini pemeran (penguasa, kekuatan) utama dalam pengelolaan sampah adalah masyarakat. Bukan pemerintah atau lembaga lainnya seperti LSM dan lain-lain. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Fungsi motivator adalah memberikan dorongan agar masyarakat siap memikirkan dan mencari jalan keluar terhadap persoalan sampah yang mereka hadapi. Tetapi jika masyarakat belum siap, maka fungsi pemerintah atau lembaga lain adalah menyiapkan terlebih dahulu. Misalnya dengan melakukan pelatihan, study banding dan memperlihatkan contoh – contoh program yang sukses dan lain – lain.

Output Kegiatan

Hasil dari kegiatan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten/Kota adalah :

- a. Terlaksanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sebagai penghasil, pemilah, pemanfaat dan pengolah sampah
- b. Minimisasi timbulan sampah (reduce);
- c. Pemilahan sampah sesuai jenis di sumbernya;
- d. Pemanfaatan (reuse), pengolahan (recycle), dan/atau penjualan sampah;
- e. Pemrosesan akhir sampah residu di TPAS secara ramah lingkungan.

Outcome Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan **Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota (pilot project)** adalah:

1. Terbukanya wawasan masyarakat sebagai penghasil sampah untuk melakukan pengelolaan sampah di lingkungan keluarga maupun di lingkungan tempat tinggalnya dan diharapkan dapat menularkan kebiasaan pengelolaan sampah kepada masyarakat atau kelompok masyarakat lain.
2. Mampu mengurangi (*reduce*) volume sampah yang di buang ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA)
3. Dapat mengkonversi (*reuse & recycle*) sampah menjadi barang yang berguna bagi masyarakat seperti pupuk kompos, pupuk cair dan bio gas
4. Dengan pengelolaan yang profesional konversi di harapkan bisa mendatangkan keuntungan ekonomi dari hasil penjualan pupuk kompos, pupuk cair dan biogas

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 317.750.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,41%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 315.871.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). Dengan bobot 22,60%.

2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Adaptasi dan Mitigasi Tanaman Buah Merah Di 5 Wilayah

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undang tentang penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah tanggungjawab kita semua.

Berbagai kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan (degradasi lingkungan) yang terjadi selama ini, sebagian besar adalah disebabkan oleh ulah manusia dibandingkan dengan proses alam. Ini berarti ketika menata lingkungan hidup maka itu artinya menata perilaku manusia. Diakui bahwa kunci keberhasilan pengembangan sumberdaya manusia kearah terbentuknya sosok manusia dan masyarakat Indonesia yang sadar lingkungan adalah melalui proses yang dilakukan sejak dini.

Sebagai suatu lembaga, adat mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistim kehidupan masyarakat adat tersebut Untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan perekonomian, masyarakat bergantung pada sumberdaya alam yang ada di wilayah adat. Eksploitasi terhadap sumberdaya alam secara tradisionalpun terjadi untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam selain memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat adat juga sangat menentukan keberhasilan dari program-program pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

Implementasi program lingkungan hidup di Papua memerlukan komitmen yang kuat dari segenap komponen termasuk masyarakat adat didaerah ini. Disisi lain belum adanya keterpaduan dan koordinasi yang baik antar berbagai sektor termasuk pemberdayaan institusi kemasyarakatan adat. Untuk itu perlu adanya upaya pemberdayaan institusi masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.

Dalam mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat maupun perubahan iklim, maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua melakukan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Adaptasi dan Mitigasi Tanaman Buah Merah di 5 Wilayah.

Output Kegiatan

Output dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Adaptasi dan Mitigasi Tanaman Buah Merah di 5 Wilayah adalah:

- a) Terlaksananya pemberian dana 16 kelompok masyarakat adat di 13 Kabupaten dan 1 kota.
- b) Terlaksananya penyelamatan Hutan Mangrove, Hutan Sagu, KEHATI (Gaharu dan Kopi) dan Buah Merah melalui kelompok masyarakat adat.
- c) 16 (enam belas) kelompok masyarakat adat yang terdiri dari 5 (lima) kelompok masyarakat adat penyelamat Hutan Mangrove, 2 (dua) kelompok masyarakat adat penyelamat Hutan Sagu, 2 (dua) kelompok masyarakat adat penyelamat KEHATI (Gaharu dan Kopi) serta 7 (tujuh) kelompok masyarakat adat penyelamat buah merah.
- d) Pemahaman dan komitmen institusi masyarakat adat dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

Outcome Kegiatan

Outcome yang diharapkan dari kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Adaptasi dan Mitigasi Tanaman Buah Merah di 5 (lima) Wilayah adalah:

- a) Komitmen Masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Terlaksananya pelestarian dan pengembangan jumlah tanaman mangrove, sagu, KEHATI (Gaharu dan Kopi).
- c) Menurunnya ancaman terhadap kerusakan lingkungan.
- d) Terpeliharanya dan terjaganya kearifan lokal masyarakat adat.

- e) Terbentuknya kelompok masyarakat adat yang baru dalam rangka penyelamatan lingkungan hidup.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.088.250.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Realisasi Fisik kegiatan telah mencapai 100% dan realisasi keuangan 98,20%, sedangkan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 1.068.657.500,-(Satu milyar Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Dengan bobot 77,40%.

BAB IV MASALAH DAN PEMECAHAN

A. MASALAH

Menjawab amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pada pasal 43 bahwa” *Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan Hak - hak Masyarakat Adat dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Hukum yang berlaku*”. Untuk itu maka peranserta masyarakat adat tidak terlepas dari tugas wajib dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan pemekaran wilayah dalam rangka percepatan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur pembukaan kawasan merupakan masalah terbesar dalam menangani masalah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, hal ini disebabkan karena:

1. Bentuk Lembaga/Badan/Pengelola lingkungan Hidup di Kabupaten Kota yang tidak sama, sehingga mempengaruhi tingkat pengambil kebijakan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Belum adanya laboratorium lingkungan di Provinsi Papua yang terakreditasi;
3. Kurangnya PPLHD Provinsi Papua untuk melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup;
4. Terbatasnya tenaga analis dan tenaga sampling untuk melaksanakan uji kualitas air dan udara;
5. Terbatasnya sarana untuk pengujian laboratorium;
6. Sumber Daya Manusia dalam bidang SDA dan LH masih terbatas;
7. Lemahnya koordinasi antar sektor dan kabupaten/kota

B. PEMECAHAN.

Guna mengatasi berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelola lingkungan hidup Provinsi Papua, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Diupayakan adanya keseragaman kelembagaan di tingkat Kabupaten/kota agar tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam struktur organisasi dan tata kerja tidak saling tumpang tindih;
2. Dilaksanakan diklat dan bintek di bidang pengelolaan lingkungan hidup bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, Lembaga Pendidikan lainnya guna meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan aparatur dibidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan SDA.
3. Meningkatkan kapasitas SDM untuk sampling dan analisis laboratorium;
4. Perlu dibuka kelas PPLHD di Provinsi Papua mengingat terbatasnya PPLHD Provinsi Papua;
5. Meningkatkan koordinasi antar sektor dan antar lembaga dengan melibatkan berbagai *stakeholder* agar permasalahan lingkungan bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah akan tetapi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Koordinasi menjadi sangat penting perannya mengingat persepsi tentang lingkungan hidup belum sepenuhnya sama baik ditingkat pengambil kebijakan, aparat perencana, pelaksana, masyarakat maupun LSM.
6. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sangat diharapkan dan perlu mendapat dorongan terus menerus dari pemerintah agar kesadaran masyarakat meningkat;

BAB V
PROGRAM KERJA TAHUN 2016

Program kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2016 pada dasarnya melanjutkan program pengelolaan lingkungan hidup tahun sebelumnya. Adapun kegiatan dari masing-masing program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	76.200.000,-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.000.000,-
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	317.687.500,-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	273.824.500,-
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.310.000,-
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	150.500.000,-
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	1.291.800.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	398.800.000,-
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.000.000,-
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	917.250.000,-
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	894.900.000,-
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	247.000.000,-
6	Pembangunan Rumah Satpam Laboratorium LH	374.500.000,-
7	Pembangunan Rumah Genset Laboratorium LH	235.400.000,-
3. Program Peningkatan Displin Aparatur		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	459.000.000,-
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,-
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	15.000.000,-
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	30.000.000,-
4	Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	40.000.000,-
5	Penunjang Sub TP2K Badan Pengelola Lingkungan Hidup	90.000.000,-
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
1	Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua	643.550.000,-
2	Peningkatan Kapasitas Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua	531.800.000,-
3	Pemantauan RKL/RPL dan Rencana Pembangunan Venue PON	236.700.000,-
4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	424.750.000,-
5	Identifikasi Sumber Beban Pencemaran Ekosistem Danau	389.400.000,-
6	Pengawasan Lingkungan Hidup	424.750.000,-
7	Pembinaan Pemantauan dan Penilaian Adipura	355.500.000,-
8	Peningkatan dan Pengembangan Laboratorium BPLH	2.408.000.000,-
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH		
1	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	301.871.000,-
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH		
1	Pembinaan & Pengawasan Komisi AMDAL Kabupaten/ Kota	182.100.000,-
2	Forum SKPD Lingkungan Hidup Se-Provinsi Papua	454.300.000,-
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Lingkungan Hidup	417.800.000,-
4	Peningkatan Kapasitas Kaukus Lingkungan Hidup Legislatif Provinsi Papua	301.000.000,-
5	Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Wajib AMDAL	498.050.000,-
6	Penyusunan Produk Hukum	272.450.000,-

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
9. Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim		
1	Pengelolaan Sampah di Kab/kota (Pilot/Projeck)	450.400.000,-
2	Identifikasi Gas Rumah Kaca	232.900.000,-
3	Program Kampug Iklim Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	190.800.000,-
Total Anggaran		15.162.043.000,-